

BAB VI

PEMIKIRAN POLITIK MAO TSE TUNG TENTANG REVOLUSI DUA TAHAP UNTUK PEMBANGUNAN SOSIALISME DI TIONGKOK

Pembahasan yang terpapar dalam bab ini merupakan bagian puncak dari penelitian. Dalam hal ini, seluruh kerangka berpikir yang telah dipaparkan dan dikupas dalam bab-bab sebelumnya akan didasarkan pada bagian ini. Adapun permasalahan inti penelitian yang dimaksud adalah pemikiran politik Mao Tse Tung tentang revolusi dua tahap untuk pembangunan sosialisme di Tiongkok. Dalam penelitian ini, agar pemahaman mengenai seluruh pembahasan utama ini dapat tercapai dengan baik, maka peneliti merasa perlu membagi bab ini ke dalam beberapa bagian kajian, yaitu pemikiran Mao Tse Tung tentang revolusi dua tahap, dua tahap revolusi mulai dari Revolusi Demokrasi Baru hingga sosialisme, dan pembangunan sosialisme di Tiongkok.

6.1 Revolusi Dua Tahap dalam Perspektif Pemikiran Mao Tse Tung

Kehadiran imperialisme Jepang di tengah masyarakat yang bercorak feodal di Tiongkok melahirkan penghisapan dan penindasan yang begitu akut. Kehadiran imperialisme Jepang tersebut tentunya untuk memperluas kekuasaan dan dominasinya dalam berbagai aspek, khususnya ekonomi, politik, hingga kebudayaan. Dalam hal ini, keberadaan imperialisme Jepang di Tiongkok tidak serta-merta menghancurkan atau menyingkirkan kelas feodal. Tuan-tuan tanah serta raja-raja perang di Tiongkok kemudian menjadi kolaborator yang

menguntungkan bagi imperialisme Jepang. Hal inilah yang mendorong pergeseran dari Tiongkok yang bercorak feodal menjadi Tiongkok yang terjajah.

Dalam pemikiran Mao, kolaborasi yang dijalin antara imperialisme Jepang dengan kelas feodal adalah kolaborasi yang saling menguntungkan. Hal ini karena datang dan berkembangnya imperialis di Tiongkok berbeda dengan kelahiran kapitalisme di Eropa dan Amerika. Kedatangan dan tujuan imperialisme Jepang ke Tiongkok terutama sekali adalah penguasaan sumber daya alam untuk bahan baku industrinya dan eksploitasi tenaga kerja di Tiongkok. Imperialisme Jepang sama sekali tidak memiliki tujuan untuk menghancurkan secara keseluruhan kelas-kelas tuan tanah dan raja-raja di Tiongkok. Dalam hal ini, keberadaan tuan tanah dan raja-raja di Tiongkok menjadi keuntungan tersendiri bagi imperialisme. Keuntungannya adalah untuk memastikan mudahnya menguasai tanah-tanah dan menjaga corak feodal yang terbelakang.

Keberadaan imperialisme yang berkolaborasi dengan tuan tanah besar menjadikan Tiongkok sebagai negeri terjajah. Dalam hal ini Mao memandang, bahwa perkembangan dari imperialisme Jepang yang berhasil diusir bukan berarti kekuasaan dari imperialisme di Tiongkok telah berakhir. Imperialisme justru muncul dengan cara yang baru, dengan topangan penuh dari tuan tanah besar. Penghisapan dan penindasan yang dilakukan oleh imperialisme Jepang hadir tidak secara langsung, melainkan menguasai ekonomi, politik hingga kebudayaan. Dalam aspek ini, Mao memandang bahwa hal itu dapat terjadi karena pemerintahan borjuis dalam negeri mau menjadi komprador dari imperialisme. Sehingga menjadikan Tiongkok sebagai negeri setengah jajahan setengah feodal.

Dalam pemikiran Mao, karakter Tiongkok yang setengah jajahan setengah feodal menandakan bahwa perjuangan rakyat Tiongkok harus sesuai dengan kondisinya. Perjuangan yang digagas Mao berupa revolusi haruslah memiliki karakter khusus sebagai revolusinya negeri setengah jajahan setengah feodal. Revolusi di Tiongkok tidak dapat begitu saja meniru pola Revolusi Sosialis di Uni Soviet. Tidak juga bisa mengikuti pola revolusi borjuasi yang pernah terjadi di Perancis. Dalam hal ini, Mao memiliki pemikiran politik tentang sebuah pola revolusi untuk Tiongkok, yaitu revolusi dua tahap.

6.1.1 Revolusi Dua Tahap: Karakter Revolusi di Negeri Setengah Jajahan Setengah Feodal

Tiongkok merupakan negeri yang memiliki sejarah peradaban panjang. Berbagai kemajuan budaya dan perkembangan peradabannya sudah sejak lama dikenal dan mempengaruhi negeri-negeri lain, khususnya di Asia. Dalam hal perkembangan masyarakat, seperti dengan bangsa di negeri-negeri lainnya, Tiongkok pernah melalui kehidupan yang bercorak komunal primitif selama ribuan tahun. Dalam hal ini, Tiongkok juga melewati fase masyarakat berkelas yaitu perbudakan dan feodalisme.

Lebih dari 3000 tahun masyarakat Tiongkok terbelenggu dalam sistem feodal. Dalam periode feodalisme ini, berkali-kali rakyat Tiongkok khususnya kaum tani melakukan perjuangan revolusioner untuk melawan penindasan. Dalam hal ini, perjuangan revolusioner selama masa feodalisme terus menemui kegagalan untuk kemenangan kaum tani. Perjuangannya selalu diperalat oleh

tuan tanah dan raja-raja untuk mendapatkan kekuasaan, sementara kaum tani Tiongkok terus terbelenggu dalam penghisapan dan penindasan.

Pada masa panjang feodalisme, masyarakat Tiongkok terbelenggu dengan berbagai karakter feodal terutama dalam aspek ekonomi dan politik. Dalam aspek ekonomi, sistem ekonomi feodalisme mencirikan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Dalam hal ini, kaum tani bukan hanya memproduksi hal pertanian, namun juga menciptakan sebagian besar barang kerajinan tangan yang diperlukan. Sistem sewa tanah saat itu yang memeras kaum tani juga dinikmati sendiri oleh tuan tanah dan bangsawan. Pada masa itu, meskipun sudah terdapat corak pertukaran namun belum menjadi corak yang dominan di Tiongkok. Sementara, yang menguasai sebagian besar tanah adalah tuan tanah, bangsawan, dan kaisar. Dalam hal ini, penguasaan dan monopoli tanah menyebabkan kaum tani Tiongkok hanya memiliki tanah yang kecil, bahkan banyak yang tidak memiliki tanah. Penderitaan kaum tani akibat penguasaan tanah tersebut dijabarkan oleh Mao sebagai berikut:

“Kaum tani menggarap tanah tuan tanah, bangsawan dan keluarga kaisar dengan perkakas kerjanya sendiri, dan menyerahkan 40%, 50%, 60%, 70%, bahkan 80% lebih dari hasilnya untuk dinikmati tuan tanah, bangsawan, dan keluarga kaisar. Kaum tani yang demikian sebenarnya masih merupakan hamba”¹⁸⁸

Pada kenyataannya, kaum tani Tiongkok tidak hanya diperas oleh tuan tanah, bangsawan dan keluarga kaisar, namun juga dilakukan oleh negara kerajaan.

Negara kerajaan merupakan negara yang dipimpin oleh kaisar yang membawahi kerajaan-kerajaan kecil lainnya. Dalam kekuasaannya, negara

188. Mao Tse Tung, *Pilihan Karja Mao Tse Tung Djilid II*, (Peking: Komisi Penerbitan Bahasa Asing Komite Central Partai Komunis Tiongkok, 1965), 394.

kerajaan ini didominasi oleh kelas tuan tanah dan sebagian bangsawan. Kaum tani dipaksa oleh negara kerajaan untuk menyetorkan upeti, membayar pajak, hingga kerja paksa untuk memenuhi kebutuhan aparatur negaranya. Di sinilah aspek politik dari penindasan feodal berjalan.

Dalam aspek politik, kekuasaan feodal di Tiongkok telah terkonsentrasi pada masa Dinasti Qin. Pada masa tersebut kekuasaan tertinggi ada di tangan kaisar. Dalam aspek ini, Mao menjelaskan bahwa:

“Di dalam negara feodal, kaisar memegang kekuasaan mahatinggi. Ia menempatkan pejabat-pejabat di berbagai daerah untuk menagur urusan ketentaraan, kehakiman, keuangan, bahan makanan dan lain-lain, serta bersandar pada tuan tanah dan kaum ningrat sebagai dasar seluruh kekuasaan feodal.”¹⁸⁹

Dalam melancarkan penghisapan ekonomi dan penindasan politik, kelas tuan tanah dapat melakukan berbagai tindak kekerasan untuk memaksakan kepatuhan dari kaum tani. Semua inilah yang menyebabkan mayoritas rakyat Tiongkok hidup dalam belenggu kemelaratan. Dalam hal ini, pada masa feodalisme di Tiongkok, kontradiksi antara kelas penindas dengan yang tertindas semakin meruncing.

Seperti pada hukumnya, kontradiksi merupakan bagian integral dan universal dari setiap materi termasuk masyarakat Tiongkok. Pada masa feodalisme di Tiongkok dengan berbagai ragam kontradiksinya, tetap terdapat satu kontradiksi pokok. Kontradiksi pokok saat itu adalah antara kelas tuan tanah dengan kaum tani yang merupakan mayoritas masyarakat Tiongkok. Dalam hal ini, kontradiksi pokok tersebut tidak hanya bersyaratkan mayoritas dan minoritas

189. *Ibid*, 395

secara kuantitas, namun juga karakternya yang antagonisme. Kontradiksi antara kelas tuan tanah dan kaum tani berkarakter antagonistik. Karakter antagonistik ini dapat terlihat dari benturan kepentingan dan orientasi dari kedua segi kontradiksi tersebut. Kelas tuan tanah menghendaki terus berlanjutnya penguasaan dan monopolinya terhadap tanah dan memperhamba kaum tani, sementara kaum tani Tiongkok memiliki kepentingan untuk mendapatkan tanah dan bekerja secara merdeka. Kedua hal dari segi-segi kontradiksi tersebutlah yang melahirkan karakter kontradiksi yang antagonistik.

Antagonisme kelas antara kaum tani dan tuan tanah yang melahirkan berbagai pemberontakan dan gerakan revolusioner kaum tani. Sejarah panjang penindasan feodalisme di Tiongkok juga beriringan dengan sejarah panjang perjuangan revolusioner kaum tani. Mao mencatat beberapa pemberontakan sebagai berikut:

“Pemberontakan yang besar dan kecil berjumlah ratusan kali. Mulai dari pemberontakan-pemberontakan Tjhen Sheng, Wu Kuang, Siang Ju dan Liu Pang pada zaman Dinasti Qin, kemudian pemberontakan kaum Sinshe, kaum Phinglin, kaum Tjhomei, kaum Thungma dan kaum Huangjin pada zaman Dinasti Han. Pemberontakan Li Mi dan Tou Tjien pada zaman Dinasti Sui. Pemberontakan Wang Sien Tje dan Huang Tjhao pada zaman Dinasti Thang, pemberontakan-pemberontakan Sung Tjiang dan Fang La pada zaman Dinasti Sung. Pemberontakan Tju Juen Tjang pada zaman Dinasti Juen, pemberontakan Li Tje-tjheng pada zaman Dinasti Ming, sampai pada Perang Kerajaan Surga Thaiphing pada zaman Dinasti Qing.”¹⁹⁰

Semua pemberontakan yang pernah hadir di Tiongkok adalah pemberontakan yang revolusioner dari kaum tani. Kaum tani selalu menjadi tenaga penggerak utama dalam setiap zaman dan pemberontakannya. Artinya, kaum tani Tiongkok

190. *Ibid*, 396

sesungguhnya telah memiliki watak yang revolusioner akibat tempaan sejarah perjuangan kelas yang panjang.

Perjuangan kelas yang dilancarkan oleh kaum tani Tiongkok selama masa dinasti pada kenyataannya belum mampu mencapai kemenangan. Dalam hal ini, pemberontakan revolusioner yang dilakukan kaum tani Tiongkok belum mampu benar-benar menghapuskan penghisapan dan penindasan sistem feodal. Dalam pemikiran Mao, terdapat dua faktor utama kegagalan perjuangan revolusioner kaum tani Tiongkok. Faktor pertama adalah belum adanya teori Marxisme-Leninisme yang mampu menjadi pedoman untuk melakukan aksi-aksi revolusioner dengan tepat. Faktor kedua adalah belum lahirnya kepemimpinan dari proletariat dan Partai Komunis yang menjadi senjata utama untuk melancarkan perjuangan revolusioner. Dengan demikian walaupun gerakan rakyat sedikit sudah mencapai kemajuan dari setiap perjuangan revolusioner yang dilakukan, namun hubungan produksi feodal beserta sistem politiknya tetap berdiri dan dominan di Tiongkok.

Kekuasaan struktur ekonomi dan politik feodalisme mencapai akhir kekuasaannya pada saat pecahnya Perang Candu 1840. Saat itu Tiongkok beralih menjadi masyarakat jajahan, setengah jajahan setengah feodal. Artinya, peralihan besar dan masif baru terjadi pada pertengahan Abad ke 19 yang pada praktiknya disebabkan oleh dua faktor. *Pertama*, adalah perubahan dengan adanya pergeseran pola dan hubungan produksi dalam masyarakat Tiongkok. Corak perekonomian yang semula secara sederhana untuk memenuhi kebutuhan mulai digantikan oleh ekonomi jual beli hasil produksi. Hal inilah yang merupakan

faktor utama, karena tanpa adanya pengaruh kapitalisme asing Tiongkok akan tetap menuju fase kapitalisme. Faktor *kedua*, ialah peran pendorong percepatan lahirnya kapitalisme yang dilakukan oleh kapitalisme asing melalui agresi.

Penghancuran corak ekonomi feodal bertujuan untuk membuka pasar secara luas bagi barang dagangan milik industri kapitalis dan menjadikan kaum tani sebagai tenaga kerjanya. Dalam perkembangannya, kapitalisme berkembang pesat seiring dengan sejumlah besar tuan tanah, pedagang besar, birokrat negara mulai menanamkan modalnya pada industri modern. Dalam hal ini Mao memandang bahwa hal-hal tersebutlah yang menjadikan lahirnya kelas baru dalam masyarakat Tiongkok, yaitu kelas borjuasi nasional dan proletariat. Borjuasi Tiongkok berasal dari kelas dan golongan tuan tanah, pedagang dan birokrat negara. Sedangkan proletariat Tiongkok adalah bentuk perubahan dari kaum tani dan pekerja kerajinan kecil yang tidak lagi memiliki alat produksi yang cukup. Dalam aspek kemunculan kelas borjuasi dan proletariat Tiongkok Mao menulis sebagai berikut:

“pada akhir Abad ke 19 dan awal Abad ke 20, yaitu 40 tahun yang lalu, kapitalisme Tiongkok mulai berkembang. Dan 20 tahun yang lalu, yaitu masa perang dunia imperialis yang pertama, industri nasional Tiongkok, terutama industri tepung terigu dan tekstil, mengalami perkembangan yang lebih lanjut, sebab negeri-negeri imperialis Eropa dan Amerika sedang sibuk dengan peperangan itu sehingga untuk sementara waktu mengendorkan tekanannya terhadap Tiongkok.”¹⁹¹

Dalam hal ini, terlihat jelas bahwa kedua kelas baru ini adalah ‘anak kembar’ yang dilahirkan oleh zaman feodalisme. Borjuasi dan proletariat merupakan kelas

191. *Ibid*, 398

yang saling berhubungan sebagai segi-segi kontradiksi, sekaligus di sisi lain saling bertentangan.

Perkembangan kelas borjuasi dan proletariat Tiongkok tidak berjalan dan berkembang pesat seperti yang terjadi di negeri-negeri imperialis Eropa dan Amerika. Perkembangan kapitalisme dalam negeri Tiongkok justru ditekan oleh kepentingan imperialis yang bersekongkol dengan feodalisme. Tujuan utama dari agresi imperialisme di Tiongkok adalah menjadikan Tiongkok sebagai wilayah jajahannya secara langsung maupun tidak. Imperialisme membangun industri-industri modern secara langsung di Tiongkok. Pabrik-pabrik didirikan dengan bekerja sama dengan kelas feodal dan birokrat. Borjuasi dalam negeri hanya diberikan kebebasan dalam mengembangkan perusahaannya pada batas-batas tertentu. Borjuasi nasional ditekan untuk terus ketergantungan baik dalam modal maupun pemenuhan kebutuhan industrinya pada imperialis. Hal ini menyebabkan mayoritas borjuasi nasional dan proletariat Tiongkok mengalami kemandekan dalam perkembangannya. Borjuasi nasional Tiongkok kemudian bertransformasi menjadi borjuasi komprador yang selalu bertalian dan bekerjasama dengan imperialis.

Perkembangan kekuasaan negara-negara imperialis di Tiongkok menggunakan pola agresinya secara ekonomi, politik, militer hingga kebudayaan. Pertama kali imperialis datang ke Tiongkok adalah dengan cara agresi dan perang. Negara-negara imperialis berkali-kali melancarkan perang, misalnya Perang Candu pada 1840 oleh Inggris, perang tahun 1857 oleh gabungan tentara Inggris dan Perancis, Perang Tiongkok-Perancis 1884, Perang Tiongkok-Jepang 1894,

dan perang tahun 1900 oleh tentara gabungan delapan negara imperialis. Rentetan peperangan inilah yang membukakan jalan bagi imperialis yang unggul dalam segala aspek kemiliteran untuk mengalahkan kerajaan besar Tiongkok. Mao menilai bahwa setelah mengalahkan dan menundukan Tiongkok melalui agresi militernya, imperialis terus melakukan penghisapan dan penindasan secara ekonomi, politik dan kebudayaan.

Negara-negara imperialis memaksa Tiongkok menandatangani banyak perjanjian, memperoleh hak untuk menduduki dan membagi wilayah-wilayah Tiongkok. Berbagai pelabuhan strategis dikuasai sepenuhnya oleh imperialis, sehingga kontrol distribusi dan jalur perdagangan dimonopoli oleh negara-negara imperialis. Secara langsung imperialis juga menjadikan Tiongkok sebagai wilayah pembangunan industri ringan hingga berat. Hal ini ditujukan untuk menggunakan secara langsung bahan mentah dan tenaga kerja yang murah. Dalam aspek ini, monopoli industri yang dilakukan menyebabkan perkembangan industri nasional Tiongkok mengalami Stagnasi. Stagnasi perkembangan industri nasional Tiongkok menyebabkan terganggunya aspek perekonomiannya. Hal ini diperparah dengan pola monopoli perbankan dan sirkulasi modal.

Imperialisme membuka bank-bank baru di Tiongkok dan memberikan pinjaman berupa hutang luar negeri kepada pemerintah maupun borjuasi komprador. Hal inilah yang mengikat pemerintah maupun borjuasi Tiongkok pada kepentingan dari imperialis. Dengan melakukan penindasan yang demikian imperialis terus melahirkan banyak golongan-golongan kompradornya di Tiongkok. Dalam hal ini, Mao berpandangan bahwa dengan skema yang

demikian itulah penghisapan dan penindasan yang dialami oleh rakyat Tiongkok menjadi berlipat ganda. Mao memandang bahwa peranan aktif untuk menindas rakyat juga dilakukan oleh tuan-tuan tanah, borjuasi besar, dan pemerintah dalam negeri demi kepentingannya masing-masing dan menjaga kepentingan imperialisme. Tidak sampai di aspek ekonomi saja, Mao juga menganggap bahwa untuk terus menjaga dominasinya, imperialisme bersama dengan kelas dan golongan pendukungnya juga menggunakan kebudayaan.

Kebudayaan merupakan aspek yang mampu untuk meracuni dan membangun pola berpikir masyarakat. Dalam hal ini, imperialisme tidak sama sekali diam, mereka menggunakan reduksi-reduksi ajaran agama, pembukaan sekolah dan perguruan tinggi untuk menyebarkan ilmu pengetahuan yang melegitimasi, hingga penerbitan media-media propagandanya. Tujuan utama dari hal tersebut adalah membentuk pola kebudayaan baru yang berkarakter imperialis dan melahirkan intelektual yang siap menjaga kepentingannya. Hal inilah yang dimaksud oleh Mao sebagai alat untuk memperdaya rakyat Tiongkok secara luas.

Kehadiran imperialisme yang melakukan agresi secara ekonomi, politik, militer dan budaya di Tiongkok, menjadikan Tiongkok sebagai negeri setengah jajahan setengah feodal. Kekuasaan ekonomi beralih dari tangan tuan tanah secara monopoli ke tangan imperialisme, borjuasi besar dalam negeri, tuan tanah besar dan negara. Negara-negara imperialis, khususnya Jepang melakukan monopoli segala sektor ekonomi Tiongkok. Di ranah politik, kekuasaan kaisar yang mutlak telah dihancurkan. Kekuasaan politik beralih pada kediktatoran

bersama dari tuan tanah besar, borjuasi besar komprador, dan kapitalis birokrat yang semuanya adalah perpanjangan tangan dari imperialisme. Dengan demikian Tiongkok secara mutlak berubah dari negara feodal menjadi negara setengah jajahan setengah feodal.

Tiongkok yang setengah jajahan setengah feodal terutama sekali karena kekuatan imperialisme, khususnya Jepang berkolaborasi dengan feodalisme Tiongkok yang diwakili oleh tuan tanah besar. Hal ini melahirkan kontradiksi dalam masyarakat Tiongkok. Dalam hal ini, Mao memandang bahwa kontradiksi utama atau pokok di dalamnya adalah kontradiksi antara imperialisme dan feodalisme dengan rakyat tertindas di Tiongkok. Selain hal itu, misalnya kontradiksi antara borjuasi dengan proletariat, antara sesama tuan tanah maupun sesama borjuasi besar adalah kontradiksi yang non pokok. Kontradiksi pokok tersebut menjadi terus meruncing dan menjadikan syarat utama lahirnya gerakan revolusioner. Revolusi Tiongkok akan lahir di atas dasar kontradiksi pokok tersebut.

Lahirnya gerakan revolusioner tentunya tidak dapat terlepas dari kondisi internal suatu negara. Dalam hal ini, Tiongkok yang memiliki corak setengah jajahan setengah feodal juga memiliki karakter revolusinya sendiri. Dalam memandang revolusi, Mao menjelaskan pentingnya untuk menjawab beberapa pertanyaan untuk menjelaskan mengenai revolusi Tiongkok. Beberapa pertanyaannya adalah siapakah yang menjadi sasaran revolusi? Apakah tugas-tugas Revolusi Tiongkok? Siapa saja yang menjadi tenaga penggerak revolusi?

Bagaimana watak revolusi Tiongkok? Dan apa perspektif dari revolusi Tiongkok?.

Sasaran dari sebuah gerakan revolusioner adalah hal yang penting untuk menentukan karakter dari sebuah revolusi. Dalam menentukan sasaran revolusi, pertama kali harus tepat dalam meletakkan analisis masyarakatnya. Karakter masyarakat Tiongkok yang setengah jajahan setengah feodal menjadikan revolusi di Tiongkok memiliki karakternya sendiri.

Sistem sosial masyarakat Tiongkok yang setengah jajahan setengah feodal memposisikan imperialisme dan feodalisme sebagai aktor utama yang melakukan penghisapan dan penindasan terhadap rakyat. Dalam hal ini, Mao menyatakan bahwa imperialisme dan feodalisme yang berisikan borjuasi-borjuasi dari negeri imperialis dan tuan-tuan tanah dalam negeri adalah kekuatan pokok yang menekan dan merintangi perkembangan masyarakat Tiongkok.¹⁹² Keduanya berkolaborasi untuk menindas rakyat Tiongkok. Dalam menjalankan kerja penghisapan dan penindasannya, imperialisme dan feodalisme di Tiongkok juga melahirkan golongan-golongan komprador yang dipimpin oleh pemerintahan dalam negeri yang disebut oleh Mao sebagai kaum reaksioner.

Perkembangan penindasan yang terjadi di Tiongkok beralih drastis pasca meletusnya Perang Dunia I. Perang Dunia I membuat negeri-negeri imperialis khususnya Eropa dan Amerika disibukan oleh konstelasi peperangan. Hal ini dimanfaatkan oleh imperialis Jepang untuk memperluas kekuasaanya di Tiongkok. Jalan yang ditempuh oleh Jepang adalah dengan cara melakukan

192. *Ibid*, 405

agresi besar-besaran. Tujuan utama dari agresi Jepang adalah untuk menjadikan Tiongkok sebagai negeri yang murni terjajah. Dalam hal ini, Mao menegaskan bahwa dengan bergesernya penguasaan negeri-negeri imperialis di Tiongkok pada kekuatan utama imperialis Jepang, maka imperialis Jepang adalah musuh utama rakyat Tiongkok. Oleh karenanya imperialisme Jepang bersama feodalisme Tiongkok merupakan sasaran utama dari perjuangan revolusioner rakyat Tiongkok.

Kontradiksi pokok rakyat Tiongkok antara kekuatan revolusioner dengan imperialisme dan feodalisme bersama kaum reaksionernya harus diselesaikan dengan perjuangan yang panjang. Kekuatan imperialisme Jepang berhasil menggalang begitu banyak tuan tanah dan borjuasi besar komprador Tiongkok untuk bersekutu. Penggalangan kekuatan ini sesungguhnya adalah bentuk penaklukan yang dilakukan oleh imperialisme Jepang. Oleh karenanya, hal ini menunjukkan bahwa musuh dari kekuatan revolusioner sangatlah besar.

Besarnya kekuatan kontra revolusioner yang dipimpin oleh imperialisme Jepang mengharuskan rakyat Tiongkok sadar untuk terus mengorganisasikan kekuatannya. Dalam hal ini, Mao memandang:

“... yang menjadi musuh revolusi Tiongkok bukan saja imperialisme yang kuat, tetapi juga kekuatan feodal yang besar, dan pada masa-masa tertentu termasuk juga kaum reaksioner borjuis yang bersekongkol dengan imperialisme dan kekuatan feodal untuk memusuhi rakyat. oleh karena itu, meremehkan kekuatan dari musuh rakyat revolusioner Tiongkok adalah pandangan yang tidak tepat.”¹⁹³

Dalam hal ini, Mao menegaskan bahwa unsur meremehkan kekuatan musuh yang nyatanya besar adalah pandangan yang keliru. Mao memandang bahwa

193. *Ibid*, 406

perjuangan revolusi Tiongkok akan berjangka waktu panjang. Kekuatan revolusioner untuk menghancurkan sasaran revolusi Tiongkok harus dididik dan ditempa dengan keras dan ulet. Di sinilah peran penting Partai Komunis Tiongkok dalam memimpin perjuangan revolusioner.

Partai Komunis Tiongkok adalah organisasi yang mempunyai tugas untuk memimpin kerja-kerja revolusioner Tiongkok agar tetap pada garis ideologi Marxisme-Leninisme. Partai Komunis Tiongkok berperan untuk mengarahkan seluruh elemen revolusioner di bawah kepemimpinan politik kelas proletariat. Dalam hal ini salah satu peran pentingnya adalah memastikan apa saja yang menjadi tugas-tugas pokok revolusi Tiongkok.

Tugas utama revolusi Tiongkok sebagai negeri setengah jajahan setengah feodal haruslah disandarkan pada sasaran utama dari revolusi. Dalam hal ini, dapat ditekankan bahwa tugas utama dari revolusi Tiongkok adalah menghancurkan dominasi imperialisme dan feodalisme sampai ke akar-akarnya. Penghancuran imperialisme artinya melakukan revolusi nasional, sementara penghancuran feodalisme adalah dengan melancarkan revolusi demokratis. Kedua tugas besar ini berhubungan satu dengan yang lainnya.

Imperialisme merupakan penyokong utama dari tetap bertahannya kekuasaan tuan tanah di Tiongkok. Dalam hal ini, Mao memandang bahwa tidaklah mungkin melenyapkan tuan tanah besar dan sistem feodalisme tanpa menghancurkan imperialisme. Hal tersebut juga berlaku sebaliknya bagi keharusan revolusi untuk menghancurkan feodalisme. Keberadaan tuan tanah besar adalah basis sosial utama Tiongkok sebagai negeri setengah feodal. Oleh

karenanya, kekuasaan dari imperialisme sebagai aspek utama yang membuat Tiongkok menjadi negeri setengah jajahan adalah kekuasaan feodal. Jadi, tanpa menghancurkan basis sosial feodalisme, akan mustahil pula revolusi Tiongkok mampu menghancurkan imperialisme. Dalam memandang tentang tugas utama revolusi Tiongkok, secara spesifik Mao menjelaskan sebagai berikut:

“Tugas revolusi nasional Tiongkok dewasa ini terutama yaitu melawan imperialisme Jepang yang telah mengagresi wilayah Tiongkok; di samping itu tugas revolusi demokratis juga perlu diselesaikan untuk merebut kemenangan peperangan, maka dengan demikian kedua tugas revolusi itu sudah berjaln menjadi satu.”¹⁹⁴

Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran Mao tentang tugas-tugas pokok revolusi Tiongkok sangat disesuaikan dengan perkembangan kondisi sosial dan politik masyarakat Tiongkok. Kedua tugas tersebut adalah satu kesatuan perjuangan revolusioner rakyat Tiongkok.

Revolusi Tiongkok adalah revolusi yang bercirikan masyarakat setengah jajahan setengah feodal. Dalam hal ini, arah dari revolusi Tiongkok adalah menghancurkan sasaran utama revolusi yaitu imperialisme, khususnya Jepang dan feodalisme. Dalam upaya mewujudkan kemenangan revolusi Tiongkok yang demikian, Mao menyatakan pentingnya mengetahui tentang tenaga utama penggerak revolusi Tiongkok. Penentuan tenaga utama penggerak revolusi Tiongkok adalah dengan melihat asal kelasnya.

Tiongkok yang setengah jajahan setengah feodal tentunya memiliki banyak sekali kelas dalam masyarakatnya. Hal ini sesuai dengan pemikiran Mao yang menyatakan bahwa karena kolaborasi yang dilakukan oleh imperialisme dan

194. *Ibid*, 409

feodalisme dalam menindas rakyat, maka dari sanalah terlahir berbagai kelas dan golongan-golongan dalam masyarakat Tiongkok. Dalam konteks ini, tidak semua kelas dalam masyarakat Tiongkok yang mampu menjadi tenaga utama penggerak revolusi.

Kelas tuan tanah besar dan borjuasi besar adalah dua kelas yang bukan dan tidak akan pernah menjadi tenaga penggerak revolusi Tiongkok. Kedua kelas tersebut justru adalah sasaran utama selain dari imperialisme dalam gerakan revolusioner Tiongkok. Hal ini terjadi karena watak dari kedua kelas tersebut yang komprador, atau bergantung dari sokongan imperialisme. Selain itu, kelas tuan tanah besar dan borjuasi besar Tiongkok adalah kelas yang memimpin dan menguasai pemerintahan Tiongkok untuk melegitimasi penghisapan dan penindasan terhadap rakyat. Dalam menyikapi keberadaan tuan tanah besar Mao menyatakan analisisnya sebagai berikut:

“Kelas tuan tanah adalah dasar sosial yang utama bagi kekuasaan imperialisme di Tiongkok, adalah kelas yang menghisap dan menindas kaum tani dengan menggunakan sistem feodal, dan adalah kelas yang menghalangi kemajuan masyarakat Tiongkok di lapangan politik, ekonomi, dan kebudayaan, dan sedikitpun tidak memainkan peranan yang progresif. Karena itu kelas tuan tanah adalah sasaran revolusi, dan bukan tenaga penggerak revolusi.”¹⁹⁵

Sementara untuk kelas borjuasi besar Tiongkok, Mao menyatakan sebagai berikut:

“Politik kita terhadap golongan kapitulator borjuasi besar ialah menganggap mereka sebagai musuh dan dengan tegas menggempur mereka. Melakukan perjuangan yang tegas terhadap mereka, sebab mereka menjalankan politik tangan besi anti Komunis dan anti rakyat yang mensabot perang perlawanan dan merusak persatuan”¹⁹⁶

195. *Ibid*, 411

196. *Ibid*, 412

Dengan demikian jelas sudah bahwa kedua kelas tersebut, yaitu tuan tanah besar dan borjuasi besar yang pasti berwatak komprador adalah sama sekali bukan tenaga penggerak revolusi Tiongkok.

Dalam kelas borjuasi Tiongkok terdapat pula golongan borjuasi sedang atau borjuasi nasional dan borjuasi kecil. Borjuasi nasional pada umumnya memiliki watak ganda, satu sisi mereka ditindas oleh skema dari imperialisme dan dikekang perkembangannya oleh feodalisme, di sisi inilah mereka menurut Mao dapat dikatakan salah satu kekuatan revolusi. Hal ini dibuktikan Mao melalui sejarah perlawanan borjuasi nasional terhadap negeri-negeri imperialis dan kaisar-kaisar besar Tiongkok.

Di sisi yang lain, borjuasi nasional memiliki kelemahan dalam ekonomi dan politik karena belum benar-benar terputus hubungannya dengan imperialisme. Dalam hal ini, borjuasi nasional tidak berani mengambil keputusan terbuka untuk melawan imperialisme dan feodalisme secara konsekuen. Oleh karena berwatak ganda tersebut Mao menekankan bahwa pentingnya untuk menerapkan politik yang hati-hati terhadap borjuasi nasional. Watak ganda borjuasi nasional berbeda dengan watak yang dimiliki oleh borjuasi kecil Tiongkok.

Dalam menganalisis kelas borjuasi kecil Tiongkok, Mao membagi borjuasi kecil sebagai borjuasi kecil di luar kaum tani. Hal ini dikarenakan kaum tani adalah bagian dari kelas borjuasi kecil yang mengalami ketertindasan terparah dalam sistem setengah jajahan setengah feodal. Dalam lingkup ini, kelas borjuasi kecil di luar kaum tani meliputi kaum intelektual, pedagang kecil, tukang

kerajinan tangan, dan pekerja merdeka yang luas.¹⁹⁷ Menurut Mao, seluruh golongan borjuasi kecil tersebut kedudukannya agak mirip dengan tani sedang dari kaum tani.¹⁹⁸ Mereka menderita penindasan yang dilakukan oleh imperialisme, feodalisme, dan borjuasi besar komprador.

Dalam kondisi Tiongkok yang dikuasai oleh imperialisme dan feodalisme, borjuasi kecil dari golongan pedagang kecil, tukang kerajinan tangan, dan pekerja merdeka sangat dekat dengan ancaman kebangkrutan usahanya. Hal ini karena imperialisme dan feodalisme melakukan skema monopoli dalam seluruh aspek usaha di Tiongkok. Sementara dalam golongan kaum intelektual dan pelajar Tiongkok, mereka terancam tidak dapat mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak dan ancaman putus sekolah yang tinggi.

Dalam revolusi Tiongkok, keberpihakan dari borjuasi kecil di luar kaum tani ini sangat penting. Dalam menyokong revolusi, borjuasi kecil ini juga memiliki kekurangan, yaitu mudah dihasut dan terjebak pengaruh dari politik dan kebudayaan dari imperialisme dan feodalisme. Dalam hal ini Mao memandang:

“Berbagai elemen borjuasi kecil tersebut merupakan massa yang besar jumlahnya. Mereka umumnya bisa ikut serta dalam revolusi atau menyokong revolusi dan merupakan sekutu revolusi yang sangat baik, maka itu harus ditarik ke pihak kita dan dilindungi. Kekurangan mereka ialah bahwa sebagian dari mereka mudah dipengaruhi oleh borjuasi, karena itu kita harus melakukan pekerjaan propaganda dan kerja organisasi revolusioner dikalangan mereka dengan penuh perhatian.”¹⁹⁹

Dengan demikian, jelas bahwa borjuasi kecil diluar kaum tani adalah tenaga penggerak revolusi Tiongkok, namun bukan merupakan tenaga pokok dalam revolusi.

197. *Ibid*, 413

198. *Ibid*, 414

199. *Ibid*, 415

Kedudukan Tiongkok sebagai negeri setengah jajahan setengah feodal telah melahirkan berbagai skema penindasan terhadap rakyat. Salah satu dampak besarnya adalah terjadinya fenomena pengangguran massal yang terjadi di pedesaan maupun perkotaan Tiongkok. Dalam hal ini, fenomena pengangguran massal ini menyebabkan lahirnya golongan yang dinamakan oleh Mao sebagai kaum gelandangan. Kaum gelandangan adalah golongan yang dipaksa oleh kondisi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak layak, seperti perampok, pengemis, pelacur, dan yang lainnya. Kaum gelandangan ini merupakan kelompok yang bimbang untuk terlibat dalam revolusi. Mereka kerap dimobilisasi oleh kekuatan kontra revolusioner untuk ‘memukul’ perjuangan rakyat. Dalam hal ini, Mao menegaskan bahwa pentingnya untuk memberi perhatian lebih dalam menarik kaum gelandangan ke barisan revolusi. Partai Komunis Tiongkok harus mampu mendidik secara perlahan untuk menghilangkan watak merusaknya tersebut. Dengan demikian, kaum gelandangan dapat dimasukkan dalam tenaga penggerak revolusi, namun tetap bukan merupakan kekuatan pokok.

Tenaga utama penggerak revolusi Tiongkok adalah kaum tani dan proletariat Tiongkok. Dalam hal ini, Mao berpandangan bahwa dengan jumlah sekitar 80% dari jumlah penduduk Tiongkok dan merupakan kekuatan utama dalam perekonomian nasional Tiongkok, maka kaum tani menempati posisi teramat penting dalam revolusi. Dalam persoalan kedudukan kaum tani dalam revolusi, Mao tetap melakukan klasifikasi dengan spesifik. Mao membagi kaum tani menjadi tiga golongan utama yaitu tani kaya, tani sedang dan tani miskin.

Ketiganya merupakan tenaga dalam revolusi Tiongkok, namun ketiganya memiliki kadar revolusioner yang berbeda.

Tani kaya merupakan golongan kaum tani dengan jumlah yang kecil, menurut Mao jumlahnya hanya sekitar 5% di setiap desa.²⁰⁰ Tani kaya adalah golongan dalam kaum tani yang menjalankan penindasan setengah feodal di pedesaan. Artinya, tani kaya adalah aktor utama setelah tuan tanah besar yang melakukan penghisapan dan penindasan kepada buruh tani maupun tani miskin. Cara-cara penghisapan dan penindasannya terutama dengan menyewakan sebagian tanahnya dan meminjamkan uang dengan bung yang tinggi. Dalam hal ini, tani kaya tidak begitu saja dapat disamakan dengan tuan tanah. Pada praktiknya, tani kaya tetap ambil bagian dalam kerja produksi pertaniannya, maka mereka tetap masuk dalam kelompok kaum tani. Menurut Mao, tani kaya bisa ambil bagian tertentu dalam perjuangan revolusi, khususnya dalam melawan imperialisme dan tuan tanah besar yang selama ini mengganggu perkembangannya.

Golongan selanjutnya dalam kaum tani Tiongkok menurut pemikiran Mao adalah golongan tani sedang. Tani sedang adalah kaum tani yang jumlahnya sebanyak 20%.²⁰¹ Golongan tani sedang pada umumnya tidak melakukan praktik penghisapan. Dalam aspek ekonomi, tani sedang cenderung mampu memenuhi kebutuhannya. Golongan tani sedang hanya bergantung sepenuhnya pada tanah yang mereka miliki, jika hasil panennya baik, maka mereka memiliki sedikit modal untuk ditabung ataupun digunakan untuk usaha lainnya. Secara aspek

200. *Ibid*, 416

201. *Ibid*, 416

politik, tani sedang tidak mempunyai hak-hak politik yang memadai untuk mewakili golongannya. Dalam sistem produksi setengah jajahan setengah foedal, tani sedang juga tertekan dan tertindas oleh keberadaan dari imperialisme, tuan tanah besar, dan borjuasi besar. Dengan demikian, menurut Mao bahwa tani sedang bukan saja golongan yang berkepentingan dalam melawan imperialisme melalui revolusi, tetapi juga mampu menerima pembangunan sosialisme di Tiongkok.²⁰²

Golongan ketiga adalah tani miskin Tiongkok yang merupakan golongan dengan jumlah 70% dari seluruh penduduk di pedesaan. Tani miskin adalah kaum tani yang tidak memiliki cukup tanah sebagai sandaran hidupnya. Ketiadaan tanah ini terutama disebabkan oleh perampasan dan monopoli tanah yang dilakukan oleh imperialisme, tuan tanah besar, borjuasi besar dan negara. Dalam aspek inilah golongan tani miskin sesungguhnya adalah golongan kaum tani yang memiliki kepentingan utama dalam perjuangan revolusioner. Dalam hal ini Mao menjelaskan tentang golongan tani miskin sebagai berikut:

“Tani miskin adalah massa luas tani yang tidak memiliki tanah atau tidak cukup tanahnya, yaitu semi proletariat di desa, adalah tenaga penggerak yang paling luas dari revolusi Tiongkok, adalah juga sekutu proletariat yang wajar dan paling dapat dipercaya, dan adalah induk kekuatan barisan revolusioner Tiongkok.”²⁰³

Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya kekuatan utama dalam barisan revolusioner Tiongkok adalah kaum tani, khususnya tani miskin. Hal ini berkaitan terutama dengan penghancuran sistem setengah feodal di pedesaan Tiongkok yang merupakan topan utama dari imperialisme. Mao juga

202. *Ibid*, 416

203. *Ibid*, 417

menekankan bahwa kedudukan tani miskin dalam revolusi adalah sekutu terdekat dari kelas proletariat Tiongkok.

Kelas yang akan memimpin revolusi Tiongkok adalah kelas proletariat. Kelas proletariat adalah kelas yang tidak memiliki alat produksi perorangan. Kedudukan inilah yang menjadikan proletariat Tiongkok harus menjual tenaga kerjanya pada perusahaan milik imperialisme dan borjuasi besar dalam negeri. Dalam masyarakat Tiongkok, Mao membagi kelas proletariat terdiri dari buruh industri modern berkisar 3.000.000 orang, pekerja upahan industri kecil dan kerajinan tangan di perkotaan, serta pegawai toko berkisar 12.000.000 orang, di samping itu juga terdapat proletariat desa atau buruh tani yang sangat besar jumlahnya.²⁰⁴ Dalam hal ini, kepemimpinan kelas proletariat terutama sekali karena proletariat adalah kelas yang bersentuhan langsung dengan perkembangan ekonomi termaju di Tiongkok, yaitu kapitalisme. Proletariat adalah kelas yang berhadapan langsung secara antagonistik dengan borjuasi dan imperialisme. Hal-hal tersebutlah yang membuat kelas proletariat memiliki kesadaran yang tinggi untuk berorganisasi dan berjuang. Hal ini adalah kekuatan umum dari proletariat seluruh dunia.

Dalam pemikiran Mao, selain dari kekuatan umum kelas proletariat, juga terdapat kekuatan spesifik kelas proletariat Tiongkok sebagai kelas yang akan memimpin gerakan revolusioner. Mao menyebutkan terdapat 3 (tiga) aspek yang menjadi kekuatan spesifik kelas proletariat Tiongkok.²⁰⁵ *Pertama*, karena proletariat Tiongkok adalah satu-satunya kelas yang mengalami tiga macam

204. *Ibid*, 417

205. *Ibid*, 418

penindasan yaitu dari imperialisme, penindasan dari kelas borjuasi besar Tiongkok, maupun dari feodalisme. Maka Mao memandang atas dasar itulah proletariat adalah kelas yang paling tegas dan konsekuen dalam perjuangan revolusioner. *Kedua*, proletariat Tiongkok sejak awal muncul dalam perjuangan revolusioner telah berada di bawah kepemimpinan partai revolusioner, yaitu Partai Komunis Tiongkok. Dalam hal ini, kelas proletariat menjadi kelas yang relatif paling sadar atas ketertindasannya dan tujuan perjuangannya dalam masyarakat Tiongkok. *Ketiga*, proletariat Tiongkok mayoritas berasal dari kaum tani yang teramat miskin dan bangkrut. Dalam hal ini, asal kelas semuanya menjadikan proletariat Tiongkok memiliki keterkaitan yang erat dengan kaum tani sebagai mayoritas dalam masyarakat dan kekuatan pokok dalam revolusi. Hal ini menjadikan akan lebih mudah dalam menggalang persatuan yang erat antara proletariat dengan kaum tani Tiongkok.

Dengan melihat seluruh aspek tersebut, jelaslah bahwa Mao dengan tepat dan konsekuen tidak keluar dari jalur Marxisme-Leninisme. Mao tetap menempatkan proletariat sebagai kelas pemimpin dalam gerakan revolusioner. Mao justru menerapkan hukum filsafat Materialisme Dialektika dengan baik dengan menyesuaikan gagasan revolusinya dengan kondisi sosial masyarakat Tiongkok. Mao menunjukan kejernihan dalam menempatkan tenaga penggerak revolusi sesuai dengan musuh atau sasaran revolusinya. Dengan demikian maka akan menentukan watak dari revolusi yang digagas oleh Mao.

Watak dari sebuah revolusi adalah tindak lanjut dari aspek-aspek khusus mengenai kondisi lahirnya gerakan revolusioner. Kondisi khusus tersebut

seperti yang telah dibahas sebelumnya, yaitu karakter masyarakat Tiongkok, sasaran revolusi Tiongkok, tugas pokok dalam revolusi, hingga tenaga penggerak gerakan revolusioner Tiongkok. Mengacu pada hal itu semua, Mao menyatakan dalam pemikirannya bahwa revolusi Tiongkok pada tahap setengah jajahan setengah feodal bukanlah Revolusi Sosialis, melainkan revolusi borjuis-demokratik. Watak revolusi borjuis-demokratik ini menurut Mao tidak hanya berlaku bagi Tiongkok, namun bagi seluruh negeri yang memiliki karakter setengah jajahan setengah feodal. Dalam hal ini, Mao menekankan bahwa watak revolusi Tiongkok yang borjuis-demokratik tidaklah sama dengan revolusi borjuis demokratik di Eropa dan Amerika saat menumbangkan feodalisme. Dalam aspek ini, Mao dalam pemikirannya menjelaskan perbedaan antara revolusi borjuis-demokratik yang digagasnya dengan revolusi yang terjadi terdahulu di Eropa dan Amerika sebagai berikut:

”Revolusi borjuis-demokratik Tiongkok sekarang ini bukan lagi revolusi borjuis-demokratik tipe lama yang umum, yang sudah usang itu, melainkan revolusi borjuis-demokratik tipe baru yang khusus. Revolusi semacam ini sedang berkembang di Tiongkok dan juga di semua negeri jajahan dan setengah jajahan, dan kita menyebutnya Revolusi Demokrasi Baru.”²⁰⁶

Dengan demikian, jelas bahwa revolusi dalam masyarakat setengah jajahan setengah feodal seperti Tiongkok adalah Revolusi Demokrasi Baru. Mao juga menekankan bahwa sesungguhnya Revolusi Demokrasi Baru sangat bertalian erat dan merupakan bagian dari Revolusi Sosialis.

206. *Ibid*, 421

Revolusi Demokrasi Baru merupakan revolusi yang digerakan oleh seluruh sektor rakyat untuk melawan imperialisme dan feodalisme. Revolusi dengan karakter demikian adalah pintu gerbang bagi tindak lanjutnya Revolusi Sosialis. Dalam hal ini, pemikiran Mao menekankan bahwa hanya melalui jalan Revolusi Demokrasi Baru menuju Revolusi Sosialislah jalan satu-satunya negeri Tiongkok yang setengah jajahan setengah feodal dapat merdeka.

6.1.2 Dua Tahap Revolusi Tiongkok: Dari Revolusi Demokrasi Baru Menuju Revolusi Sosialis

Revolusi Demokrasi Baru di Tiongkok merupakan jalan keluar bagi negeri Tiongkok yang setengah jajahan setengah feodal. Hal ini menjadi kunci utama bagi terwujudnya masyarakat yang merdeka dan terbebas dari belenggu imperialisme dan feodalisme. Dalam hal ini, Mao memandang bahwa revolusi yang dijalankan oleh seluruh rakyat tertindas Tiongkok tidaklah akan berhenti sampai tahap demokrasi baru, namun akan menuju sosialisme. Hal inilah yang dikatakan oleh Mao sebagai perspektif dari revolusi Tiongkok.

Revolusi Demokrasi Baru Tiongkok adalah bentuk yang sama sekali lain dari revolusi borjuis-demokratik tipe lama. Perbedaan utamanya adalah jelas dari mulai sasaran revolusi, hingga tenaga penggerak utama dan hari depan revolusinya. Revolusi borjuis-demokratik tipe lama adalah alat dari kelas borjuis untuk melahirkan diktator dan pemerintahan borjuis. Dalam aspek ini, Mao menjelaskan perspektif dari revolusi Tiongkok:

“Oleh karena revolusi borjuis-demokratik Tiongkok pada tingkat sekarang bukanlah revolusi borjuis-demokratik tipe lama yang umum,

melainkan revolusi borjuis-demokratik tipe baru yang khusus, yaitu Revolusi Demokrasi Baru, dan oleh karena revolusi Tiongkok berlangsung dalam keadaan internasional yang baru pada tahun tigapuluhan dan empatpuluhan abad ke-20, yaitu dalam keadaan internasional di mana sosialisme menanjak dan kapitalisme merosot, dan dalam zaman Perang Dunia kedua dan zaman revolusi, maka juga tidak usah diragukan lagi bahwa perspektif terakhir revolusi Tiongkok bukanlah kapitalisme, melainkan sosialisme dan komunisme.”²⁰⁷

Dalam hal ini, penekanan utama dalam pemikiran Mao tentang perspektif revolusi Tiongkok adalah bahwa revolusi Tiongkok memiliki ciri yang khas sebagai negeri setengah jajahan setengah feodal. Mao tidak memungkiri bahwa revolusi Tiongkok pada tahapan yang pertama baru berupa revolusi demokratis yang baru. Revolusi yang tidak sepenuhnya menghancurkan dan melikuidasi sistem kapitalisme di Tiongkok. Dalam pemikirannya, Mao memandang bahwa untuk menghancurkan sepenuhnya kapitalisme, Tiongkok terutama sekali harus melewati tahap Revolusi Demokrasi Baru.

Pemikiran Mao tentang revolusi dua tahap merupakan buah pikiran dialektis dari kondisi masyarakat Tiongkok yang setengah jajahan setengah feodal. Dalam menyusun pemikirannya tersebut, Mao tetap tidak meninggalkan landasan ideologinya yaitu Marxisme-Leninisme. Dalam mengaplikasikan suatu teori yang revolusioner, Mao kemudian menyusun bagaimana seharusnya teori tersebut dapat dioperasikan dengan baik agar mencapai tujuannya. Dalam hal ini, lahirlah kemudia pemikirannya mengenai pokok-pokok dalam Revolusi Demokrasi Baru.

207. *Ibid*, 424

Pokok-pokok dalam Revolusi Demokrasi Baru adalah apa yang dianggap oleh Mao sebagai instrumen utama untuk meraih kemenangan dalam revolusi. Revolusi Demokrasi Baru bukanlah sebuah revolusi yang akan dimenangkan oleh gerakan revolusioner begitu saja. Gerakan revolusioner tidak hanya membutuhkan kondisi yang semakin meruncing atar segi-segi kontradiksi pokok, tidak juga hanya sebatas pemberontakan yang sporadis, atau juga bukan sebuah gerakan yang hanya meniru yang sudah pernah terjadi. Jika hanya hal-hal tersebut yang berjalan, maka menurut Mao sudah dipastikan bahwa rakyat Tiongkok tidak akan mencapai kemenangannya. Berangkat dari kondisi tersebutlah Mao kemudian menyusun beberapa hal pokok dalam revolusi dua tahap, khususnya Revolusi Demokrasi Baru. Beberapa hal pokoknya adalah, kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok dalam gerakan revolusioner, selanjutnya adalah bentuk nyata dari perjuangan revolusioner berupa perang tahan lama yang dilakukan oleh gerakan revolusioner untuk melawan golongan kontra revolusioner, kemudian adalah dibentuknya front persatuan sebagai ruang konsolidasi besar kelas-kelas tertindas di Tiongkok melawan imperialisme dan feodalisme.

Kemenangan revolusi Oktober di Rusia pada tahun 1917 membawa gelombang pasang perjuangan kemerdekaan dan pembebasan yang revolusioner ke seluruh penjuru dunia, termasuk Tiongkok. Gema kemenangan tersebut tidak hanya sebatas kemenangan menumbangkan suatu rejim, namun kemenangan gerakan proletariat. Berkat kemenangan tersebut, untuk pertama kalinya berdiri pula negara sosialis pertama di dunia. Negara sosialis yang berhasil membuktikan

kebenaran teori Marxisme yang revolusioner. Hal-hal inilah yang tidak luput dari perhatian para intelektual di Tiongkok.

Pada saat meletusnya kemenangan revolusi Oktober di Rusia, para intelektual di Tiongkok sedang merasakan puncak ketidakpuasannya pada kondisi negerinya yang setengah jajahan setengah feodal.²⁰⁸ Selain itu, keberadaan Partai Nasionalis Tiongkok pimpinan Dr. Sun dianggap hanya mampu menghancurkan secara relatif dominasi dari imperialisme. Hal ini dinilai karena pada prinsipnya Partai Nasionalis Tiongkok adalah partai yang mewakili dan membawa kepentingan nasional dari borjuasi Tiongkok. Dengan demikian, Partai Nasionalis Tiongkok dianggap tidak mampu melakukan revolusi pasca pembentukan Republik Tiongkok pada tahun 1911.

Berangkat dari kondisi tersebut, Lenin yang mewakili Komunis Internasional (Komintern) mencoba untuk mendekati pemerintahan konservatif Tiongkok maupun dengan Dr. Sun. Pada tahun 1920, Komintern mengutus Grigory Voitinsky untuk membangun kontak dengan intelektual radikal di Tiongkok. Alhasil kontak awal yang didapatkan oleh Voitinsky adalah Li Ta-Chao dan Chen Tu-Shiu. Tujuan utama dari utusan Komintern tersebut adalah untuk menyebarkan Marxisme melalui pembentukan “Grup Belajar Marxisme”.²⁰⁹ Tujuan tersebut menuai hasil positif dengan terbentuknya Grup tersebut di Shanghai, dengan cabang di beberapa Provinsi seperti, Peking, Hunan, Hupei, Chechiang, Anhui, Shantung, dan Kwangtung.

208. Imam Soedjono, *Rakyat dan Senjata: Perang Rakyat di Beberapa Negeri Asia*, (Yogyakarta: Resist Book, 2011), 12.

209. *Ibid*, 13.

Pada tahun 1920 pula Komintern mengadakan Kongres Internasionalnya yang ke -2 (dua). Kongres yang dilaksanakan di Moskow tersebut salah satu ketetapan yang dihasilkan adalah mendorong perjuangan pembebasan nasional di Tiongkok. Di dalam ketetapan tersebut setidaknya terdapat 4 (empat) poin pokoknya.²¹⁰ *Pertama*, Komintern berkomitmen untuk membantu gerakan pembebasan nasional di negeri-negeri jajahan dan setengah jajahan, sekalipun gerakan tersebut berwatak gerakan borjuis demokratis. *Kedua*, Komintern menekankan untuk membangun persekutuan antara Uni Soviet dengan gerakan-gerakan pembebasan dalam melawan imperialisme. *Ketiga*, menekankan untuk pembentukan sekita buruh terorganisasi dan pembangunan Partai Komunis-Partai Komunis di negeri tersebut. *Keempat*, masa depan revolusi nasional dapat tumbuh menjadi Revolusi Sosialis dikarenakan kegiatan dari Partai Komunis-Partai Komunis nasional dan peranan Uni Soviet. Keempat hal ini menandakan bahwa, Komintern memiliki perhatian yang baik bagi perkembangan gerakan revolusioner di negeri-negeri jajahan maupun setengah jajahan seperti Tiongkok.

Di Tiongkok, perkembangan gerakan revolusioner semakin pesat. Hal ini ditentukan terutama karena perkembangan kontradiksi yang semakin meruncing antara rakyat Tiongkok dengan imperialisme dan feodalisme di Tiongkok. Meruncingnya kontradiksi tersebut melahirkan kebutuhan sebuah gerakan yang terorganisasi dengan baik untuk melakukan perlawanan. Dalam hal ini, kemudian terbentuklah organisasi Pemuda Sosialis pada Agustus 1920 di

210. *Ibid*, 14.

Tiongkok. Hal inilah yang melatari lahirnya Partai Komunis Tiongkok sebagai organisasi yang memimpin perjuangan revolusi Tiongkok.

Partai Komunis Tiongkok berdiri pada 12 Juli 1921. Kongres pembentukannya diadakan di Shanghai dan dihadiri oleh 12 orang, yaitu, Mao Tse Tung, Chang Kuo Tao, Tung Pi-wu, Chou Fu-hai, Chen Kung-po, Chen Wang-tao, Chen Tan-Chiu, Li Han-chun, Li Ta, Ho Shu-cheng, Lu Jen-ching, dan Pao Hui-sheng.²¹¹ Dalam kongres ini dihadiri pula oleh perwakilan dari Komintern yaitu Hendricus Josephus Franciscus Marie Sneevliet (Henk Sneevliet). Dalam kongres perdananya ini, Partai Komunis Tiongkok dengan tegas mengesahkan ideologi kelas proletariat, yaitu Marxisme-Leninisme sebagai ideologinya.



GAMBAR 12. Bendera Partai Komunis Tiongkok

Terbentuknya Partai Komunis Tiongkok menandakan sebuah era baru dalam perjuangan rakyat Tiongkok menuju kemerdekaan. Hal ini terutama sekali

211. *Ibid*, 15.

berkaitan dengan bagaimana sesungguhnya jenis atau bentuk dari revolusi Tiongkok yang harus dipimpin oleh partai. Mengenai pentingnya partai dalam melancarkan revolusi di Tiongkok, Mao menyampaikan pemikirannya sebagai berikut:

“Mengapa harus ada partai revolusioner? Karena di dunia ini ada musuh yang menindas rakyat, sedangkan rakyat ingin menghancurkan penindasan musuh itu, maka harus ada partai revolusioner. Pada zaman kapitalisme dan imperialisme ini justru diperlukan adanya suatu partai revolusioner seperti Partai Komunis. Kalau tidak ada partai revolusioner seperti Partai Komunis, maka sungguh tidak mungkin bagi rakyat untuk menghancurkan penindasan musuh itu.”²¹²

Dalam hal ini, Mao berusaha menekankan pentingnya partai revolusioner untuk menjadi wadah mengorganisasi dan memimpin perjuangan revolusi di Tiongkok. Mao mengkontekstualisasikan pemikirannya tentang revolusi dua tahap, khususnya Revolusi Demokrasi Baru dengan keperluan untuk membangun Partai Komunis Tiongkok.

Dalam pemikirannya, Mao memandang bahwa untuk menghancurkan musuh yang terorganisasi dengan baik yaitu imperialisme dan feodalisme, gerakan revolusioner Tiongkok harus membangun partai yang revolusioner pula. Dari hal inilah kemudian Mao menjadikan kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok menjadi hal yang penting dalam Revolusi Demokrasi Baru. kepemimpinan dan tugas besar dari Partai Komunis Tiongkok lebih lanjut dijelaskan oleh Mao sebagai berikut:

212. Mao Tse Tung, *Pilihan Karja Mao Tse Tung Djilid III*, (Peking: Komisi Penerbitan Bahasa Asing Komite Central Partai Komunis Tiongkok, 1965), 41.

“... menyelesaikan revolusi borjuis-demokratik Tiongkok (Revolusi Demokrasi Baru) dan bersiap-siap mengalihkannya ketingkat Revolusi Sosialis bila semua syarat yang diperlukan sudah tersedia, itulah seluruh tugas revolusioner yang mulia dan besar dari Partai Komunis Tiongkok.”²¹³

Mao menegaskan bahwa keberadaan Partai Komunis Tiongkok dalam Revolusi Demokrasi Baru adalah teramat penting dan tidak bisa tergantikan. Menurut Mao, partai apapun baik partai borjuasi maupun milik borjuasi kecil tidaklah akan mampu memimpin kedua tahap revolusi yang besar tersebut. Hal ini dikarenakan partai-partai tersebut, termasuk Partai Nasionalis Tiongkok tidak memiliki tujuan untuk benar-benar meluncurkan revolusi demi membangun masyarakat sosialisme menuju komunisme. Partai Komunis Tiongkok memiliki tugas menjadi alat perjuangan dalam mewujudkan revolusi di Tiongkok. Dalam hal ini, Partai Komunis Tiongkok harus mampu menjaga 3 (tiga) aspek penting dalam revolusi, yaitu ideologi, politik, dan organisasi.

Partai Komunis Tiongkok merupakan partai yang sejak berdirinya telah memiliki watak kelas proletariat. Artinya, menurut Mao bahwa Partai Komunis Tiongkok tetap memegang teguh Marxisme-Leninisme sebagai ideologinya. Dalam hal ini, salah satu tugas dari Partai Komunis Tiongkok adalah menjaga ideologi Marxisme-Leninisme untuk tetap menjadi pedoman dalam Revolusi Demokrasi Baru menuju Revolusi Sosialis. Menurut pemikiran Mao, hal ini diperlukan untuk tetap menjaga pimpinan maupun anggota partai dan rakyat Tiongkok dalam kesatuan ideologi. Hal ini berkaitan dengan pemikiran Mao sebagai seorang Marxis, bahwa Marxisme-Leninisme bukan sekedar teori, namun

213. Mao Tse Tung, *Pilihan Karja Mao Tse Tung Djilid II*, (Peking: Komisi Penerbitan Bahasa Asing Komite Central Partai Komunis Tiongkok, 1965), 425.

‘alat pemandu’ dalam revolusi untuk menghancurkan imperialisme dan feodalisme. Dalam pemikirannya, Mao mengemukakan bahwa partai tidak hanya cukup untuk memahami Marxisme-Leninisme, namun perlu membekali dengan pengetahuan sejarah dan tentang gerakan praktisnya.²¹⁴

Dalam pemikirannya mengenai Marxisme-Leninisme, Mao tidak memandangnya sebagai dogma. Mao memandangnya dengan jernih melalui pandangan filsafat materialisme dialektika. Dalam aspek teori dan ideologi revolusioner, Mao lebih lanjut berpendapat bahwa:

“Teori Marx, Engels, Lenin, dan Stalin adalah teori yang berlaku untuk seluruh dunia. Teori mereka tidak boleh dipandang sebagai dogma, melainkan sebagai pedoman untuk beraksi. Mempelajari Marxisme-Leninisme tidak boleh hanya mempelajari istilah-istilah dan kalimat-kalimatnya saja, tetapi harus memperelajari sebagai ilmu revolusi. Kita bukan saja harus memahami kesimpulan tentang hukum-hukum umum yang ditarik oleh Marx, Engels, Lenin, dan Stalin dari studi mereka mengenai kehidupan nyata yang luas dan pengalaman revolusioner, tetapi juga harus mempelajari pendirian dan metode mereka dalam meninjau dan memecahkan masalah.”²¹⁵

Dalam hal ini, Mao bertujuan untuk menekankan bahwa salah satu fungsi dan tugas dari Partai Komunis Tiongkok adalah memperdalam ideologi Marxisme-Leninisme. Mao menekankan bagi seluruh kader dan pimpinan partai untuk giat dan keras dalam belajar teori-teori Marx, Engels, Lenin, dan Stalin. Selain itu, teori-teori tersebut juga harus disebar secara luas pada seluruh rakyat Tiongkok, hal ini bertujuan untuk membangkitkan kesadaran atas gerakan revolusioner. Inilah yang disebut oleh Mao sebagai tugas Partai Komunis Tiongkok dalam aspek ideologi.

214. *Ibid*, 273.

215. *Ibid*, 273-274.

Dalam aspek ideologi, Mao juga menekankan bahwa penting bagi Partai Komunis Tiongkok untuk mempelajari sejarah dan kondisi konkret masyarakat Tiongkok dengan menggunakan metode Marxis. Perkembangan dan dinamika sejarah adalah catatan penting bagi gerakan revolusioner. Dari hal tersebutlah Mao mampu menyatakan bahwa perspektif revolusi Tiongkok adalah revolusi dua tahap, Revolusi Demokrasi Baru menuju Revolusi Sosialis. Bagi Mao, Marxisme baru dapat dilaksanakan dalam praktik apabila dipadukan dengan ciri-ciri yang khusus dari Tiongkok. Kekuatan besar dari Marxisme-Leninisme justru terletak pada dapat dipadukannya dengan praktik revolusioner konkret di setiap negeri.²¹⁶ Aspek ideologi inilah yang kemudian menjadikan Partai Komunis Tiongkok mampu menentukan arah politiknya dalam memimpin Revolusi Demokrasi Baru.

Tugas Partai Komunis Tiongkok selanjutnya adalah dalam aspek politik. Aspek politik terbagi dalam dua bagian utama, yaitu politik untuk menuntun gerak revolusi dan politik untuk terus memajukan dan memperbaiki internal partai. Oleh karena itu aspek politik tidak bisa melepaskan dirinya dari aspek ideologi sebagai pedomannya. Bagi Mao, tugas partai dalam aspek politik menjadi penting karena mayoritas anggota partai adalah rakyat yang berasal dari golongan kaum tani dan borjuasi kecil lainnya. Dalam hal ini, kaum tani dan borjuasi kecil lainnya tentu dianggap memiliki pandangan politik yang kurang teguh karena latarbelakang kelasnya tersebut. Hal ini harus butuh perhatian lebih

216. *Ibid*, 275

dari Partai Komunis Tiongkok agar tidak terjerumus pada pandangan borjuasi kecil dalam memimpin revolusi.

Dalam kongres keduanya yang diselenggarakan pada Juli 1922, Partai Komunis Tiongkok melahirkan beberapa keputusan-keputusan politik penting.²¹⁷ Partai Komunis Tiongkok dalam hal ini meneguhkan kembali analisisnya terhadap kondisi masyarakat Tiongkok yang setengah jajahan setengah feodal. Berkaitan dengan hal tersebut, melalui usulan dari buah pikir Mao, Partai menetapkan seluruh agenda revolusinya mulai dari sasaran hingga perspektif revolusi Tiongkok. Partai dalam hal ini, menyatakan program revolusionernya, menjalankan Revolusi Demokrasi Baru untuk menghancurkan imperialisme dan kekuatan feodal.

Partai Komunis Tiongkok memiliki peranan untuk menjadi pemimpin dalam revolusi Tiongkok. Dalam hal ini, Partai Komunis Tiongkok harus mampu menggalang massa dari berbagai kelas tertindas. Oleh karenanya, salah satu keputusan besar yang diambil adalah menggalang persatuan dan kerjasama dengan Partai Nasionalis Tiongkok pimpinan Dr. Sun. Hal ini bertujuan untuk menjadikan Partai Nasionalis Tiongkok sebagai aliansi taktis pendukung melawan imperialisme. Alhasil, anggota Partai Komunis Tiongkok dapat juga menjadi anggota dari Partai Nasionalis bahkan hingga menduduki beberapa jabatan penting di dalamnya. Pasca kematian Dr. Sun, Partai Nasionalis Tiongkok justru melakukan pengkhianatan dengan melakukan penyerangan dan pembasmian

217. Imam Soedjono, *Rakyat dan Senjata: Perang Rakyat di Beberapa Negeri Asia*, (Yogyakarta: Resist Book, 2011), 17.

seluruh kader-kader dan pimpinan Partai Komunis Tiongkok. Hal inilah yang disebut oleh Mao sebagai pengkhianatan borjuasi Tiongkok terhadap revolusi.

Dalam pemikirannya, Mao tetap menegaskan bahwa sekalipun terdapat suatu kerjasama yang taktis dengan partai borjuasi, tetap tugas untuk memimpin revolusi adalah tugas Partai Komunis Tiongkok. Dalam hal ini, Partai Komunis Tiongkok harus mampu memimpin gerakan revolusioner untuk memecahkan kontradiksi pokok yang ada. Lebih lanjut Mao menyatakan:

“Tiongkok sudah sejak lama sekali berada dalam dua macam kontradiksi dasar yang hebat, kontradiksi antara imperialisme dengan Tiongkok dan kontradiksi antara feodalisme dengan massa rakyat. Pada tahun 1927 borjuasi yang diwakili oleh Kuomintang²¹⁸ mengkhianati revolusi dan menjual kepentingan nasional kepada imperialisme, sehingga terciptalah situasi di mana kekuasaan buruh dan tani bertentangan dengan kekuasaan Kuomintang secara meruncing dan tugas revolusi nasional dan demokratis tak dapat tidak harus dipikul sendiri oleh Partai Komunis Tiongkok.”²¹⁹

Dalam hal ini, Mao ingin menegaskan bahwa perjuangan revolusioner adalah tugas besar yang harus dipimpin hingga selesai oleh partai. Mao tidak memposisikan pemikirannya pada pandangan pragmatis maupun oportunis dalam membangun aliansi. Bagi Mao, kekuatan pokok dalam perjuangan revolusioner tetap ada di dalam kelas buruh dan kaum tani Tiongkok yang dipimpin melalui Partai Komunis Tiongkok. Dalam membangun pemikirannya mengenai peran dan tugas Partai Komunis Tiongkok sebagai bagian pokok dari Revolusi Demokrasi Baru, Mao juga menekankan pentingnya politik internasional Partai Komunis Tiongkok.

219. Mao Tse Tung, *Pilihan Karja Mao Tse Tung Djilid I*, (Peking: Komisi Penerbitan Bahasa Asing Komite Central Partai Komunis Tiongkok, 1965), 355.

Negeri-negeri imperialisme adalah musuh seluruh rakyat di dalam negerinya dan musuh bagi negeri-negeri jajahan dan setengah jajahan seperti Tiongkok. Imperialisme telah melahirkan suatu syarat untuk pembangunan kekuatan perjuangan kelas di seluruh dunia. Syarat pokoknya adalah sistem penghisapan dan penindasan yang sudah termonopoli oleh imperialisme. Bagi Marxis-Leninis, imperialisme adalah zaman di mana terdapat pembagian yang dilakukan oleh mayoritas negara-negara penindas terhadap negara-negara jajahan maupun setengah jajahannya. Hal inilah yang melahirkan suatu politik luar negeri yang berperspektif internasionalisme.

Internasionalisme adalah Marxisme-Leninisme dalam lapangan politik luar negeri. Artinya bahwa perjuangan kelas tidak mengenal batas teritorial suatu negeri, tidak mengenal jenis kelamin, suku, corak budaya, dan hal lainnya. Perjuangan kelas mutlak dibutuhkan oleh rakyat tertindas di seluruh dunia untuk keluar dari belenggu penghisapan dan penindasan. Pandangan ini juga diadopsi oleh Mao untuk menuntun politik Partai Komunis Tiongkok. Mao membangun perspektif pemikirannya tentang hal tersebut dari kolaborasi antara patriotisme dan internasionalisme. Dalam hal ini, Mao tidak melepaskan perspektif patriotisme dan perjuangan nasional, namun melakukan suatu pola korelasi antara keduanya, patriotisme dan internasionalisme.

Mao mencoba menjawab keraguan dalam pikiran internal partai mengenai menggabungkan sekaligus perspektif Partai Komunis Tiongkok antara patriotisme dan internasionalisme. Hal ini dilakukan oleh Mao karena berangkat dari analisis bahwa Tiongkok adalah negeri yang diagresi oleh imperialisme.

Agresi ini menyebabkan perjuangan revolusioner yang dipimpin oleh Partai Komunis Tiongkok haruslah memiliki perspektif politik yang tepat. Patriotisme bagi Mao harus dinjunjung untuk menghancurkan agresor dari Tiongkok, sementara internasionalisme bertujuan sebagai bentuk keterlibatan revolusi Tiongkok sebagai bagian dari revolusi di dunia. Dalam konteks ini Mao lebih lanjut menjabarkannya sebagai berikut:

“Tiongkok adalah negara yang diagresi. Oleh karena itu orang Komunis Tiongkok harus memadukan patriotisme dengan internasionalisme. Kita adalah kaum internasionalis dan juga kaum patriot, dan semboyan kita ialah berperang untuk membela tanah air untuk melawan kaum agresor.”²²⁰

Dalam hal ini, pemikiran Mao bertolak pada prinsip kekhususan kontradiksi, artinya peran Partai Komunis Tiongkok adalah ganda, yaitu internasionalis sekaligus patriot. Partai Komunis Tiongkok terutama sekali harus mengejawantahkan perspektif politik luar negerinya yang internasionalis dalam bingkai perjuangan nasional. Dengan demikian, pemikiran Mao menegaskan bahwa patriotisme adalah penerapan perspektif internasionalisme dengan metode perang revolusioner pembebasan nasional.

Kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok dalam Revolusi Demokrasi Baru juga harus mampu membawa perspektif patriotisme dan internasionalisme secara bersamaan. Hal ini akan menentukan arah dari Revolusi Demokrasi Baru. Dalam pemikirannya, Mao memandang bahwa Revolusi Demokrasi Baru adalah bagian yang tidak terpisah dari revolusi dunia melawan kapitalisme-imperialisme. Hal ini terurai dalam karyanya sebagai berikut:

220. Mao Tse Tung, *Pilihan Karja Mao Tse Tung Djilid II*, (Peking: Komisi Penerbitan Bahasa Asing Komite Central Partai Komunis Tiongkok, 1965), 257.

“Karena hanya dengan berperang membela tanah air barulah kita dapat mengalahkan kaum agresor dan mencapai pembebasan nasional. Dan hanya dengan tercapainya pembebasan nasional barulah mungkin tercapai pembebasan proletariat dan rakyat pekerja lainnya. Kemenangan Tiongkok dan kekalahan kaum imperialis yang mengagresi Tiongkok itu juga berarti bantuan bagi rakyat negeri-negeri lain.”²²¹

Dengan demikian, Mao dalam pemikirannya menyerukan kepada Partai Komunis Tiongkok untuk terus memimpin perjuangan melawan imperialisme, khususnya Jepang dan kekuatan feodalisme.

Demi menyokong politik Partai Komunis Tiongkok di aspek dalam dan luar negeri, Mao menegaskan partai harus terus memperluas dan memperbesar organisasinya. Dalam hal ini, Mao menandakan bahwa Partai Komunis Tiongkok harus bersifat massa. Bersifat massa artinya partai harus mampu terbuka bagi rakyat yang sungguh-sungguh mengabdikan pada gerakan revolusioner. Artinya, Mao melarang Partai Komunis Tiongkok melakukan kecenderungan ‘tutup-pintuisme’. Hal ini berkaitan dengan pemikiran Mao yang memandang bahwa partai sejatinya adalah milik massa.

Partai Komunis Tiongkok merupakan organisasi yang memimpin seluruh perjuangan revolusi, khususnya Revolusi Demokrasi Baru. Dalam memimpin jalannya revolusi, menjaga aspek ideologi dan politik partai adalah hal yang penting. Dalam pemikiran Mao, aspek ideologi dan politik tidak akan mampu membawa kemenangan dalam revolusi tanpa ditopang oleh aspek organisasi. Mao menyatakan bahwa aspek organisasi partai adalah manifestasi dari ideologi dan politik.

221. *Ibid*, 257.

Dalam memimpin Revolusi Demokrasi Baru, Mao memandang pentingnya menegakan disiplin dan demokrasi di dalam partai. Perpaduan ini yang dinamakan dengan prinsip sentralisme demokrasi. Disiplin partai merupakan prinsip penting dalam Partai Komunis Tiongkok yang harus dipahami dan dijalankan oleh pimpinan maupun kader partai. Menurut Mao, terdapat 4 (empat) aspek dalam disiplin partai.²²² *Pertama*, perseorangan tunduk kepada organisasi. *Kedua*, minoritas tunduk kepada mayoritas. *Ketiga*, Organisasi tingkat bawahan tunduk kepada organisasi tingkat atasan. *Keempat*, seluruh Partai tunduk kepada Komite Pusatnya. Seluruh disiplin partai ini bertujuan untuk melakukan kontrol secara internal bagi Partai Komunis Tiongkok. Dalam hal ini, lebih lanjut Mao mengemukakan:

“Maka itu anggota-anggota Partai perlu diberi pendidikan tentang disiplin Partai, supaya anggota-anggota biasa tidak hanya bisa mentaati disiplin, tetapi juga bisa mengontrol pemimpin-pemimpin Partai agar mereka juga mentaati disiplin.”²²³

Keempat disiplin partai itulah yang bagi Mao akan menuntun seluruh tenaga penggerak Revolusi Demokrasi Baru mampu mengambil suatu sikap dan tindakan politik yang satu. Dalam menjalankan disiplin partai yang merepresentasikan prinsip sentralisme, Mao memandang perlu untuk memadukan dengan prinsip demokrasi.

Revolusi Demokrasi Baru merupakan suatu revolusi yang bertujuan menghapuskan sistem sosial setengah jajahan setengah feodal di Tiongkok. Revolusi Demokrasi Baru bagi Mao merupakan proses untuk mendirikan suatu

222. *Ibid*, 267.

223. *Ibid*, 267.

negara demokrasi rakyat Tiongkok. Artinya, demokrasi adalah salah satu prinsip sekaligus tujuan dari perjuangan revolusioner. Hal ini berangkat dari kondisi setengah feodal di Tiongkok yang terus membatasi ruang demokratis bagi rakyat. Pembatasan ini pula yang mengakibatkan kondisi rakyat Tiongkok mengalami keterbelakangan diseluruh aspeknya. Dalam hal ini, Mao memandang demokrasi bukan sebatas tujuan dari Revolusi Demokrasi Baru, lebih jauh Mao memandang demokrasi sebagai suatu prinsip yang harus dijalankan khususnya dalam internal Partai Komunis Tiongkok.

Dalam pemikirannya tentang peran Partai Komunis Tiongkok dalam Revolusi Demokrasi Baru, Mao menekankan salah satu tugas partai adalah membangun dan mengembangkan demokrasi di dalam partai. Hal ini menurut Mao akan meningkatkan inisiatif bagi pimpinan, kader, dan anggota partai dalam perjuangan revolusioner. Bagi Mao, tujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan inisiatif dari seluruh elemen partai tidak akan berhasil jika tidak terlebih dahulu menetapkan demokrasi sebagai salah satu prinsip yang harus dijalankan. Hal ini tergambar jelas dalam pemaparan Mao:

“tujuan mengembangkan inisiatif tidak akan tercapai jika dalam Partai kurang kehidupan demokratis. Juga hanya dalam kehidupan demokratis dapat diciptakan orang-orang cakap dalam jumlah besar.”²²⁴

Perkembangan kehidupan yang demokratis di dalam internal Partai Komunis Tiongkok juga dihambat oleh faktor lainnya. Faktor tersebut adalah aspek sistem setengah jajahan setengah feodal. Oleh karenanya, sebelum membangun sebuah demokrasi baru melalui perjuangan yang revolusioner, penting bagi Partai

224. *Ibid*, 268

Komunis Tiongkok untuk terlebih dulu membangun iklim demokrasi di dalamnya. Menurut Mao sistem setengah jajahan setengah feodal adalah perintang utama bagi berkembangnya demokrasi dalam partai dan perjuangan revolusioner:

“Negeri kita adalah negeri di mana sistem patriarkal yang berdasarkan produksi kecil-kecilan menempati kedudukan yang unggul, dan dipandang dari negeri kita sebagai keseluruhan sampai sekarang belum ada kehidupan demokratis; sebagai pencerminan dari keadaan demikian ini ialah gejala kurangnya kehidupan demokratis dalam Partai. Gejala ini merintang seluruh Partai dalam mengembangkan inisiatif sepenuh-penuhnya. Bersamaan dengan itu ia telah mengakibatkan kurangnya kehidupan demokrasi dalam front persatuan dan gerakan massa rakyat.”²²⁵

Padangan Mao tersebut memperlihatkan betapa pentingnya membangun sebuah sistem yang demokratis di dalam partai. Dalam hal ini, Partai Komunis Tiongkok adalah cerminan dalam kehidupan demokratis rakyat Tiongkok. Seberapa mendalamnya pemahaman pimpinan, kader, dan anggota Partai akan menentukan arah demokrasi yang akan dibangun melalui jalan Revolusi Demokrasi Baru. Selain itu, Mao juga menegaskan bahwa membangun demokrasi semata-mata bertujuan untuk meningkatkan disiplin Partai dan daya juang gerakan revolusioner.²²⁶ Hanya dengan hal tersebut Partai Komunis Tiongkok akan mampu memperluas kehidupan demokratisnya tanpa terjerumus dalam ‘lumpur’ ultra demokrasi yang liberal dan akan merusak disiplin Partai.

Kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok dalam Revolusi Demokrasi Baru harus tercermin dalam aspek pembangunan disiplin dan demokrasi di dalam Partai. Tujuannya tidak lain adalah untuk memperkuat dan memperluas pengaruh kepemimpinannya, sehingga massa kelas proletariat, kaum tani, dan borjuasi kecil

225. *Ibid*, 268-269.

226. *Ibid*, 269.

mampu terhimpun secara luas. Lebih lanjut Mao menulis tujuan utama dari prinsip sentralisme demokrasi:

“... memperluas demokrasi intern-Partai harus dipandang sebagai suatu langkah yang perlu untuk mengkonsolidasi dan mengembangkan Partai dan sebagai suatu senjata penting yang memungkinkan Partai menjadi hidup dan dinamis dalam perjuangan besar, sanggup menghadapi tugas-tugasnya, menciptakan kekuatan baru dan mengatasi kesulitan-kesulitan perang.”²²⁷

Bagi Mao, setelah menerapkan disiplin dan demokrasi dalam Partai maka Partai Komunis Tiongkok dapat menjadi pemimpin perjuangan revolusioner dengan terus memperluas ideologi dan politiknya di tengah-tengah rakyat Tiongkok.

Dalam memimpin perjuangan Revolusi Demokrasi Baru, Partai Komunis Tiongkok dituntut harus mampu memobilisasi massa secara luas. Kepemimpinan kelas proletariat melalui Partainya, tidak mungkin dapat memenangkan Revolusi Demokrasi Baru tanpa peran aktif dari seluruh massa rakyat tertindas di Tiongkok. Hal ini berkenaan dengan betapa besar musuh dari Revolusi Demokrasi Baru, yaitu imperialisme dan feodalisme. Mao memandang hal ini dengan menyebutkan bahwa Partai Komunis Tiongkok memiliki peranan vital di tengah masyarakat Tiongkok. Bagi Mao, sebelum rakyat Tiongkok dimobilisasi melakukan perjuangan revolusionernya, terlebih dulu Partai Komunis Tiongkok harus mampu memperhatikan kehidupan dan cara kerja massa. Terkait hal ini, pernyataan Mao harus dikutip sedikit panjang:

“Jika kita ingin menang, kita harus bekerja lebih banyak lagi. Kita harus memimpin perjuangan kaum tani untuk tanah dan membagikan tanah kepada mereka, mempertinggi antusiasme kerja mereka dan meningkatkan produksi pertanian. Menjamin kepentingan kaum buruh, mendirikan koperasi-koperasi, mengembangkan perdagangan dengan

227. *Ibid*, 269.

luar daerah kita, memecahkan masalah yang dihadapi massa seperti sandang, pangan, perumahan, kayu bakar, beras, minyak goreng dan garam, penyakit dan kesehatan serta perkawinan. Pendeknya, semua masalah praktis dalam kehidupan massa sehari-hari harus mendapat perhatian kita. Apabila kita memperhatikan dan memecahkan masalah-masalah tersebut serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan massa, maka kita akan benar-benar menjadi organisator kehidupan massa, dan massapun akan benar-benar berhimpun di sekitar kita dan dengan gairah mendukung kita.”²²⁸

Dalam kutipan di atas, Mao bermaksud ingin menekankan pada seluruh pimpinan, kader, maupun anggota Partai Komunis Tiongkok mengenai tugas Partai di tengah massa.

Dalam menekankan pentingnya memperhatikan kehidupan massa, Mao tidak hanya memaparkan gagasan-gagasan teoritik, namun juga mencontohkan dengan beberapa capaian yang telah didapat oleh beberapa daerah yang dikuasai Partai Komunis. Mengenai ini, Mao menuliskan panjang lebar:

“Ketika satu setengah kamar dari rumah seorang tani yang miskin di kecamatan Changkang musnah terbakar, pemerintah kecamatan itu segera menyerukan kepada massa supaya menyumbangkan uang untuk membantunya. Ketika ada tiga orang kehabisan makanan, pemerintah kecamatan tersebut dan perkumpulan saling-bantu segera memberikan beras kepada mereka. Pada masa paceklik di musim panas yang lalu, pemerintah kecamatan Changkang mendatangkan beras dari kabupaten Kunglue yang jauhnya lebih dari 200 *li* untuk menolong massa. Demikian juga di kecamatan Chaisi, pekerjaan-pekerjaan semacam ini dilakukan dengan sangat baiknya.”²²⁹

Contoh tersebut membuktikan bahwa Mao mengerti betul tentang kehidupan massa. Bagi Mao, massa adalah sumber kekuatan utama dalam melakukan perjuangan. Revolusi Demokrasi Baru tidak akan pernah mencapai kemenangannya tanpa keterlibatan aktif dari massa.

228. Mao Tse Tung, *Pilihan Karja Mao Tse Tung Djilid I*, (Peking: Komisi Penerbitan Bahasa Asing Comite Central Partai Komunis Tiongkok, 1965), 196.

229. *Ibid*, 197.

Pemikiran Mao mengenai pentingnya peranan massa tidak lepas dari pengetahuannya yang tajam mengenai sejarah. Sejarah perjuangan revolusioner telah memberi pelajaran berharga kepada Mao. Hal ini terutama pasca kemenangan revolusi proletariat di Rusia dalam menumbangkan rejim Tsar pada 1917. Bagi Mao, seberapapun besarnya kekuatan dari kelompok penghisap dan penindas tetap akan dapat dikalahkan dengan kekuatan besar massa. Dalam hal ini, kedudukan massa menjadi semakin penting seiring jalan revolusi yang ditetapkan oleh Partai Komunis Tiongkok, yaitu revolusi melalui medium perang bersenjata rakyat melawan kekuatan kontra revolusioner.

Mao menggambarkan kekuatan massa dalam perjuangan revolusioner:

“Bayangkanlah istana-istana kaisar feodal selama ribuan tahun yang lalu, bukankah semua itu cukup kuat dengan tembok-tembok dan parit-paritnya? Namun sekali rakyat bangkit, robohlah semua itu satu demi satu. Tsar Rusia adalah salah satu penguasa yang paling lalim di dunia, tetapi ketika proletariat dan kaum tani bangkit berrevolusi, masih adakah Tsar itu? Tidak ada lagi. Dan benteng bajanya semua roboh.”²³⁰

Mao meyakini benteng terkuat sesungguhnya adalah massa yang berhimpun dan mendukung revolusi dengan sungguh-sungguh. Sebelum hal itu terjadi, massa harus dibangkitkan kesadarannya, bahwa revolusi adalah kewajiban bersama dan Partai Komunis Tiongkok adalah partainya massa rakyat Tiongkok. Dengan menghimpun berjuta massa tersebut di bawah pimpinan Partai Komunis Tiongkok, barulah Revolusi Demokrasi Baru dapat mengalahkan imperialisme dan feodalisme serta pemerintahan komprador dalam negeri.

Partai Komunis Tiongkok merupakan aspek pokok pertama dalam Revolusi Demokrasi Baru. Keberadaan Partai Komunis Tiongkok juga berkaitan

230. Mao Tse Tung, *Pilihan Karja Mao Tse Tung Djilid II*, (Peking: Komisi Penerbitan Bahasa Asing Komite Central Partai Komunis Tiongkok, 1965), 340.

dengan kepemimpinannya dalam menjalankan Revolusi Demokrasi Baru. Aspek lain yang berkaitan dengan Revolusi Demokrasi Baru dan Partai Komunis Tiongkok adalah perang tahan lama. Perang tahan lama merupakan manifestasi dari Revolusi Demokrasi Baru dalam menghancurkan kekuatan imperialisme dan feodalisme.

Perang merupakan bentuk perjuangan revolusioner yang mau tidak mau harus terjadi. Dalam hal ini, perang yang dimaksud adalah perang revolusioner. Perang revolusioner adalah perang yang bertujuan untuk memecahkan kontradiksi yang terjadi. Kontradiksi yang dimaksud adalah antara kelas-kelas penghisap dengan yang terhisap. Kontradiksi tersebut bersifat antagonis, sehingga mengharuskan hancurnya salah satu segi kontradiksi tersebut. Mengenai ini, Mao mengamini apa yang dikatakan oleh Lenin:

“... pembebasan melalui revolusi adalah dengan mengganti negara borjuis menjadi negara proletar, melalui cara kekerasan, di mana kekerasan adalah bidan bagi setiap masyarakat lama yang telah menghasilkan masyarakat baru.”²³¹

Perang revolusioner untuk memecahkan kontradiksi, juga menjadi jalan dari Revolusi Demokrasi Baru di Tiongkok. Kontradiksi antara imperialisme dengan negeri Tiongkok dan antara feodalisme dengan rakyat menjadi hal yang pokok. Kontradiksi ini menurut pemikiran Mao hanya dapat dipecahkan melalui perang revolusioner. Lebih lanjut Mao menulis dalam karyanya:

“Perang- suatu bentuk perjuangan yang tertinggi untuk memecahkan kontradiksi-kontradiksi antara kelas dengan kelas, bangsa dengan bangsa,

231. V.I.Lenin, *NEGARA DAN REVOLUSI, Ajaran Marxis Tentang Negara dan Tugas-Tugas Proletariat Di Dalam Revolusi*, terj. Oey Hay Djoen (Bandung: Ultimus, 2005), 29

negara dengan negara, atau golongan politik dengan golongan politik pada tingkat tertentu dari perkembangan kontradiksi itu, perjuangan yang telah ada sejak lahirnya milik perseorangan dan kelas-kelas.”²³²

Dalam hal ini, Mao ingin menekankan bahwa perang adalah tahap tertinggi dari perjuangan revolusioner. Mengenai hal ini, Mao menyatakan bahwa perang revolusioner rakyat Tiongkok harus mampu memahami kondisi-kondisi umum dan khusus dalam perang.

Tiongkok sebagai negara setengah jajahan setengah feodal tentunya memiliki kondisi khusus yang berbeda dengan negara lain. Analisis kelas-kelas dalam masyarakat Tiongkok juga telah menunjukkan betapa kompleksnya masyarakat Tiongkok. Dalam hal ini, perang juga harus disesuaikan dengan kondisi-kondisi tersebut. Dalam pemikirannya, Mao membahas apa yang dinamakan perang revolusioner rakyat Tiongkok. Perang revolusioner rakyat Tiongkok merupakan perang untuk menghancurkan imperialisme dan feodalisme secara bersamaan.

Pemikiran Mao mengenai perang revolusioner dipengaruhi oleh beberapa aspek baik secara teori maupun praktik. Secara teori, jelas bahwa rumusan-rumusan dari Marxisme-Leninisme mengenai revolusi merupakan aspek utamanya. Dalam hal ini, pemikiran Mao merupakan tindak lanjut dari Marxisme-Leninisme, khususnya di negara setengah jajahan setengah feodal. Aspek lain yang mempengaruhinya adalah pengalaman internal Tiongkok dan pengalaman negeri-negeri lain dalam melancarkan perang revolusioner untuk pembebasan nasionalnya. Kemenangan revolusi Oktober 1917 di Uni Soviet telah

232. Mao Tse Tung, *Pilihan Karja Mao Tse Tung Djilid I*, (Peking: Komisi Penerbitan Bahasa Asing Komite Central Partai Komunis Tiongkok, 1965), 240.

memberikan begitu banyak pengetahuan tentang perang revolusioner bagi pemikiran Mao. Hal ini terjadi karena, pengalaman perang revolusioner Uni Soviet adalah yang pertama di dunia hingga berhasil menghancurkan kekuasaan otokrasi Tsar dan membangun negara sosialis. Pengalaman ini semakin memperkaya dan meyakinkan pemikiran Mao tentang jalan revolusioner dan perang revolusionernya.

Pengalaman lain yang mempengaruhi pemikiran Mao adalah perang dalam negeri Tiongkok. Perang dalam negeri yang dimaksud adalah perang revolusioner pertama yang sering disebut gerakan 'Ekspedisi ke Utara'. Ekspedisi ke Utara adalah perang revolusioner yang dilakukan oleh Partai Komunis Tiongkok bersama front persatuannya dengan Partai Nasionalis Tiongkok pimpinan Chiang Kai Sek. Perang revolusioner ini terjadi pada periode 1924-1927. Secara umum, tujuan dari perang revolusioner Ekspedisi ke Utara adalah untuk mengalahkan raja-raja perang yang mengabdikan pada beberapa negara imperialis dan mempersatukan Tiongkok dalam pemerintahan nasional.²³³ Dalam hal ini, bagi Partai Komunis Tiongkok perang tersebut memiliki tujuan yang khusus. Tujuan utama Partai Komunis Tiongkok adalah melancarkan revolusi agraria di pedesaan untuk mendirikan daerah-daerah bebas di bawah kekuasaan Partai Komunis Tiongkok melalui organisasi-organisasi taninya.

Pengalaman perang Ekspedisi ke Utara dalam aspek tertentu memberikan pengalaman dan kemenangan tersendiri bagi gerakan revolusioner. Dalam hal ini, perang tersebut telah mendidik kaum tani khususnya untuk

233. Imam Soedjono, *Rakyat dan Senjata: Perang Rakyat di Beberapa Negeri Asia*, (Yogyakarta: Resist Book, 2011), 25.

membangun organisasi dan berkuasa di wilayahnya masing-masing. Menurut penyelidikan Mao di wilayah Hunan, serikat-serikat tani telah melakukan perjuangan menghancurkan kekuatan feodal baik bangsawan maupun tuan-tuan tanah di desa.²³⁴ Hal ini banyak yang berujung pada kemenangan serikat tani.

Perang revolusioner Ekspedisi ke Utara pada sisi yang lain memberikan pengalaman berharga bagi pemikiran Mao. Serentetan kemenangan gerakan revolusioner pada tahun 1924-1927 kemudian secara sepihak dikhianati oleh Partai Nasionalis Tiongkok. Pada 12 April 1927, pasukan bersenjata Chiang Kai Sek melakukan penyerbuan dan penumpasan terhadap kaum komunis Tiongkok di Shanghai.²³⁵ Pergerakan tersebut disokong oleh para bankir maupun borjuasi di Tiongkok. Dalam tragedi ini ribuan kaum komunis dan serikat buruh dibunuh dan dimasukkan dalam penjara.

Dari pengetahuan teori Marxisme-Leninisme dan pengalaman beberapa perang revolusioner tersebut Mao merumuskan pemikirannya tentang perang revolusioner. Perang revolusioner rakyat Tiongkok menurut Mao harus mampu mengkolaborasikan hukum-hukum umum dan khusus tentang perang. Bagi Mao, perang revolusioner dalam Revolusi Demokrasi Baru memiliki hukum-hukum khusus di dalamnya. Perang tidaklah dapat disamakan begitu saja tanpa melihat aspek-aspek khususnya. Aspek khusus yang dimaksud oleh Mao adalah waktu, tempat dan sifat perang. Hukum umum dari perang sejatinya adalah berkembang. Dalam aspek memahami perang revolusioner Tiongkok, Mao menekankan bahwa

234. *Ibid*, 32-33.

235. *Ibid*, 27.

pengalaman perang revolusioner Uni Soviet dan Ekspedisi ke Utara di Tiongkok tidak bisa diterapkan secara mekanis.

Pandangan-pandangan keliru dalam memandang perang revolusioner dalam internal partai maupun di luar partai juga tidak luput dari perhatian Mao. Ada beberapa pandangan yang mengemuka tentang perang revolusioner Tiongkok. Pandangan pertama adalah pandangan yang menyatakan untuk memenangkan perang, Partai Komunis Tiongkok dan gerakan revolusionernya cukup mempelajari dan menguasai pengetahuan perang secara umum. Maksudnya adalah dengan mempelajari pedoman-pedoman perang dan kemiliteran yang dikeluarkan oleh pemerintahan Tiongkok yang reaksioner dan komprador.²³⁶ Hal ini menurut pandangan Mao tentu adalah sebuah kekeliruan yang fundamental. Menurut Mao, panduan perang yang dikeluarkan oleh pemerintahan Tiongkok adalah panduan perang kontra revolusioner, yang bertujuan untuk memusnahkan seluruh perjuangan Revolusi Demokrasi Baru. Dengan demikian, Mao benar-benar mengecam pandangan tersebut.

Pandangan yang kedua adalah yang memandang bahwa perang revolusioner cukup dengan mengikuti apa yang dilakukan oleh perang revolusioner Uni Soviet. Pandangan ini berangkat dari keberhasilan perang revolusioner tersebut dalam mengantarkan kemenangan bagi proletariat Uni Soviet. Dalam hal ini, pandangan tersebut lebih lanjut menganjurkan untuk mempelajari kitab-kitab militer tentara merah Uni Soviet. Mengenai ini Mao menulis argumentasinya:

236. Mao Tse Tung, *Pilihan Karja Mao Tse Tung Djilid I*, (Peking: Komisi Penerbitan Bahasa Asing Komite Central Partai Komunis Tiongkok, 1965), 241.

“... mereka tidak tahu bahwa walaupun kita harus teristimewa menghargai pengalaman perang Uni Soviet, karena pengalaman itu adalah pengalaman perang revolusioner yang terbaru dan diperoleh di bawah pimpinan Lenin dan Stalin, tetapi kita juga harus menghargai pengalaman perang revolusioner Tiongkok, karena revolusi Tiongkok dan Tentara Merah Tiongkok mempunyai banyak kekhususannya pula.”²³⁷

Pandangan selanjutnya yang besar pula mempengaruhi rakyat adalah pandangan parsial tentang pengalaman perang revolusioner Ekspedisi ke Utara pada tahun 1924-1927. Dalam hal ini, Mao melakukan kritik terhadap pandangan tersebut. Kritik Mao terpusat pada pandangan tersebut yang mekanis. Bagi Mao, pengalaman praktik revolusioner Ekspedisi ke Utara adalah pengalaman berharga dan harus diapresiasi dan dipelajari, namun pengalaman tersebut tidak dapat begitu saja ditiru. Perang revolusioner Ekspedisi ke Utara adalah perang yang secara khusus memiliki sasaran dan tenaga penggerak revolusi. Sebut saja kolaborasi antara Partai Komunis Tiongkok dengan Partai Nasionalis Tiongkok saat Ekspedisi ke Utara. Pada perkembangannya, pasca keberhasilan Ekspedisi ke Utara, antara Partai Komunis Tiongkok dengan Partai Nasionalis Tiongkok mengalami kontradiksi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perang revolusioner memang terus berkembang dan harus sesuai dengan kekhususan baik waktu, tempat, maupun sifatnya.

Pemikiran Mao mengenai perang berangkat dari hal tersebut, yaitu tentang hukum-hukum umum dan khusus dalam perang. Pemahaman hal tersebut mengantarkan selanjutnya pada aspek tujuan perang. Filsafat materialisme dialektika yang termanifestasi dalam pemikiran Mao tentang kontradiksi menjadi

237. *Ibid*, 242.

landasan utama dari maksud Mao mengenai tujuan perang. Mao memiliki pemikiran bahwa perang seharusnya bertujuan akhir untuk meniadakan perang itu sendiri. Perang yang dimaksud Mao tentu adalah perang revolusioner, bukan perang yang lainnya.

Perang memang selalu menjadi momok yang menakutkan dan jauh dari kata humanis. Pandangan tersebut berlaku secara universal, tidak terkecuali terhadap perang revolusioner. Bagi para pemikir Marxis, termasuk Mao menyatakan bahwa perang revolusioner terjadi karena ada sebab struktural dan sistemik yang melahirkannya. Penyebab yang dimaksud adalah sistem penghisapan dan penindasan yang terjadi pada masyarakat berkelas. Hal ini tentunya juga terjadi pada negeri Tiongkok yang setengah jajahan setengah feodal. Dalam hal ini, kelas penghisap dan penindas akan terus melakukan apa saja, termasuk perang untuk mempertahankan kekuasaannya. Dengan demikian, perang revolusioner dan segala gerakan revolusioner sudah pasti akan menghadapi perang kontra revolusioner.

Dalam tradisi pemikiran Marxis, para pemikirnya juga menyandarkan analisisnya pada aspek sejarah. Dalam sejarah perkembangan masyarakat dunia, setiap perubahan radikal selalu termanifestasi dengan perang. Perang pembebasan budak di Romawi tahun 73-71 SM, perang kaum tani di Jerman tahun 1525, hingga perang revolusioner di Uni Soviet 1917 adalah beberapa catatan sejarah perang antara kelas tertindas melawan kelas penindas. Dari ulasan pemikiran dan catatan sejarah tersebut, menjadikan Mao menyimpulkan bahwa perang revolusioner merupakan bukan perang yang tanpa sebab dan tanpa tujuan.

Perang revolusioner bagi Mao bertujuan untuk meniadakan perang. Maksud dari meniadakan perang adalah karena perang revolusioner akan menghancurkan kekuatan dan kekuasaan kelas-kelas penindas, dengan demikian memungkinkan untuk menghilangkan penindasan. Perang revolusioner bagi Mao adalah perang melawan kekuatan kontra revolusioner yang tidak bisa dihindari. Dalam masyarakat Tiongkok, perang revolusioner yang dipimpin oleh kekuatan buruh dan tani bersenjata adalah untuk menghancurkan imperialisme dan feodalisme. Mengenai ini, lebih lanjut Mao menulis:

“... perang, momok berupa saling bunuh antara sesama manusia ini, akhirnya akan dilenyapkan oleh kemajuan masyarakat manusia, dan bahkan akan dilenyapkan di masa datang yang tidak terlalu jauh lagi. Tetapi hanya satu jalan untuk melenyapkannya, yaitu melawan perang dengan perang, melawan perang kontra revolusioner dengan perang revolusioner, melawan perang nasional kontra revolusioner dengan perang nasional revolusioner, dan melawan perang kelas kontra revolusioner dengan perang kelas revolusioner.”²³⁸

Lebih lanjut, Mao menekankan dalam tulisannya yang lain mengenai tujuan dari perang revolusioner:

“Bilamana masyarakat manusia maju sampai pada saat di mana kelas dan negara telah lenyap, maka tak akan ada lagi perang, baik perang kontra revolusioner maupun perang revolusioner, perang tak adil maupun perang adil, dan itulah zaman perdamaian abadi bagi umat manusia. Dalam mempelajari hukum-hukum perang revolusioner, kita bertolak dari hasrat kita untuk melenyapkan semua perang. Di sinilah letak garis pemisah antara kita kaum Komunis dengan semua kelas penghisap.”²³⁹

Dalam hal ini, Mao mencoba untuk menggambarkan tentang pemikirannya mengenai perang revolusioner. Dalam pemikiran Mao, perang revolusioner

238. *Ibid*, 244.

239. *Ibid*, 245.

adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari perjuangan panjang menuju Revolusi Demokrasi Baru. Perang revolusioner adalah jalan menuju kemenangan Revolusi Demokrasi Baru.

Revolusi Demokrasi Baru merupakan perjuangan yang panjang. Bagi Mao, Revolusi Demokrasi Baru tidak akan bisa dimenangkan dengan cepat. Hal ini mengingat bahwa imperialisme Jepang dan feodalisme tidak akan diam begitu saja melihat perkembangan revolusi. Demikian halnya dengan perang revolusioner, perang revolusioner Tiongkok menurut Mao adalah perang yang akan memakan waktu panjang. Berangkat dari hal ini, Mao kemudian menamakan perang revolusioner Tiongkok sebagai perang tahan lama.

Sejarah perjuangan rakyat Tiongkok pasca kemenangan revolusi borjuis tahun 1911 diisi dengan perang perlawanan rakyat. Dalam hal ini, Mao mengklasifikasikan perang revolusioner rakyat Tiongkok dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu tahap Perang Dalam Negeri pertama pada tahun 1924 sampai tahun 1927, Perang Dalam Negeri kedua dari tahun 1927 sampai 1936, dan Perang Revolusioner nasional Anti-Jepang.²⁴⁰ Ketiga perang tersebut bukan merupakan perang revolusioner yang terpisah-pisah. Ketiganya memiliki kelasinghubungan yang erat, musuh dari seluruh perang tersebut adalah imperialisme dan kekuatan feodal. Dalam aspek lain, tujuan dari ketiga perang tersebut adalah merombak secara keseluruhan sistem setengah jajahan setengah feodal Tiongkok menjadi demokrasi baru. Artinya, ketiga perang revolusioner tersebut adalah perang tahan lama dalam rangka perjuangan besar Revolusi Demokrasi Baru.

240. *Ibid*, 256.

Ketiga perang revolusioner tersebut terjadi di bawah pimpinan kelas proletariat Tiongkok melalui Partai Komunis Tiongkok. Menurut Mao, seluruh perang revolusioner di Tiongkok tidak mungkin dipimpin oleh kelas yang lain melalui partainya. Perang revolusioner, termasuk Revolusi Demokrasi Baru hanya dapat dipimpin oleh Partai Komunis Tiongkok, namun Partai Komunis Tiongkok juga harus tepat dalam menjalankan aspek ideologi, politik, dan organisasinya. Hal ini menurut pemikiran Mao akan berguna untuk menghindari perang dan revolusi Tiongkok dari penyimpangan garis politik oportunisme kanan dan oportunisme kiri. Dalam hal ini, kedua penyimpangan itu adalah hal yang akan merintangi kemenangan dalam perang revolusioner dan Revolusi Demokrasi Baru secara keseluruhan.

Oportunisme kanan adalah pandangan kompromisme yang memandang perjuangan revolusioner rakyat akan sulit menang. Dalam hal ini, pandangan oportunisme kanan menganggap perlu untuk mengkolaborasikan kepentingan kelas tertindas dengan kepentingan borjuasi. Dalam pengalaman perang revolusioner di Tiongkok, hal ini pernah terjadi pada periode perang dalam negeri tahun 1924-1927. Akhir tragis dari perang revolusioner tersebut adalah pengkhianatan yang dilakukan oleh Partai Nasionalis Tiongkok dengan melakukan pembunuhan dan penangkapan kepada kaum Komunis. Hal ini terjadi karena kala itu pimpinan Partai Komunis Tiongkok Chen Tu-Shiu mengambil politik oportunisme kanan. Dalam hal ini, sikap tersebut termanifestasi dari pilihan politik untuk lebih menyelamatkan front persatuan dengan Partai Nasionalis Tiongkok. Dari kejadian itulah kemudian muncul kritik terhadap sikap

yang menunjukkan “segala-galanya demi keselamatan front persatuan”, yang mengorbankan perjuangan pokok perang revolusioner rakyat.²⁴¹ Kemelut dan kesalahan oportunisme kanan dari pimpinan Partai Komuis Tiongkok tersebut berimbas pada pemecatan Chen Tu-Shiu.

Pada tanggal 7 Agustus 1927, diadakan suatu konferensi darurat Komite Pusat Partai Komunis Tiongkok.²⁴² Pada momentum inilah Chen Tu-Shiu dipecat dari jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal dan digantikan oleh Chu Chiu-pai. Dalam konferensi tersebut yang juga dihadiri oleh Mao, menetapkan kembali garis perjuangan revolusioner melalui perang tahan lama. Dalam hal ini, perang revolusioner untuk mewujudkan demokrasi baru di Tiongkok tidak hanya diarahkan pada imperialisme dan feodalisme, namun Partai Komunis Tiongkok juga menetapkan Partai Nasionalis Tiongkok yang telah berkhianat pada revolusi dan perjuangan rakyat Tiongkok sebagai musuhnya.

Kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok pasca konferensi darurat tersebut bukan tanpa masalah. Penyimpangan sikap oportunisme kanan memang telah disingkirkan, namun yang terjadi adalah sebaliknya. Partai Komunis Tiongkok dalam menjalankan strategi perang revolusionernya mengalami penyimpangan oportunisme kiri. Hal ini termanifestasi dalam program strategi perang revolusioner pada Juli 1927, yaitu “Pemberontakan Panen Musim Gugur”. Secara esensi, pemberontakan tersebut bertujuan untuk melakukan pembagian tanah milik tuan tanah, pembentukan tentara merah yang berisikan kekuatan

241. Imam Soedjono, *Rakyat dan Senjata: Perang Rakyat di Beberapa Negeri Asia*, (Yogyakarta: Resist Book, 2011), 29.

242. *Ibid*, 39.

buruh dan tani, dan mendirikan daerah kekuasaan Partai Komunis Tiongkok. Dalam pemberontakan tersebut, Mao yang ditugaskan untuk memimpinya.

Dalam rangka melakukan pemberontakan tersebut, Mao menyusun strategi untuk melakukan pengepungan dan merebut kota Changsa. Dalam strateginya, Mao merumuskan untuk melakukan penyerangan terlebih dahulu pada daerah-daerah sekitar kota Changsa dan bersamaan dengan itu ribuan buruh akan didorong untuk melakukan aksi-aksi besar di pusat kota Changsa. Rencana Mao tersebut diarahkan untuk berakhir pada suatu titik yaitu penyerbuan bersama pasukan yang berada di luar kota dan yang berada di dalam kota. Tujuan utama strategi Mao tersebut adalah untuk memecah konsentrasi musuh dengan menghancurkan satu demi satu daerah kekuasaan musuh.

Rencana perang revolusioner tersebut tidak mendapat restu dari Komite Pusat Partai Komunis Tiongkok. Dalam menilai rencana Mao dalam memimpin pemberontakan, Mao dinilai lebih mengutamakan kekuatan militer tentara merah tanpa memperhatikan kekuatan rakyat bersenjata.²⁴³ Dalam hal ini, lebih lanjut strategi Mao di cap sebagai “petualangan militer belaka”. Dalam melakukan respon terhadap kritik dari Partai Komunis Tiongkok, Mao menegaskan bahwa sikap Komite Pusat Partai Komunis Tiongkok adalah kontradiktif. Sikap kontradiktif yang dimaksud adalah di satu sisi mengasikan perang dari militer, namun di sisi lainnya menginginkan pemberontakan bersenjata dari rakyat. Lebih lanjut, Mao menegaskan bahwa kondisi konkretnya adalah tentara merah baginya

243. *Ibid*, 42.

tetap adalah bantuan bagi kekuatan dari buruh dan tani yang tidak cukup jumlahnya.²⁴⁴

Tindak lanjut dari strategi pemberontakan tersebut adalah paksaan dari Partai Komunis Tiongkok untuk tetap menyerang langsung kota Changsa. Strateginya adalah dengan memaksimalkan perang rakyat bersenjata yang sebelumnya dikatakan tidak cukup kuat oleh Mao. Hasil dari strategi yang dipaksakan itu adalah kekalahan bagi pasukan revolusioner. Kegagalan dalam “Pemberontakan Panen Musim Gugur” disebabkan dari penyimpangan oportunisme kiri. Dapat disimpulkan bahwa oportunisme kiri adalah pandangan yang menganggap terlalu lemahnya musuh yang dihadapi dan tidak memeriksa dengan objektif jika kekuatan internal masih sangat minim. Hal ini yang kerap menjerumuskan perang revolusioner pada kegagalan dan pengorbanan yang merugikan perjuangan.

Selain pengalaman tersebut, Mao juga menyoroti penyimpangan oportunisme kiri yang terjadi pada periode 1931-1934. Penyimpangan tersebut terjadi dikala perang revolusioner sedang melakukan perang dan propaganda kontra terhadap strategi “Pengepungan dan Penumpasan” kelima yang dilakukan oleh Chiang Kai Sek. Akibatnya dari penyimpangan tersebut Mao menulis dalam artikelnya:

“Perang Revolusi Agraria menderita kerugian yang luar biasa seriusnya sehingga kita bukan hanya tidak dapat mengalahkan musuh dalam kontra-kampanye terhadap ‘pengepungan dan penumpasan’ kelima, tapi malah kehilangan daerah-daerah basis dan tentara merah telah diperlemah.”²⁴⁵

244. *Ibid*, 42.

245. Mao Tse Tung, *Pilihan Karja Mao Tse Tung Djilid I*, (Peking: Komisi Penerbitan Bahasa Asing Komite Central Partai Komunis Tiongkok, 1965), 259.

Kedua penyimpangan ini merupakan hal yang menjadi catatan penting dalam pemikiran Mao mengenai perang tahan lama Tiongkok. Bagi Mao, kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok memiliki aspek yang penting dalam hal ini. Kepemimpinan Partai harus mampu menyingkirkan dua jenis penyimpangan politik tersebut dari revolusi dan perang revolusioner Tiongkok.

Pemikiran Mao berlanjut dalam aspek menuju kesimpulan tentang perang tahan lama. Aspek yang dimaksud adalah bantahan terhadap 2 (dua) teori perang Tiongkok. Kedua teori tersebut adalah teori tentang “Kemusnahan Negara” dan teori tentang “Perang Cepat Menang”. Keduanya bagi Mao adalah pandangan yang tidak tepat dalam menilai karakter dan hari depan perang revolusioner Tiongkok. Dalam hal ini, Mao membangun gagasannya untuk meruntuhkan bangunan teoritik dari kedua teori tersebut.

Teori kemusnahan negara adalah teori yang memandang bahwa perang revolusioner Tiongkok akan berakhir pada kehancuran dan kekalahan kelompok kaum Komunis. Pandangan ini mendasari argumentasinya pada perbandingan kekuatan semata. Bagi mereka, imperialisme Jepang memiliki persenjataan dan modal yang jauh lebih baik untuk menghancurkan pasukan revolusioner Tiongkok. Dalam hal ini, pandangan teori ini akan mendekatkan mereka pada jalur-jalur kompromi terhadap imperialisme Jepang dan pemerintah dalam negeri.

Dalam menyikapi mengemukanya teori kemusnahan negara, Mao mengatakan bahwa para penganut teori tersebut hanya berat sebelah menilai situasi perang revolusioner. Dalam hal ini, lebih lanjut Mao mengatakan:

“Penganut-penganut teori kemusnahan negara, yang melihat satu faktor saja, yaitu perbandingan antara kuatnya musuh dengan lemahnya kita, dahulu sudah berkata: ‘Jika melakukan perang perlawanan pasti musnah’ dan sekarang mereka berkata pula: ‘Jika berperang terus pasti musnah’.”²⁴⁶

Bagi Mao, argumentasi teori mereka sesungguhnya tidak berdasar analisis yang konkret. Semula, sebelum terjadinya perang mereka meyakini meletusnya perang revolusioner akan memusnahkan Tiongkok. Hal ini dibantah oleh terus berkembangnya perang revolusioner dan bertahannya kekuatan revolusioner. Menyikapi itu, lalu mereka mengajukan satu argumentasi lagi, yaitu jika perang terus berlangsung maka Tiongkok akan musnah.

Dalam argumentasi bantahan selanjutnya Mao mengemukakan syarat internal kondisi Tiongkok dan Jepang. Menurut pemikiran Mao, Tiongkok saat melakukan perang revolusioner sudah menjadi negeri yang berbeda dibandingkan dengan zaman feodalisme. Kelahiran dan perkembangan kelas proletariat, berdirinya Partai Komunis Tiongkok, semakin terdidiknya kaum tani dan borjuasi kecil perkotaan dalam perlawanannya, dan pengalaman panjang perlawanan melawan kelas penindas adalah faktor-faktor kemajuan dari negeri Tiongkok. Faktor-faktor tersebut adalah syarat penting bagi kemenangan perang revolusioner Tiongkok. Menurut Mao, kesemua faktor tersebut adalah faktor penting dan menentukan bagi perang revolusioner. Lebih lanjut, Mao mengemukakan bahwa hal yang sebaliknya terjadi pada imperialisme Jepang.

Perang revolusioner Tiongkok merupakan perang tahan lama yang memakan waktu panjang. Dalam hal ini, kondisi imperialisme Jepang justru

246. Mao Tse Tung, *Pilihan Karja Mao Tse Tung Djilid II*, (Peking: Komisi Penerbitan Bahasa Asing Komite Central Partai Komunis Tiongkok, 1965), 157.

sedang mengalami krisis. Jepang melakukan perang kontra revolusioner melawan Tiongkok pasca terjadinya Perang Dunia I. Artinya kondisi negara-negara imperialisme lain sedang mengalami kemunduran pasca perang.²⁴⁷ Selain itu, periode tersebut juga akan menyeret Jepang dan negara-negara imperialis lainnya ke fase perang besar selanjutnya, yaitu Perang Dunia II. Bagi Mao, hal ini akan menjadikan imperialis Jepang mengalami ‘pecah fokus’ dalam menghadapi perang revolusioner Tiongkok. Mao menambahkan mengenai kondisi zaman yang telah berubah. Menurut pemikiran Mao, Jepang juga sedang menghadapi gejolak di dalam negerinya. Gerakan rakyat di dalam negeri Jepang mulai bangkit dan melakukan protes terhadap pemerintahan. Hal ini terjadi tentunya akibat dari politik agresor imperialis Jepang yang banyak ditentang rakyatnya. Jadi, bagi Mao imperialisme Jepang sedang mengalami ‘pukulan’ dari segala penjuru.

Pemikiran Mao untuk membantah teori kemusnahan negara berlajut pada analisisnya tentang kondisi internasional. Menurut Mao, konstelasi politik luar negeri sangat menguntungkan perang revolusioner Tiongkok. Kondisi internasional sedang berkecamuk perang-perang pembebasan nasional negeri-negeri jajahan maupun setengah jajahan seperti Tiongkok. Artinya kesadaran politik untuk melakukan perebutan kemerdekaan semakin tinggi. Hal ini bagi Mao akan berbanding lurus pada sikap politik rakyat dunia yang semakin mengecam watak agresor dari imperialisme. Gerakan rakyat sedunia saat ini sedang berkembang dengan skala yang luas untuk melawan imperialisme, khususnya kelompok fasis, termasuk Jepang di dalamnya.²⁴⁸

247. *Ibid*, 158.

248. *Ibid*, 160.

Konstelasi politik internasional itu menjadikan posisi Tiongkok lebih diuntungkan ketimbang imperialisme Jepang. Hal ini akan memungkinkan Tiongkok untuk mendapatkan bantuan internasional dari berbagai gerakan rakyat, khususnya Uni Soviet. Jepang justru harus menghadapi berbagai gejolak internasional yang mendekatkan imperialisme Jepang dan kelompok negara-negara fasis lainnya pada kekalahan.

Dari pemikiran Mao tersebut dapat disimpulkan bahwa pandangan teori kemusnahan negara tidaklah tepat. Berbagai syarat yang telah dipaparkan oleh Mao menunjukkan bahwa perang revolusioner Tiongkok lebih diuntungkan. Hal inilah yang menurut Mao akan memungkinkan perang revolusioner bertahan lama. Berkaitan dengan hal ini, Mao tetap menegaskan bahwa walaupun teori kemusnahan negara tidaklah tepat, namun perang revolusioner juga tidak mungkin menang dengan cepat. Artinya Mao juga tidak membenarkan teori perang cepat menang.

Dalam pemikirannya, Mao menegaskan selangkah apapun kondisi Jepang, namun imperialisme tetaplah lebih kuat dan unggul ketimbang Tiongkok yang setengah jajahan setengah feodal. Dari segala aspek, politik, ekonomi, kebudayaan dan militer jelaslah bahwa imperialisme Jepang memiliki keunggulan. Hal ini bagi Mao tidaklah boleh dipungkiri, karena ini adalah suatu kebenaran.²⁴⁹ Dalam hal ini, Mao berpandangan bahwa perang revolusioner antara Tiongkok melawan imperialisme Jepang tidak akan berlangsung cepat.

249. *Ibid*, 170.

Kemenangan perang revolusioner hanya bisa didapatkan melalui perang tahan lama.

Perang tahan lama merupakan ciri bagi perang revolusioner Tiongkok. Perjuangan untuk memenangkan Revolusi Demokrasi Baru harus melalui jalan perang tahan lama menghadapi musuh-musuh yang kontra revolusioner. Dalam hal ini, terdapat beberapa penyebab yang menyebabkan Tiongkok memilih karakter perangnya. Aspek utamanya adalah sasaran dari Revolusi Demokrasi Baru yaitu imperialisme dan feodalisme. Sasaran revolusi tersebut merupakan hal yang besar untuk dikalahkan. Partai Komunis Tiongkok, pimpinan, kader, dan anggotanya harus memahami betapa besar musuh yang sedang dihadapinya. Hal ini diperparah dengan pengkhianatan pemerintahan dalam negeri pimpinan Chiang Kai Sek. Dalam hal ini, menjadikan musuh dari perang revolusioner Tiongkok menjadi bertambah dan semakin membesar kekuatannya.

Dalam pemikirannya tentang perang tahan lama, Mao melakukan klasifikasi mengenai tingkatan dalam perang. Klasifikasi ini bertujuan menjadi pedoman umum untuk melancarkan perang tahan lama. Mengenai ini, akan dikutip cukup panjang tulisan dari Mao:

“Karena perang Tiongkok-Jepang merupakan perang tahan lama dan kemenangan terakhir akan berada di pihak Tiongkok, maka dapat dibayangkan secara masuk akal bahwa perang tahan lama ini konkretnya akan melalui tiga tingkat. Tingkat pertama merupakan masa serangan strategis musuh dan pertahanan strategis kita. Tingkat kedua merupakan masa penjagaan strategis musuh dan persiapan kita untuk serangan-balas. Tingkat ketiga merupakan masa serangan-balas dan pemunduran strategis musuh.”²⁵⁰

250. *Ibid*, 174.

Ketiga tingkat tersebut adalah sesuatu yang harus dicapai secara bertahap dalam perang revolusioner Tiongkok.

Strategi pada tingkat pertama perang tahan lama adalah pertahanan strategis. Pada tingkat pertama, pihak imperialisme Jepang akan memaksimalkan serangan bersenjata untuk dapat memenangkan perang dengan cepat. Menurut Mao, yang harus dilakukan oleh perjuangan revolusioner adalah bertahan dan sebisa mungkin mempertahankan daerah basis kekuasaannya di desa-desa. Dengan melakukan ini, menurut Mao imperialisme Jepang akan mengalami kesulitan yang berarti untuk mengalahkan kekuatan revolusioner.

Tingkat pertahanan strategis terutama mengandalkan penggalangan front persatuan secara luas. Hal ini dilakukan oleh Partai Komunis Tiongkok untuk menyatukan kekuatan rakyat dari berbagai elemen kelas tertindas. Dalam tingkat ini juga kaum Komunis sedang menghadapi strategi yang dinamakan oleh Chiang Kai Sek dengan sebutan “pengepungan dan penumpasa”. Strategi ini ditujukan untuk memukul mundur seluruh Tentara Merah revolusioner dan merebut wilayah-wilayah kekuasaannya.

Seluruh proses perang tahan lama dalam tingkatan ini terjadi saat kekuatan imperialisme Jepang dan *kroninya* masih lebih unggul. Dalam hal ini, Mao menyatakan bahwa strategi utama dalam tingkat pertahanan strategis adalah *Perang Mobil* yang didukung oleh perang gerilya dan perang posisi.²⁵¹ Prinsip dalam *Perang Mobil* adalah “bertempur bila bisa menang, menyingkir bila tidak

251. *Ibid*, 175.

bisa menang” kira-kira demikianlah istilah yang Mao gunakan untuk menyederhanakan penjelasannya. *Perang Mobil*, lebih lanjut Mao menjelaskan:

“Garis operasi Tentara Merah ditentukan oleh arah operasinya. Tidak tepatnya arah operasi mengakibatkan tidak tetapnya garis operasi. Meskipun arah besar tidak berubah untuk jangka waktu tertentu, arah-arah kecil di dalam rangka arah besar itu senantiasa berubah; ketika kita menjumpai rintangan pada suatu arah, kita harus berbelok kearah yang lain. Sesudah beberapa waktu, apabila arah besar kita juga menjumpai rintangan. Harus kita ubah pula arah besar itu.”²⁵²

Dalam aspek ini, Mao ingin menyatakan bahwa dalam tingkat pertama, perang revolusioner akan menjadi sangat melelahkan. Hal ini bertujuan untuk tetap menjaga daerah kekuasaan Partai Komunis Tiongkok dan memperluasnya secara bertahap. Dengan demikian, pernyataan Mao tegas bahwa strategi yang pokok adalah *Perang Mobil* dan aspek pendukungnya ialah perang gerilya dan perang posisi.

Pada tingkat pertama ini juga terjadi suatu momentum besar bagi sejarah negara Tiongkok, yaitu *Long March*. *Long March* merupakan tindak lanjut dari serentetan kekalahan akibat kesalahan dalam menerapkan strategi perang revolusioner. Menurut Mao, sebenarnya *Long March* tidak perlu dilakukan jika strategi perang revolusioner dalam menghadapi kampanye pengepungan dan penumpasan ke-5 berjalan dengan tepat.²⁵³ Bagi Mao, yang terjadi selama perang revolusioner kontra-pengepungan dan penumpasan ke-5 adalah kesalahan fatal dari strategi perang. Partai Komunis Tiongkok melakukan kesalahan dengan memaksakan perang posisi di daerah Chiangsi. Dalam

252. Mao Tse Tung, *Pilihan Karja Mao Tse Tung Djilid I*, (Peking: Komisi Penerbitan Bahasa Asing Komite Central Partai Komunis Tiongkok, 1965), 323.

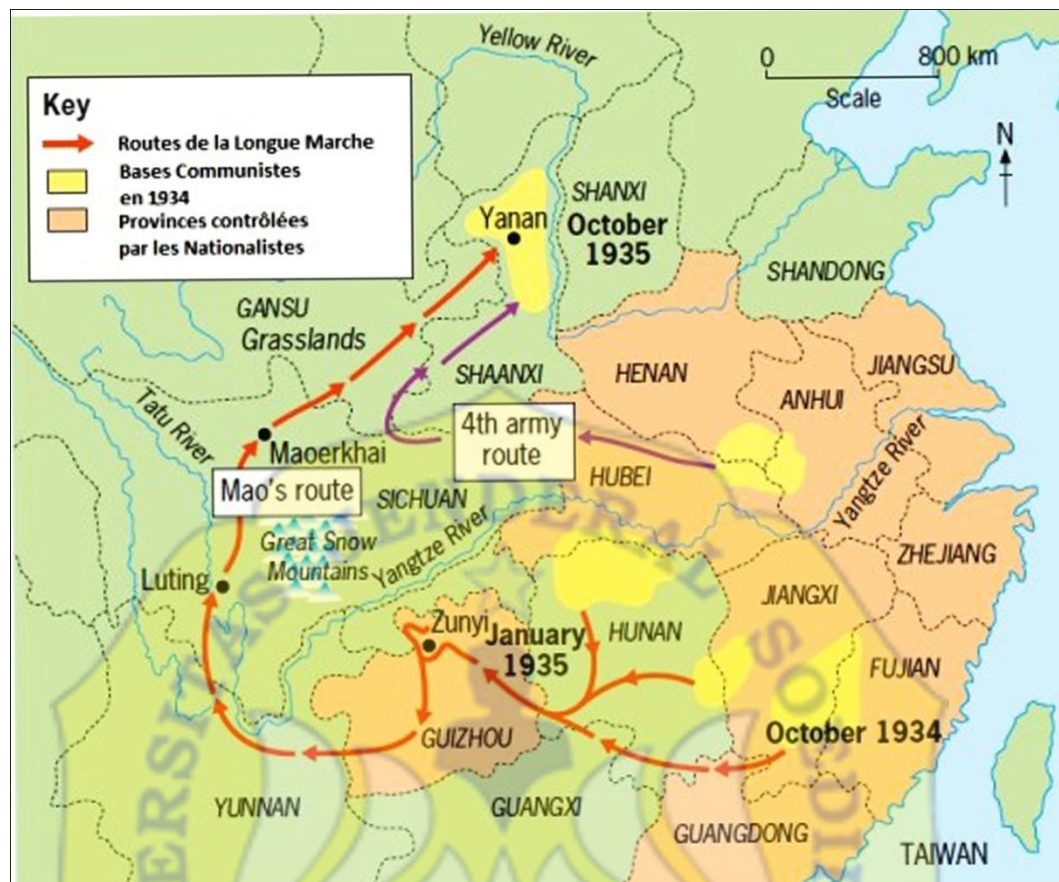
253. Imam Soedjono, *Rakyat dan Senjata: Perang Rakyat di Beberapa Negeri Asia*, (Yogyakarta: Resist Book, 2011), 98.

menyikapi ini, Mao melayangkan kritiknya dengan menyebut bahwa aktifitas kontra-kampanye terhadap pengepungan dan penumpasan ke-5 tidak menunjukkan keinisiatifan dan kedinamisan sedikitpun juga. Hal ini lebih lanjut mengakibatkan pengunduran diri kaum Komunis dari basis revolusioner Chiangsi.²⁵⁴

Long March dimulai pada 16 Oktober 1934 tanpa tujuan akhir yang jelas. Tujuan baru ditetapkan pasca perdebatan panjang Mao dengan Chang Kuo-tao mengenai arah *Long March* beberapa bulan berikutnya. *Long March* diikuti oleh kurang lebih 100.000 orang yang terdiri dari tentara dan masyarakat sipil. Dalam perjalanannya, *Long March* dipimpin oleh Mao dengan menempuh jarak lebih dari 9.600 Km dan melewati 11 Provinsi. *Long March* melewati provinsi Fucien, Chiangsi, Kuangtung, Hunan, Kuangsi, Kuicou, Yunnan, Sikang, Secuan, Kansu, dan berakhir di Shensi pada 20 Oktober 1935.²⁵⁵ Dalam perjalanan inilah Mao menerapkan dengan baik *Perang Mobil* untuk mengecoh pasukan Partai Nasionalis Tiongkok dan pasukan imperialis Jepang.

254. *Ibid*, 99.

255. Tjen Tjan Feng, *Long March Di Samping Ketua Mao Tse Tung*, terj: Tim Buku Guci Media, (Surabaya: Guci Media, 2001), 110.



GAMBAR 13. Peta Jalur yang ditempuh saat *Long March* 1934-1935

Dalam menggambarkan bagaimana perjalanan besar dalam *Long March*, Mao menyatakan:

“*Long March* adalah suatu barisan propaganda. Ia menyadarkan pada sekitar dua ratus juta rakyat dari 11 Provinsi, bahwa jalan yang ditempuh Tentara Merah itulah satu-satunya jalan yang membawa kebebasan mereka. Tanpa *Long March*, bagaimana massa rakyat yang luas demikian cepatnya mengetahui bahwa di dunia ada suatu ide besar yang didukung oleh Tentara Merah itu? *Long March* adalah sebuah mesin penyebar benih. Menyebar banyak benih pada sebelas Provinsi, dan benih itu kemudian bertunas, berdaun, berbunga, dan berbuah dan akan membawa hasil di kemudian hari. Pendeknya, *Long March* berakhir dengan kemenangan kita dan kekalahan musuh.”²⁵⁶

Perang Mobil dan *Long March* telah membuat pihak imperialisme dan pemerintahan Chiang Kai Sek mengalami kebuntuan. Menurut Mao, strategi

256. *Ibid*, 112.

perang tahan lama menggunakan *Perang Mobil* telah membuat moril kekuatan musuh sudah mulai merosot dan melahirkan pandangan kejemuan dalam melakukan perang.²⁵⁷ Di pihak Partai Komunis Tiongkok, justru kekuatan revolusioner semakin besar dengan bertambah luasnya keterlibatan buruh dan tani dalam perang tahan lama. Hal inilah yang mengantarkan perang tahan lama pada tingkat yang kedua.

Tingkat kedua dalam perang tahan lama adalah tingkat kesetandingan strategis. Artinya, perbandingan antara kekuatan musuh dengan kekuatan revolusioner sudah mulai berimbang. Pihak imperialisme Jepang dan pemerintahan Chiang Kai Sek akan mengubah strategi perang mereka. Menurut Mao, pihak musuh akan mengganti dari strategi serangan strategis menjadi mempertahankan daerah kekuasaannya. Mengenai maksud utama dari strategi musuh ini, lebih lanjut Mao menyatakan:

“... dalam tingkat kedua ini maksud musuh ialah menjaga daerah pendudukannya, menjadikan daerah-daerah itu sebagai miliknya sendiri dengan tipu-muslihat membentuk pemerintah boneka dan merampas sebanyak-banyaknya kekayaan rakyat Tiongkok, tetapi ia akan menjumpai juga perang gerilya yang ulet.”²⁵⁸

Dalam hal ini, Mao bermaksud untuk menyatakan bahwa kondisi perang revolusioner telah berubah. Perang tahan lama telah menunjukan semakin membesarnya syarat-syarat kemenangan bagi rakyat Tiongkok.

Pada tingkat kedua dalam perang tahan lama, strategi utama yang digunakan adalah perang gerilya. *Perang Mobil* beralih posisi menjadi strategi pendukung. Perang gerilya digunakan untuk menghancurkan daerah-daerah basis

257. Mao Tse Tung, *Pilihan Karja Mao Tse Tung Djilid II*, (Peking: Komisi Penerbitan Bahasa Asing Komite Central Partai Komunis Tiongkok, 1965), 176.

258. *Ibid*, 176.

milik pasukan Partai Nasionalis Tiongkok dan daerah pendudukan Jepang. Lamanya tingkat ini menurut Mao akan sangat bergantung secepat apa perubahan perimbangan kekuatan diantara kedua pihak.

Masalah terbesar dalam perang tahan lama tingkat kedua ini ada dua aspek. Pertama adalah kehancuran ekonomi akibat perang tahan lama dan kedua adalah politik pecah belah dalam front persatuan. Kedua hal ini memberikan dampak negatif bagi barisan revolusioner. Dalam permasalahan ini, menurut Mao kembali diujinya Partai Komunis Tiongkok untuk menjaga pandangan ideologi dan politik massa dan mengkonsolidasikannya. Lebih lanjut Mao memaparkan masalah tersebut dalam tulisannya:

“Di kalangan kita sendiri, berhubungan dengan jatuhnya kota-kota besar dan kesulitan-kesulitan akibat perang, elemen-elemen bimbabng akan dengan giat menganjurkan teori kompromi, dan pesimisme akan tumbuh dengan hebatnya. Yang menjadi tugas kita pada waktu itu adalah memobilisasi massa rakyat seluruh negeri untuk bersatu-padu dan membulatkan tekad, mempertahankan peperangan tanpa bimbang sedikitpun, memperluas dan mengkonsolidasi front persatuan, memberantas segala macam pesimisme dan teori kompromi, menganjurkan perjuangan yang tak kenal susah-payah dan menjalankan politik masa perang yang baru, agar supaya dapat tahan menempuh perjalanan yang sulit ini.”²⁵⁹

Dalam tingkat kedua ini, perang akan menjadi penentu bagi nasib selanjutnya. Kondisi Tiongkok akan menjadi semakin sulit pada masa perang tingkat kedua ini, namun tingkat kedua ini menurut Mao sekaligus sebagai poros perubahan.

Pada tingkatan ini, perang tahan lama akan mengarahkan Tiongkok pada keuntungan yang lebih besar. Hal ini berkaitan dengan kemunduran kekuatan lawannya. Imperialisme Jepang, sebagai penyokong dan aktor utama

259. *Ibid*, 177.

sasaran perang adalah negeri yang sedang dalam krisis. Dalam mengatasi krisisnya, imperialisme Jepang melakukan agresi dan pendudukan di negeri-negeri Asia Tenggara. Hal ini tentunya akan menguras kekuatan dan konsentrasi dalam menghadapi perang tahan lama. Mengenai ini, Mao menulis dalam tulisan yang lain mengenai peralihan dari tingkat kedua menuju tingkat akhir perang tahan lama:

“Apabila kita dapat mempertahankan Perang Perlawanan, mempertahankan front persatuan dan mempertahankan perang tahan lama, maka dalam tingkat ini Tiongkok akan memperoleh kekuatan untuk mengubah dirinya dari lemah menjadi kuat. Ini akan merupakan babak kedua dari sandiwara tiga babak Perang Perlawanan Tiongkok. Dengan usaha semua perlaku, babak terkahir yang paling menarik akan dapat dipanggungkan dengan sempurna.”²⁶⁰

Tingkat ketiga dalam perang tahan lama adalah perang tingkat akhir. Tingkat ini disebut oleh Mao dengan tingkat serangan-balas. Dalam tingkatan ini, perang tahan lama akan berwujud menjadi serentetan serangan strategis dari Tentara Merah dan pasukan revolusioner terhadap daerah-daerah pendudukan musuhnya. Lebih lanjut, untuk memahami secara komprehensif tentang hal ini, akan dikutip penjelasan Mao secara panjang lebar:

“Dalam tingkat ini peran kita tidak lagi berupa pertahanan strategis, melainkan akan berubah menjadi serangan-balas strategis, yang pada akhirnya akan menampilkan diri sebagai serangan strategis; dan kita tidak lagi beroperasi digaris-dalam strategis, melainkan lambat-laun akan berubah menjadi beroperasi digaris-luar strategis. Hanya setelah kita bertempur sampai ditepi sungai Jalu, perang ini dapat dikatakan berakhir. Tingkat ketiga merupakan tingkat terakhir dari perang tahan lama, dan yang dimaksud dengan meneruskan perang sampai selesai ialah harus menjalani seluruh proses tingkat ini.”²⁶¹

260. *Ibid*, 179.

261. *Ibid*, 179.

Perang tahan lama tingkat ketiga ini mengambil strategi utama *Perang Mobil*, namun perang posisi berhadap-hadapan langsung akan ditingkatkan menjadi hal yang penting. Posisi perang gerilya pada tingkatan ketiga berperan sebagai pembantu dan pendorong untuk memenangkan *Perang Mobil* dan perang posisi. Ketiga tingkatan ini adalah seluruh tingkat yang harus dilalui oleh Partai Komunis Tiongkok dan rakyat untuk mengalahkan pemerintahan Chiang Kai Sek dan imperialisme Jepang. Dalam pemikiran Mao, hanya dengan melewati ketiga tingkat perang tahan lama tersebutlah Revolusi Demokrasi Baru akan mencapai kemenangannya.

Dalam menyimpulkan pemikirannya tentang perang revolusioner yang tahan lama ini, Mao menekankan bahwa perang tahan lama bukan sebatas perang militer belaka. Bagi Mao, perang tahan lama juga berfungsi sebagai media propaganda dan agitasi terhadap rakyat Tiongkok. Perang tahan lama juga menjadi alat untuk mengkonsolidasikan dan memperluas front persatuan. Dalam hal ini, pemikiran Mao berkembang dalam melihat peran Tentara Merah.

Tentara Merah bukan merupakan sebatas tentara seperti milik negara dan kelas borjuasi, bukan juga tentara yang seperti ada pada masa feodal. Tentara Merah merupakan bagian integral dari Partai Komunis Tiongkok dalam menjalankan dan memimpin perang tahan lama. Dengan demikian, selain memiliki tugas dalam perang, Tentara Merah juga bertugas menjalankan kerja-kerja Partai Komunis Tiongkok. Dalam pemikiran Mao, Tentara Merah juga berperan sebagai propagandis dan organisator.

Dalam setiap ekspedisi maupun perjalanan dalam perang, Tentara Merah memiliki tugas untuk melakukan propaganda kepada massa rakyat, khususnya kaum tani di pedesaan. Tujuan utamanya adalah mendorong rakyat Tiongkok secara luas agar terlibat aktif dalam perang revolusioner. Hal inilah yang menjadikan kekuatan untuk memenangkan Revolusi Demokrasi Baru semakin besar.

Revolusi Demokrasi Baru merupakan capaian panjang dan besar untuk perjuangan revolusioner Tiongkok. Kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok dan jalan melalui perang tahan lama bagi Mao belum mampu untuk menjadikan syarat kemenangan Revolusi Demokrasi Baru. Menurut Mao, aspek pokok yang lain dalam Revolusi Demokrasi Baru adalah pembentukan front persatuan.

Front persatuan merupakan salah satu aspek pokok dalam Revolusi Demokrasi Baru, selain kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok dan perang tahan lama. Dalam hal ini, front persatuan merupakan front yang bertujuan untuk menggalang aliansi secara luas dari seluruh kelas dan sektor rakyat yang tertindas oleh keberadaan imperialisme dan feodalisme. Dalam front persatuan, kepemimpinan politik dan organisasi tetap harus berada pada pundak Partai Komunis Tiongkok. Hal ini berkenaan dengan posisi front persatuan nasional yang harus tetap berpandangan kelas proletariat. Kekuatan pokok dan utama dari front persatuan adalah aliansi dasar kelas buruh dan kaum tani Tiongkok.

Dalam pemikiran Mao, front persatuan merupakan sebuah kebutuhan konkret atas situasi konkret revolusi Tiongkok. Baik kondisi internal dalam negeri maupun kondisi internasional, kekuatan revolusi harus diakui masih

lemah. Gelombang pasang revolusi dunia secara konkret belum mampu mengimbangi kekuatan kontra revolusi dari imperialisme. Hal ini menurut Mao juga berlaku di Tiongkok. Kekuatan imperialis Jepang dan pemerintahan komprador Chiang Kai Sek adalah kekuatan yang teramat besar. Mengenai ini, Mao menuliskannya lebih lanjut dalam sebuah karya:

“Kekuatan kontra revolusioner di Tiongkok dan di dunia telah menjadi lebih lemah daripada yang sudah-sudah, sedangkan kekuatan revolusioner di Tiongkok dan di dunia telah lebih kuat dari yang sudah-sudah. Ini adalah penilaian yang tepat, penilaian dari satu segi. Tetapi bersamaan dengan itu harus kita katakan bahwa pada dewasa ini kekuatan kontra revolusi di Tiongkok dan di dunia untuk sementara waktu masih lebih besar daripada kekuatan revolusioner.”²⁶²

Dalam hal ini, Mao juga memperhitungkan kondisi sosial masyarakat Tiongkok melalui analisis kelasnya.

Tiongkok adalah negeri setengah jajahan setengah feodal. Dalam aspek ekonomi, sosial, politik, dan kebudayaan Tiongkok memiliki perkembangan yang berbeda-beda. Ketimpangan antara suatu tempat dengan tempat lain, keterpurukan kehidupan di pedesaan, dan terbelakangnya sektor industri adalah konsekuensi logis dalam sistem setengah jajahan setengah feodal. Seluruh hal ini yang mensyaratkan lahirnya begi banyak kelas-kelas dalam masyarakat Tiongkok. Dalam hal ini, Mao tetap menekankan walaupun begitu banyak kelas dalam masyarakat Tiongkok, tetap terbagi dalam dua golongan. Kelas penindas yang diwakili oleh borjuasi besar, tuan tanah besar, dan kapitalis birokrat yang menjadi perpanjangan kepentingan imperialis. Kelas tertindas yang terdiri dari berbagai

262. Mao Tse Tung, *Pilihan Karja Mao Tse Tung Djilid I*, (Peking: Komisi Penerbitan Bahasa Asing Komite Central Partai Komunis Tiongkok, 1965), 216.

kelas, mulai dari proletariat, borjuasi kecil di luar kaum tani, kaum tani, borjuasi sedang, dan beberapa golongan lainnya. Kedua kelompok tersebut melahirkan kontradiksi yang bersifat antagonis. Hal ini menjadikan suatu kebutuhan untuk melahirkan front persatuan untuk menggalang aliansi kelas-kelas tertindas.

Kedua ciri dan perkembangan tersebut mendorong gerakan revolusioner untuk menyesuaikan taktik perlawanannya. Dalam pemikirannya tentang front persatuan, Mao meletakkan dasar pikirnya terhadap persatuan kekuatan yang luas dan besar untuk mengucilkan dan mengepung musuh.²⁶³ Dalam hal ini, Mao berpandangan bahwa salah satu tugas penting dari Partai Komunis Tiongkok adalah menggalang front persatuan yang luas.

Manifestasi dari pemikiran Mao tentang front persatuan adalah dengan mengorganisasi massa rakyat yang besar. Hal ini ditujukan untuk semakin memperbesar kekuatan revolusioner dan memperkecil kekuatan kontra revolusioner. Bagi Mao, jika hal ini dapat dilakukan dengan baik maka imperialisme Jepang dan kompradornya di Tiongkok akan mampu dipersempit ruang geraknya. Lebih lanjut, Mao menyebut taktik membangun front persatuan adalah taktik yang berkarakter Marxis-Leninis.

Dalam membangun pemikiran dan menjalankan taktik front persatuan, Mao dan Partai Komunis Tiongkok bukan tanpa hambatan. Hambatan utama adalah pandangan yang disebut oleh Mao dengan istilah “tutup-pintuisme”. Pandangan “tutup-pintuisme” berlandaskan pada keyakinan yang subjektif terhadap kekuatan revolusioner Tiongkok. Pandangan tersebut menolak terlibatnya

263. *Ibid*, 218.

borjuasi sedang, tani kaya, maupun intelektual dalam aksi revolusioner. Mereka menganggap bahwa golongan-golongan tersebut tidaklah sesuai dengan garis revolusioner Tiongkok. Hal ini membawa pada kesimpulannya yang menghendaki perang dengan kekuatan seadanya melawan imperialisme Jepang yang lebih unggul disegala bidang.

“Tutup-pintuisme” menurut Mao adalah taktik yang akan menjerumuskan gerakan revolusioner pada kekalahan dari imperialis Jepang. Hal ini disebabkan karena taktik tersebut justru akan melemahkan dukungan dan partisipasi massa dalam revolusi. Mengenai ini, Mao menggambarkan dengan istilah yang menarik:

“taktik tutup-pintuisme adalah taktik kaum isolasionis. Sama dengan ‘menggiring ikan kedalam lubang dan menghalau burung gereja kebelukar’, tutup-pintuisme akan menghalau ‘massa rakyat yang berjuta-juta’ dan ‘tentara yang sangat besar’ itu ke pihak musuh; ini hanya akan disambut gembira oleh musuh. Tutup-pintuisme pada hakekatnya adalah budak setia dari kaum imperialis Jepang, pengkhianat bangsa, dan penjual negara.”²⁶⁴

Mengenai pandangan “tutup-pintuisme”, lebih lanjut Mao mengatakan bahwa hal tersebut adalah pandangan yang dogmatis sekaligus mekanis. Maskudnya adalah bahwa pandangan tersebut seakan-akan sangat Marxis-Leninis karena melarang keterlibatan borjuasi sedang, tani kaya, maupun intelektual dan golongan yang dianggap kontra revolusioner lainnya. Dalam hal ini, Mao kembali mengajukan argumentasinya menggunakan istilah Lenin tentang “penyakit kekanak-kanakan”:

264. *Ibid*, 220.

“kawan-kawan, manakah yang benar, gagasan front persatuan atau gagasan tutup-pintuisme? Manakah yang dibenarkan oleh Marxisme-Leninisme? Saya jawab dengan tegas: front persatuan yang dibenarkan dan bukan tutup-pintuisme. Di antara manusia terdapat kanak-kanak berumur tiga tahun yang mempunyai banyak pengertian yang benar, tetapi mereka tidak boleh disuruh mengurus urusan penting dunia atau negara, karena mereka masih belum mengerti akan soal-soal dunia atau negara. Marxisme-Leninisme menentang penyakit kekanak-kanakan di dalam barisan revolusioner. Apa yang dianjurkan oleh mereka yang mempertahankan taktik tutup-pintuisme itu justru adalah penyakit kekanak-kanakan.”²⁶⁵

Maksud argumentasi Mao tersebut ada dua aspek, yaitu penegasan dan upaya pembersihan. Penegasan Mao bertujuan untuk meluruskan pandangan mengenai taktik yang tepat dalam meluncurkan perjuangan revolusioner. Dalam aspek selanjutnya, Mao ingin menyatakan niatnya untuk membersihkan Partai Komunis Tiongkok dan gerakan revolusioner melalui perang tahan lamanya dari unsur-unsur “tutup-pintuisme”. Dengan demikian, Mao memastikan bahwa taktik yang tepat adalah membangun front persatuan yang revolusioner.

Perkembangan front persatuan merupakan hal dialektis. Prinsip filsafat materialisme dialektika harus kembali diterapkan dalam front persatuan. Mao menilai bahwa Partai Komunis Tiongkok harus cakap dalam memutuskan keterlibatan golongan ataupun kelompok dalam front persatuan. Hal ini bagi Mao bertujuan agar front persatuan dapat saling memberikan bantuan positif terutama bagi kepentingan Revolusi Demokrasi Baru. Seluruh kelompok yang

265. *Ibid*, 219.

terkonsolidasi dalam front persatuan harus mampu memberikan konsesi dan bantuan positif pula untuk perkembangan kelompok masing-masing.²⁶⁶

Dalam front persatuan, kebebasan setiap kelompok dibatasi oleh garis anti imperialis Jepang. Hal ini bertujuan untuk menyingkirkan pandangan kompromisme dan kapitulasionis yang akan menjerumuskan revolusi. Dalam hal ini, Mao mengungkapkannya secara singkat:

“Dulu di Tiongkok pernah ada Chen Tu Siu dan kemudian ada pula Chang Kuo Tao; kedua-duanya adalah kapitulasionis. Kita harus dengan keras menentang kapitulasionis.”²⁶⁷

Dalam pemikiran Mao, front persatuan haruslah tetap memiliki pandangan revolusioner. Hal ini tidak akan berjalan jika bentuk-bentuk kapitulasionis dan kompromisme dengan imperialisme Jepang terus berkembang. Front persatuan harus tetap menjalankan politik perjuangan kelas yang termanifestasi dalam perjuangan pembebasan nasional Revolusi Demokrasi Baru Tiongkok.

Kerjasama jangka panjang dan dialektis ini merupakan bentuk dari front persatuan. Tujuan utamanya adalah melawan imperialis Jepang dan segala kompradornya di dalam negeri Tiongkok. Mao menerapkan dua prinsip kerjasama secara bersamaan di dalam front persatuan. Prinsip pertama adalah front persatuan harus memberikan kebebasan kepada kelompok, golongan dan kelas-kelas di dalamnya. Pada prinsip kedua, Mao menekankan bahwa kebebasan dan hak masing-masing tersebut harus dibatasi di bawah kepemimpinan politik buruh dan tani. Barulah dengan memadukan keduanya ini

266. Mao Tse Tung, *Pilihan Karja Mao Tse Tung Djilid II*, (Peking: Komisi Penerbitan Bahasa Asing Komite Central Partai Komunis Tiongkok, 1965), 279.

267. *Ibid*, 280-281.

Mao menganggap front persatuan akan bisa menjadi sarana yang luas melawan imperialisme Jepang.

Keberhasilan taktik Mao dalam menggalang front persatuan terlihat pada perpecahan dalam kubu Partai Nasionalis Tiongkok. Pada Oktober 1936, dua Jenderal dari pasukan nasionalis bernama Zhang dan Yang melakukan pertemuan bersama Chiang Kai Sek.²⁶⁸ Pertemuan tersebut ditujukan untuk merekomendasikan penghentian terhadap perang dalam negeri dan fokus untuk mengusir kekuatan imperialis Jepang. Pada pertemuan itu, Chiang Kai Sek tetap menginginkan penumpasan kepada kaum Komunis Tiongkok.

Momentum besar dari desakan Partai Komunis Tiongkok pada kelompok nasionalis terjadi pada 23 Desember 1936. Pada saat itu, ditetapkan kesepakatan bersama yang terdiri dari 6 poin utama. *Pertama*, melakukan reorganisasi Partai Nasionalis Tiongkok, mengeluarkan seluruh unsur pro Jepang dengan menggantinya dengan unsur anti Jepang. *Kedua*, bebaskan pimpinan yang patriotik dan tahanan politik lain serta berikan jaminan dan hak terhadap rakyat. *Ketiga*, hentikan penindasan kepada kaum Komunis dan bersatu dengan Tentara Merah untuk melawan Jepang. *Keempat*, mengadakan konferensi penyelamatan nasional yang dihadiri oleh semua unsur front persatuan anti Jepang. *Kelima*, membentuk hubungan kerjasama dengan seluruh negeri yang bersimpati pada kondisi Tiongkok dalam melawan Jepang. *Keenam*, mengambil cara-cara khusus lainnya untuk menyelamatkan bangsa.²⁶⁹

268. Imam Soedjono, *Rakyat dan Senjata: Perang Rakyat di Beberapa Negeri Asia*, (Yogyakarta: Resist Book, 2011), 129.

269. *Ibid*, 135-136.

Partai Komunis Tiongkok juga harus mampu mencerminkan kepemimpinan politik yang tepat dalam front persatuan. Mao tetap memposisikan front persatuan sebagai taktik, bukan sebagai tujuan akhir atau segalanya. Dalam hal ini, Mao memegang prinsip bahwa front persatuan adalah relatif sementara perjuangan revolusioner adalah yang mutlak harus dijalankan. Pandangan Mao ini bertujuan agar tidak terulang lagi kesalahan oportunisme kanan yang memandang “segala-galanya demi front persatuan”. Keberadaan front persatuan dengan demikian bukan berarti kaum Komunis tidak menarik garis demarkasi terhadap kelas borjuasi, proletariat tetap harus teguh dalam politik dan partainya. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Y.W Stalin dalam bukunya:

“... apakah proletariat berhimpun di bawah panji nasionalisme borjuis, ini bergantung pada tingkat perkembangan kontradiksi-kontradiksi kelas, pada kesadaran dan tingkat keterorganisasian proletariat. Proletariat yang sadar mempunyai panjinya sendiri yang teruji, dan baginya tidak ada gunanya berhimpun di bawah panji borjuasi.”²⁷⁰

Perkembangan pemikiran Mao mengenai front persatuan juga menyentuh ranah internasional.

Kondisi Tiongkok adalah berada pada kekuasaan imperialisme Jepang yang fasis. Kondisi dalam negeri Tiongkok yang demikian tertindas dan terhisap juga dialami oleh negara-negara lain di dunia. Perkembangan kondisi internasional pada kisaran tahun 1936-1945 ada dalam masa perang perlawanan melawan imperialisme, khususnya kelompok fasis. Artinya keberadaan imperialisme Jepang di Tiongkok tidak dapat dilepaskan dari kondisi

270. Y.W Stalin, *Marxisme dan Masalah Nasional*, terj. Badan Penerbit Literatur Politik Negara, (Indonesia: Indonesia Progresif, 1979), 32.

internasionalnya. Dalam hal ini, Mao sampai pada kesimpulan bahwa taktik front persatuan harus pula digalang pada lingkup internasional.

Front persatuan internasional yang dimaksud dalam pemikiran Mao adalah yang berwatak anti fasis. Pemikiran Mao berpijak pada perkembangan kontradiksi antar imperialisme. Imperialisme Jerman, Italia, dan Jepang merupakan kekuatan utama fasis internasional. Pada perkembangannya, kelompok fasis melakukan agresi besar-besaran ke seluruh belahan dunia, termasuk ke Uni Soviet dan Tiongkok. Dalam merespon hal ini, Mao mengemukakan pemikirannya:

“Tugas orang Komunis sekarang ini di seluruh dunia ialah memobilisasi rakyat semua negeri untuk menggalang front persatuan internasional dan berjuang untuk melawan fasisme, membela Uni Soviet, membela Tiongkok, membela kebebasan dan kemerdekaan semua bangsa. Pada masa sekarang semua kekuatan harus dipusatkan untuk melawan perbudakan fasis.”²⁷¹

Tujuan utama dari pemikiran Mao ini adalah untuk kepentingan pembebasan Tiongkok dan pembebasan dari negeri-negeri di seluruh dunia.

Dalam upaya mencapai tujuan dari pembangunan front peratuan internasional anti fasis diperlukan ketetapan mengenai tugas-tugas pokok dari Partai Komunis Tiongkok. Mengenai ini, Mao menuliskannya secara tegas sebagai berikut:

“Mempertahankan front persatuan nasional anti Jepang, mempertahankan kerjasama Kuomintang-Komunis. Mengusir kaum imperialis Jepang dari Tiongkok, dan dengan cara ini membantu Uni Soviet. Harus tegas melawan segala kegiatan anti-Soviet dan anti-Komunis dari kaum reaksioner di kalangan borjuasi besar. Dalam

271. Mao Tse Tung, *Pilihan Karja Mao Tse Tung Djilid III*, (Peking: Komisi Penerbitan Bahasa Asing Comite Central Partai Komunis Tiongkok, 1967), 33.

hubungan luar negeri, bersatu dengan semua orang di Inggris, Amerika Serikat dan negeri-negeri lain yang menentang kaum penguasa fasis Jerman, Italia, dan Jepang, untuk melawan musuh bersama.”²⁷²

Tugas Partai Komunis Tiongkok yang dimaksudkan Mao tersebut memperlihatkan kembali konsistensinya dalam menempatkan kontradiksi pokok.

Perkembangan dunia internasional telah melahirkan kesimpulan bagi pemikiran Mao mengenai kontradiksi. Pada umumnya, kontradiksi rakyat seluruh dunia adalah dengan kekuatan imperialisme. Pada situasi lain, beberapa negara fasis menunjukkan agresifitasnya dalam melakukan penjajahan. Hal inilah yang melahirkan pemikiran Mao bahwa untuk sementara kontradiksi yang paling utama rakyat seluruh dunia adalah melawan negara-negara fasis. Posisi negara imperialis lain seperti Inggris, Amerika Serikat, maupun Perancis untuk sementara ditangguhkan statusnya sebagai musuh utama. Dalam hal ini, Mao bukan berarti meminta kepada rakyat di negeri-negeri imperialis tersebut untuk menyudahi perlawannya. Pemikiran Mao tersebut terlihat gamblang dalam tulisannya:

“Kompromi-kompromi demikian tidak meminta rakyat di negeri-negeri kapitalis ikut mengadakan kompromi-kompromi di dalam negeri. Rakyat di negeri-negeri tersebut akan tetap melancarkan perjuangan yang berbeda-beda sesuai dengan keadaanya yang berbed-beda.”²⁷³

Lebih lanjut, Mao masuk kedalam pemikiran taktiknya dalam menghadapi kekuatan reaksioner dari imperialis dalam tulisan dan penekannya yang lain:

“Prinsip kekuatan reaksioner dalam menghadapi kekuatan demokratis rakyat ialah yang dapat dibasmi pasti mereka basmi, dan yang untuk sementara belum dapat dibasmi mereka siap membasminya kelak.

272. *Ibid*, 33-34.

273. *Ibid*, 102.

Menghadapi keadaan demikian, kekuatan demokratis rakyat juga harus menggunakan prinsip yang sama terhadap kekuatan reaksioner.²⁷⁴

Taktik yang dikemukakan oleh Mao tersebut terbukti banyak menghegemoni rakyat di negeri-negeri lain. Perjuangan demokratis dan revolusi pembebasan nasional semakin menyasarkan perlawanannya terhadap negara-negara fasis. Negara-negara imperialisme lainnya juga dipaksa untuk terlibat dalam perang melawan fasis. Hasil nyata dari perlawanan tersebut adalah kemenangan perjuangan demokratis dengan ditandai kehancuran seluruh negara fasis pada tahun 1945 melalui Perang Dunia II. Berakhirnya Perang Dunia II merupakan akhir dari kekuasaan negara-negara fasis. Di Tiongkok, perang revolusioner anti Jepang meraih kemenangannya pada 9 September 1945.

Pasca Perang Dunia II, kondisi internasional kembali berubah. Kehancuran satu kekuatan imperialis, yaitu negara-negara fasis merupakan suatu capaian bagi gerakan rakyat internasional. Dunia kembali pada kontradiksi pokoknya, yaitu antara imperialisme dengan negara-negara jajahan atau setengah jajahan. Menurut Mao, selesainya Perang Dunia II melahirkan imperialisme Amerika Serikat sebagai pemenang. Bagi Mao, imperialisme Amerika Serikat adalah pimpinan dari imperialisme dunia, menggantikan kelompok fasis.²⁷⁵

Mengenai ini, Mao menyatakan argumentasinya:

“Sesudah kemenangan Perang Dunia Kedua imperialisme Amerika Serikat, yang menggantikan kedudukan Jerman, Italia, dan Jepang yang fasis, bersama dengan kakitangannya di berbagai negeri secara gila-

274. *Ibid*, 102.

275. *Ibid*, 343.

gilaan mempersiapkan perang dunia yang baru dan mengancam seluruh negeri.”²⁷⁶

Kondisi internasional yang berubah tersebut berimbas pula pada kondisi Tiongkok. Perubahan konstelasi politik melahirkan perubahan kontradiksi pokok dalam negeri Tiongkok, hal ini juga melahirkan perubahan dari taktik front persatuan revolusioner.

Pasca kekalahan imperialis Jepang baik secara keseluruhan di internasional maupun di Tiongkok, menjadikan kondisi front persatuan kembali berubah. Partai Nasionalis Tiongkok kembali melepaskan diri dari front persatuan, melakukan pengkhianatan kembali pada rakyat Tiongkok. Pertarungan dalam negeri terjadi kembali, antara perjuangan revolusioner dengan pemerintahan reaksioner yang ditopang oleh imperialisme Amerika Serikat. Dalam hal ini, Mao menyatakan bahwa kontradiksi pokok rakyat Tiongkok adalah menghancurkan imperialisme Amerika Serikat dan feodalisme. Kekuasaan dari Partai Nasionalis Tiongkok kembali menjadi musuh dan sasaran Revolusi Demokrasi Baru.

Perubahan ini juga melahirkan perubahan pada strategi perang tahan lama. Mao mencatat, diantara Juli 1946 hingga Juni 1948, Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok telah memukul mundur serangan pasukan 4.300.000 orang tentara pemerintah.²⁷⁷ Dengan demikian, front persatuan revolusioner berjalan tanpa keterlibatan Partai Nasionalis Tiongkok.

Ketepatan taktik front persatuan dari Mao terlihat dari pesatnya perkembangan keanggotaan Partai Komunis Tiongkok. Jumlah anggota Partai

276. *Ibid*, 343.

277. *Ibid*, 344

Komunis Tiongkok berkembang dari 1.210.000 orang pada tahun 1945, menjadi 3.000.000 anggota pada 1948.²⁷⁸ Dalam pemikiran Mao, Partai Komunis Tiongkok harus mampu kembali memperluas front persatuan dengan mempersatukan dengan kuat kekuatan revolusioner di seluruh Tiongkok. Hal ini ditujukan untuk melakukan perang tahan lama yang lebih kuat lagi. Tujuan utamanya ialah mengusir kekuatan agresor imperialisme Amerika Serikat, menggulingkan kekuasaan reaksioner Partai Nasionalis Tiongkok, dan mendirikan republik rakyat Tiongkok yang bersatu dan demokratis. Tujuan tersebut merupakan seluruh tujuan dari Revolusi Demokrasi Baru.

Pemikiran Mao tentang pokok-pokok Revolusi Demokrasi Baru telah memberikan pengaruh besar dalam perjuangan revolusioner rakyat Tiongkok. Pemikiran Mao tentang Partai Komunis Tiongkok, perang tahan lama, dan front persatuan pada akhirnya mampu mengantarkan rakyat Tiongkok pada kemenangannya. Revolusi Demokrasi Baru dapat dimenangkan melalui cara perang tahan lama, dan front persatuan di bawah pimpinan Partai Komunis Tiongkok. Kekuatan revolusioner pada tahun 1949 akhirnya berhasil menekan dan memaksa pemerintah Chiang Kai Sek untuk mundur dan pindah ke Taiwan. Hal ini juga menandakan kemenangan revolusi dalam menghadapi imperialisme dan feodalisme di Tiongkok. Manifestasi dari hal tersebut terjadi pada 1 Oktober 1949 di Lapangan Tian An Men, Mao Tse Tung secara resmi mendeklarasikan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok.²⁷⁹

278. *Ibid*, 344.

279. Imam Soedjono, *Rakyat dan Senjata: Perang Rakyat di Beberapa Negeri Asia*, (Yogyakarta: Resist Book, 2011), 138.

Revolusi Demokrasi Baru pada tahapan tertentu dan batas-batas tertentu justru akan membuka ruang bagi kapitalisme di Tiongkok untuk berkembang. Hal ini terjadi karena penyebab utama dari keterbelakangan kapitalisme di Tiongkok yaitu dominasi imperialisme dan feodalisme telah dihancurkan melalui Revolusi Demokrasi Baru. Bagi Mao, perkembangan kapitalisme di Tiongkok sampai tahapan tertentu adalah hal yang tidak terelakan lagi dari kemenangan Revolusi Demokrasi Baru. Bagi Mao, aspek perkembangan kapitalisme adalah satu segi dari kemenangan Revolusi Demokrasi Baru. Pada segi yang lain, yaitu segi yang utama dari tujuan jangka panjang Revolusi Demokrasi Baru adalah perkembangan menuju sosialisme di Tiongkok.

Pemikiran Mao tentang revolusi dua tahap meletakkan Revolusi Demokrasi Baru sebagai revolusi yang mengantarkan rakyat pada tahap yang selanjutnya yaitu Revolusi Sosialis. Dalam hal ini, Mao menjelaskan bahwa terdapat setidaknya 4 (empat) faktor yang mendorong Revolusi Sosialis di Tiongkok.²⁸⁰ *Pertama*, pasca Revolusi Demokrasi Baru Mao menyatakan bahwa akan bertambah besarnya pengaruh dan kekuatan politik proletariat dan Partai Komunis Tiongkok. Hal ini akan mengantarkannya pada pengakuan yang begitu kuat atas kepemimpinan proletariat dan Partai Komunis Tiongkok yang didapat dari kaum tani sebagai sekutu terdekatnya dan kelas borjuasi kecil lainnya, inilah faktor *kedua* menurut Mao. Faktor *ketiga* adalah telah terbangunnya ekonomi sektor negara yang dikuasai oleh republik demokratis dan pembangunan koperasi milik rakyat pekerja. *Terakhir*, adalah syarat kondisi internasional di mana

280. *bid*, 425

perjuangan revolusioner telah mengalami gelombang yang pasang. Keempat faktor inilah yang dimaksud Mao sebagai segi-segi yang penting untuk mengantarkan Revolusi Demokrasi Baru menuju tahap Revolusi Sosialis.

Revolusi Demokrasi Baru menuju Revolusi Sosialis adalah pemikiran Mao mengenai revolusi dua tahap di negeri Tiongkok. Dalam hal ini, revolusi yang bertahap tersebut mengharuskan gerakan revolusioner Tiongkok memiliki dua tugas yang ganda pula. Tugas pertama jelas adalah menjalankan perjuangan Revolusi Demokrasi Baru untuk mendirikan diktator demokrasi rakyat yang dipimpin oleh kelas proletariat Tiongkok. Sementara, pada tahap selanjutnya ketika seluruh syarat yang disiapkan telah terpenuhi, maka menurut Mao revolusi Tiongkok akan beralih menjadi Revolusi Sosialis. Kedua tahap revolusi tersebut adalah tahapan yang tanpa jeda dan tetap dipimpin oleh kelas proletariat melalui Partai Komunis Tiongkok.

Bagi Mao, menjalankan Revolusi Demokrasi Baru hingga menyelesaikannya berarti pula sedang menyusun syarat untuk mengalihkannya ketahap Revolusi Sosialis. Dalam Revolusi Sosialis, kontradiksi pokok rakyat Tiongkok akan menjadi antara kepentingan borjuasi dengan kepentingan umum kelas proletariat. Kelas borjuasi yang dimaksud bukan lagi borjuasi besar yang komprador dan monopolistik, namun borjuasi yang tersisa pasca kemenangan Revolusi Demokrasi Baru. Borjuasi yang akan dihancurkan selanjutnya adalah borjuasi sedang dan borjuasi kecil seluruh sektor. Penghancuran yang dimaksud Mao bukanlah perang yang dilakukan seperti saat menghancurkan imperialisme dan feodalisme. Perubahan yang dimaksudkan adalah dengan mendorong dan

menekan kelas-kelas borjuis yang tersisa untuk perlahan-lahan mengikut kepentingan dari kelas proletariat. Dalam tahap ini, Mao menilai bahwa tidak hanya dengan penghancuran dan perubahan secara bertahap hubungan produksinya yang akan diubah, namun begitu juga dengan politik dan kebudayaan borjuasi akan diubah. Perubahan ini bertujuan untuk membangun masyarakat sosialis berdasarkan ekonomi, politik, dan kebudayaan proletariat.

Kedua tahap revolusi tersebutlah yang kemudian dinamakan dengan revolusi dua tahap. Revolusi yang menurut pemikiran Mao merupakan revolusi yang digunakan untuk negeri-negeri jajahan, setengah jajahan setengah feodal seperti Tiongkok. Dalam menegaskan pemikirannya mengenai revolusi tersebut, Mao memiliki himbauan kepada internal Partai Komunis Tiongkok sebagai berikut:

“Tiap-tiap anggota Partai Komunis harus mengerti bahwa seluruh gerakan revolusioner Tiongkok yang dipimpin Partai Komunis Tiongkok adalah gerakan revolusioner yang sempurna yang meliputi dua tingkat, yaitu revolusi demokratis dan Revolusi Sosialis. Ini adalah dua proses revolusi yang berbeda wataknya, dan proses revolusi yang belakangan itu hanya mungkin diselesaikan bila proses revolusi yang pertama telah selesai. Revolusi Sosialis merupakan persiapan yang diperlukan bagi Revolusi Sosialis, dan Revolusi Sosialis merupakan arah perkembangan yang wajar bagi revolusi demokratis. Dan tujuan terakhir semua kaum komunis ialah berjuang sekeras-kerasnya untuk pada akhirnya mewujudkan masyarakat sosialis dan masyarakat komunis.”²⁸¹

Kedua tahap revolusi tersebut harus mampu dipahami secara komprehensif, baik perbedaan maupun kesalinghubungannya.

281. *Ibid*, 426

6.2 Pemikiran Politik Mao Tse Tung tentang Revolusi Dua Tahap untuk Pembangunan Sosialisme di Tiongkok: Dari Berdirinya Negara Republik Rakyat Tiongkok hingga Pembangunan Sosialisme

Pemikiran Mao tse tung tentang revolusi dua tahap merupakan pemikiran tentang revolusi di negara-negara setengah jajahan setengah feodal. Revolusi dua tahap adalah revolusi yang memiliki dua aspek, pertama adalah Revolusi Demokrasi Baru, kemudian tanpa jeda akan menuju Revolusi Sosialis. Perspektif Revolusi Demokrasi Baru adalah sosialisme. Antara Revolusi Demokrasi Baru dan Revolusi Sosialis memiliki irisan yang sangat dekat. Dalam hal ini, irisan tersebut terjadi karena Revolusi Demokrasi Baru juga membangun prasyarat untuk menuju sosialisme. Artinya, Revolusi Demokrasi Baru bagi Mao adalah ‘pintu gerbang’ menuju pembangunan negeri Tiongkok yang sosialis.

Revolusi Demokrasi Baru merupakan perubahan seluruh aspek kehidupan masyarakat Tiongkok. Sistem sosial Tiongkok yang setengah jajahan setengah feodal menjadi sasaran utama perubahannya. Dalam hal ini, untuk mewujudkan semua itu, terlebih dahulu Revolusi Demokrasi Baru harus menghancurkan imperialisme, feodalisme, kekuatan reaksioner dalam negeri dan komprador-kompradornya. Dalam perkembangan akhir dari Revolusi Demokrasi Baru, kekuatan revolusioner melalui Partai Komunis Tiongkok harus mampu menggulingkan kekuasaan pemerintahan reaksioner dan mendirikan pemerintahan yang baru. Pemerintahan yang didirikan merupakan pemerintahan yang demokratis. Dalam pemikiran Mao, Revolusi Demokrasi Baru harus melahirkan

pemerintahan rakyat, pemerintahan yang oleh Mao disebut Republik Rakyat Tiongkok.

Republik Rakyat Tiongkok merupakan negara yang dipimpin bersama oleh kelas-kelas yang terlibat aktif dalam revolusi. kepemimpinan ini tentunya dilandasi oleh ideologi, politik kelas proletariat. Dengan demikian watak dari republik yang dibangun dari Revolusi Demokrasi Baru adalah diktator demokrasi rakyat. Hanya dengan bentuk dan watak yang demikianlah revolusi di Tiongkok dapat maju ketahap Revolusi Sosialis dan secara langsung membangun Tiongkok menjadi negeri sosialis.

6.2.1 Berdirinya Negara Diktator Demokrasi Rakyat Tiongkok

1 Oktober 1949 adalah momentum berdirinya Republik Rakyat Tiongkok. Hal ini tentunya merupakan suatu lompatan sejarah dalam perkembangan masyarakat Tiongkok. Dalam hal ini, rakyat Tiongkok juga telah membuktikan perjuangan panjangnya akhirnya mampu melikuidasi sepenuhnya sistem setengah jajahan setengah feodal. Revolusi Demokrasi Baru menghasilkan sebuah negara Tiongkok yang baru. Hasil yang diraih ini tidak terlepas dari andil Mao Tse Tung. Andil Mao dalam revolusi Tiongkok terdapat pada pemikiran dan kepemimpinannya.

Dalam serentetan pemikirannya, salah satu yang terbesar adalah mengenai akhir dari Revolusi Demokrasi Baru, yaitu berdirinya negara Republik Rakyat Tiongkok. Bagi Mao, dalam melanjutkan revolusi Tiongkok dan sampai pada tahap sosialisme, terlebih dulu proletariat Tiongkok harus membangun suatu

negara. Negara baru yang mewakili kelas-kelas tertindas adalah yang akan menjadi ‘motor’ penggerak Revolusi Sosialis.

Pemikiran Mao tentang negara dan bentuk negara berdasar pada perkembangan konsep tentang negara. Mao mengklasifikasikan ke dalam tiga konsep tentang negara. Klasifikasi Mao ini berlandaskan dengan watak kelas yang menguasainya. Dalam hal ini, Mao membagi tiga sistem negara, yaitu republik diktator borjuis, republik diktator proletariat, dan republik diktator bersama dari beberapa kelas revolusioner.

Republik diktator borjuis ialah sistem negara yang dianut oleh negara-negara yang dikuasai oleh kapitalis. Dalam hal ini, struktur negara yang ada dikuasai oleh borjuasi dan diabdikan untuk kepentingannya. Sistem ini menurut Mao dapat berubah bentuk sewaktu-waktu menjadi diktator militer yang fasis. Kolaborasi kepemimpinan antara tuan tanah besar dan borjuasi besar juga diklasifikasikan oleh Mao masuk dalam sistem ini.²⁸²

Sistem yang kedua yaitu republik diktator proletariat merupakan sistem yang sedang bangkit dan dibangun oleh Uni Soviet. Kelas proletariat merupakan unsur termaju dan terbanyak dalam mengisi struktur negara. Tujuan utamanya adalah menjaga sistem tersebut agar tidak mengalami restorasi kapitalisme. Diktator proletariat merupakan jembatan untuk menuju masyarakat komunis.

Dalam pemikirannya, Mao fokus pada bentuk sistem negara republik diktator bersama. Sistem tersebutlah yang menurut Mao merupakan karakter dari negara setengah jajahan setengah feodal. Sistem tersebut merupakan sistem

282. Mao Tse Tung, *Pilihan Karja Mao Tse Tung Djilid II*, (Peking: Komisi Penerbitan Bahasa Asing Komite Central Partai Komunis Tiongkok, 1965), 454.

peralihan dari republik diktator bersama antara tuan tanah besar dan borjuasi besar menjadi diktator bersama beberapa kelas revolusioner. Tujuannya ialah beralih menjadi republik diktator proletariat melalui Revolusi Sosialis. Pemikiran Mao ini bertujuan untuk menggantikan demokrasi tipe lama yang dimonopoli oleh satu kelas, yaitu borjuasi menjadi demokrasi yang baru. negara dalam pemikiran Mao ini akan menjadi wadah bagi seluruh kepentingan kelas-kelas revolusioner. Kekuatan kontra revolusioner dari kelas dan golongan manapun tidak diperkenankan masuk atau terlibat dalam sistem negara tersebut. Hal ini juga berlaku dalam sistem pemerintahan demokrasi baru.

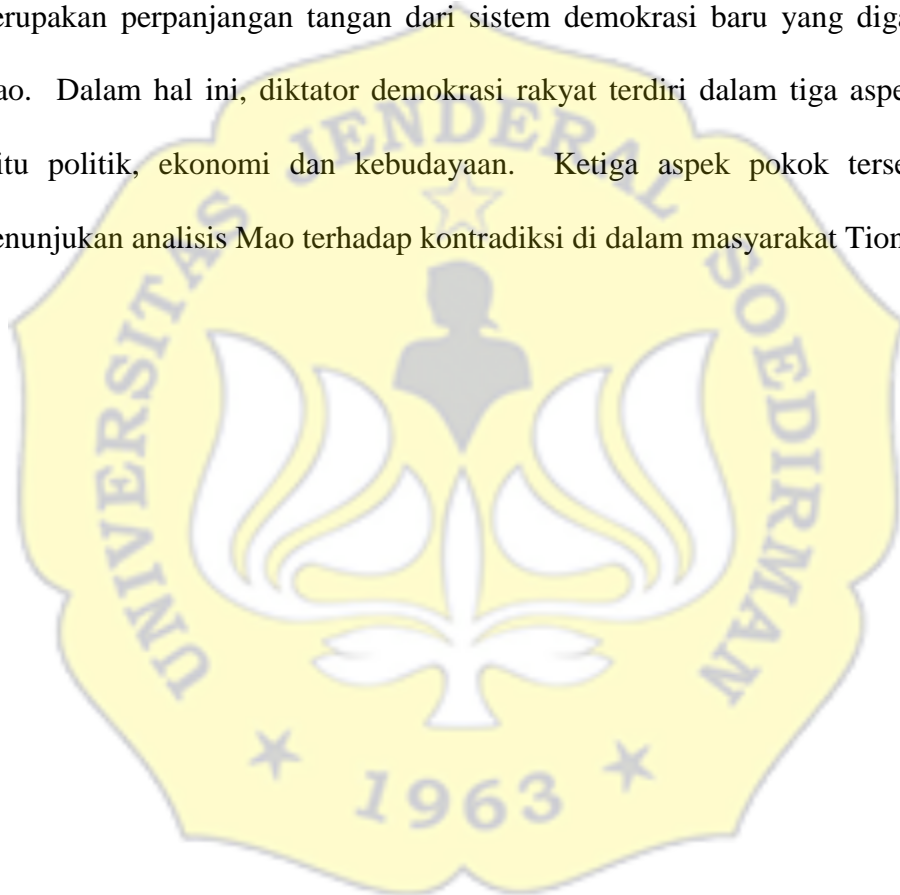
Sistem pemerintahan menurut Mao merupakan bentuk dari struktur kekuasaan politik, keterlibatan kelas-kelas revolusioner dalam aparatur negara. Berkaitan dengan mekanisme sistem pemerintahan, Mao menuliskannya:

“Tiongkok sekarang dapat mengambil sistem kongres rakyat, dari kongres rakyat nasional sampai pada kongres-kongres rakyat provinsi, kabupaten, kewedanaan dan kecamatan, dan kongres rakyat dari semua tingkat memilih badan pemerintah masing-masing. Tetapi hanya bila dilaksanakan sistem pemilihan yang sungguh-sungguh umum dan sama tanpa memandang jenis kelamin, kepercayaan, harta milik atau pendidikan, barulah sistem itu bisa sesuai dengan kedudukan berbagai kelas revolusioner di dalam negara, sesuai untuk menyatakan kemauan rakyat dan memimpin perjuangan revolusioner, dan sesuai dengan semangat demokrasi baru. Sistem demikian ialah sentralisme-demokratis.”²⁸³

Dalam hal ini, sistem pemerintahan sentralisme demokrasi bertujuan untuk menjaga semangat dan prinsip-prinsip demokrasi baru. Sistem tersebut menurut Mao juga akan menghindari keterlibatan kelompok kontra revolusioner untuk terlibat dalam pemerintahan rakyat Tiongkok.

283. *Ibid*, 456

Berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada 1 Oktober 1949 menandakan suatu era baru. Sistem sosial dan politik Tiongkok telah berubah. Revolusi Demokrasi Baru dengan ini telah mencapai kemenangannya yang pertama. Dalam momentum ini pulalah Mao mengemukakan tentang pentingnya untuk membangun sistem diktator demokrasi rakyat. Diktator demokrasi rakyat merupakan perpanjangan tangan dari sistem demokrasi baru yang digagas oleh Mao. Dalam hal ini, diktator demokrasi rakyat terdiri dalam tiga aspek pokok, yaitu politik, ekonomi dan kebudayaan. Ketiga aspek pokok tersebut juga menunjukkan analisis Mao terhadap kontradiksi di dalam masyarakat Tiongkok.





GAMBAR 14. Lambang Negara Republik Rakyat Tiongkok yang Diresmikan Pada 18 Juni 1950

Mao mengemukakan dalam aspek yang pertama, yaitu politik demokrasi baru. Dalam sistem demokrasi baru, Mao menggagas lahirnya sebuah sistem diktator demokrasi rakyat. Mao pertama kali menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan rakyat. Bagi Mao, kemenangan Revolusi Demokrasi Baru menjadikan rakyat sebagai bagian yang revolusioner. Artinya, Mao menyebut rakyat untuk merujuk pada kelas-kelas yang dalam analisisnya dan keterlibatannya dalam revolusi. Mengenai ini, Mao memaparkan argumentasinya lebih lanjut:

“Di Tiongkok dan pada tingkat sekarang, rakyat adalah kelas buruh, kelas tani, borjuasi kecil kota, dan borjuasi nasional. Di bawah pimpinan kelas buruh dan Partai Komunis, kelas-kelas ini bersatu untuk membentuk negaranya sendiri, memilih pemerintahannya sendiri, menjalankan diktator atau kediktatoran terhadap kakitangan-kakitangan imperialisme, kelas tuan tanah, borjuasi birokrat, dan orang-orang yang

mewakili kelas-kelas tersebut, yaitu kaum reaksioner Kuomintang beserta pembantu-pembantu jahatnya.”²⁸⁴

Pemikiran Mao yang demikian mencerminkan pandangan umum dari Marxisme-Leninisme tentang negara. Bagi Marxisme-Leninisme, negara dan seluruh alat kekuasaannya merupakan alat kelas berkuasa untuk menindas kelas lain. Mao berangkat dari definisi ini bahwa negara pada masa demokrasi baru adalah alat kelas revolusioner.

Negara Tiongkok yang dalam kurun waktu sebelum Revolusi Demokrasi Baru adalah alat dari tuan tanah dan borjuasi besar untuk menindas rakyat, bagi Mao harus diubah. Negara dengan diktator demokrasi rakyat adalah negara yang berbalik menindas dan memaksa kelas-kelas kontra revolusioner untuk tunduk. Dalam negara diktator demokrasi rakyat, Mao menegaskan hanya rakyat yang diberikan hak demokrasi. Bagi para kelas kontra revolusioner yang berada dalam negeri Tiongkok, sistem yang digunakan adalah diktator, yaitu memaksa kelas tersebut untuk tunduk pada kekuasaan rakyat.

Dalam aspek kediktatoran rakyat, Mao membedakannya dengan konsep dan praktik dari diktator borjuis baik yang demokratis maupun militeristik. Dalam diktator negara borjuis, kediktatoran dimonopoli oleh satu atau segelintir kelas yang berkuasa. Artinya minoritas menindas mayoritas besar rakyat. Hal ini adalah berkebalikan dari sistem diktator demokrasi rakyat. Dalam perspektif ini Prof. Wertheim seorang peneliti asal Belanda mengemukakan pendapatnya tentang Tiongkok yang menjalankan ideologi Marxisme-Leninisme:

284. Mao Tse Tung, *Pilihan Karja Mao Tse Tung Djilid IV*, (Peking: Komisi Penerbitan Bahasa Asing Komite Central Partai Komunis Tiongkok, 1967), 499.

“rezim-rezim seperti itu mempunyai sifat-sifat diktatorial, tetapi ideologi Marxis maupun gaya yang dengannya revolusi sosial itu dijalankan telah memberikan kesempatan-kesempatan yang lebih baik daripada yang ditawarkan oleh suatu kediktatoran militer, yaitu mempunyai suara dalam urusan-urusan politik.”²⁸⁵

Dalam hal ini, Wertheim ingin mengemukakan pendapatnya bahwa ada kecenderungan sistem yang lebih demokratis di Tiongkok terutama mengenai partisipasi rakyatnya.

Mengenai perbedaan gagasan diktatornya dengan diktator borjuasi, Mao menekankan bahwa Republik Rakyat Tiongkok akan melindungi segenap rakyatnya. Salah satu tujuan berdirinya dan tugas pasca berdirinya negara republik diktator demokrasi rakyat adalah mendidik rakyat. kerja pendidikan dan propaganda harus terus dilakukan oleh negara. Tujuan dari semua itu adalah untuk menanamkan perspektif baru dalam bernegara dan bermasyarakat. Dalam hal ini, lebih lanjut Mao menulis dalam karyanya:

“Cara yang kita gunakan dalam hal ini adalah cara demokratis, yaitu cara meyakinkan dan bukan cara memaksa. Apabila di kalangan rakyat ada yang melanggar undang-undang, ia juga akan dihukum, dipenjarakan atau bahkan dihukum mati; tetapi ini adalah beberapa kejadian yang khusus dan berbeda secara prinsipil dengan diktator yang dilakukan terhadap kelas reaksioner sebagai kelas.”²⁸⁶

Lebih lanjut Mao memaparkan bagaimana sikap negara diktator demokrasi rakyat kepada golongan reaksioner dan kontra revolusioner:

“... mengenai orang-orang dari kelas-kelas reaksioner dan golongan-golongan reaksioner, setelah kekuasaan politik digulingkan, asal saja mereka tidak berontak, tidak mensabot dan tidak mengacau, dapat

285. W.F. Wertheim, *Dunia Ketiga, dari dan Ke Mana: Negara Protektif Versus Pasar Agresif*, terj. Oey Hay Djoen. (Yogyakarta: Oey's Renaissance, 1997), 145.

286. Mao Tse Tung, *Pilihan Karja Mao Tse Tung Djilid IV*, (Peking: Komisi Penerbitan Bahasa Asing Komite Central Partai Komunis Tiongkok, 1967), 500.

hidup dan mengubah diri menjadi manusia baru melalui kerja badan. Apabila mereka tidak mau bekerja, maka negara rakyat akann memaksa mereka bekerja. Pekerjaan propaganda dan pendidikan juga akan dilakukan terhadap mereka, bahkan akan dilakukan dengan sangat seksama dan sepenuhnya sebagaimana telah kita lakukan terhadap opsir-opir tawanan.”²⁸⁷

Negara diktator demokrasi rakyat merupakan bentuk negara satu-satunya yang bisa melakukan tugas-tugas demikian. Menjalankan politik kelas proletariat hanya bisa dilakukan melalui sistem demokrasi baru dan hanya dengan inilah Tiongkok mampu beralih dari demokrasi baru menuju sosialisme. Dalam sistem demokrasi baru, aspek politik tidak akan dapat berjalan tanpa perubahan mendasar dalam aspek ekonomi Tiongkok.



GAMBAR 15. Bendera Republik Rakyat Tiongkok

Berdirinya negara diktator demokrasi rakyat berarti juga menandakan suatu perubahan sistem ekonomi Tiongkok. Prinsip-prinsip dalam demokrasi baru

287. *Ibid*, 500.

menurut Mao harus pula tercermin dalam hal ekonomi. Dalam prinsipnya, ekonomi Tiongkok demokrasi baru adalah peran dominan negara rakyat untuk menguasai sektor-sektor ekonomi yang berkaitan langsung dengan kehidupan rakyat banyak. Perusahaan, sektor agraria, pertambangan, industri, dan bank-bank akan dikuasai oleh negara. Hal ini menurut Mao akan mendorong lebih cepatnya peralihan ekonomi menuju sistem sosialisme. Mengenai ini, baiknya dikutip penjelasan Mao tentang ekonomi demokrasi baru dalam tulisannya sebagai berikut:

“Di dalam republik demokrasi baru di bawah pimpinan proletariat, ekonomi sektor negara bersifat sosialis dan merupakan kekuatan memimpin dalam seluruh ekonomi nasional, tetapi republik ini tidak akan mensita tanah milik perseorangan kapitalis umumnya ataupun melarang perkembangan produksi kapitalis yang tidak ‘menguasai kehidupan rakyat’, sebab ekonomi Tiongkok masih sangat terbelakang.”²⁸⁸

Tujuan utama dari ekonomi demokrasi baru ialah menghancurkan sistem monopoli baik alat produksi maupun tanah yang dilakukan oleh borjuasi besar maupun tuan tanah.

Negara yang didirikan ini bertujuan untuk mengontrol modal dan melakukan pendistribusian tanah kepada kaum tani. Kontrol terhadap modal adalah upaya nyata untuk menghancurkan sistem monopoli yang telah dibangun oleh imperialisme bersama dengan borjuasi besar komprador. Hal ini harus dilakukan menurut Mao untuk menghancurkan sistem monopoli dan membatasi

288. Mao Tse Tung, *Pilihan Karja Mao Tse Tung Djilid II*, (Peking: Komisi Penerbitan Bahasa Asing Komite Central Partai Komunis Tiongkok, 1965), 457.

ruang gerak borjuasi. Dalam hal ini, negara berhak untuk menentukan sektor-sektor ekonomi mana saja yang dikelola oleh swasta.



GAMBAR 16. Mao Tse Tung Sedang Membacakan Deklarasi Republik Rakyat Tiongkok pada 1 Oktober 1949

Dalam aspek agraria, konsep penyamarataan hak milik tanah dalam pemikiran Mao bertujuan untuk menghapuskan sistem feodalisme di pedesaan. Dalam hal ini, keberadaan tani kaya di desa dalam syarat-syarat tertentu diperbolehkan. Perhatian besar Mao lebih pada sektor agraria, pasalnya Mao menyadari bahwa kaum tani sesungguhnya adalah kelas borjuasi kecil. Watak kaum tani bagi Mao akan lebih sulit untuk didorong menerima sistem kolektif sosialisme. Mengenai hal ini, Mao memandang bahwa kondisi kaum tani harus terus diperhatikan. Pembangunan koperasi dan penyediaan pasar oleh negara menjadi penting untuk mendidik kaum tani. Keseriusan perhatian Mao dalam masalah kaum Tani tercermin dari tulisannya:

“Masalah yang serius ialah mendidik kaum tani. Ekonomi kaum tani terpecar-pencar, dan menurut pengalaman Uni Soviet, sosialisasi pertanian memerlukan waktu yang lama dan pekerjaan yang seksama. Tanpa sosialisasi pertanian tidak akan ada sosialisme yang sempurna dan kokoh.”²⁸⁹

Sistem pertanian yang kokoh adalah dasar bagi pembangunan negara Tiongkok. Dengan demikian mendidik dan mendorong kaum tani secara bertahap adalah jawaban untuk meningkatkan hasil produksi pertanian.

Dalam melahirkan suatu bangunan perekonomian yang kuat dalam Republik Rakyat Tiongkok, Mao menegaskan tugas demikian bukan semata-mata hanya diemban oleh kaum tani dan kelas buruh. Mao menghendaki seluruh elemen kelas-kelas revolusioner, tentara pembebasan rakyat, maupun badan-badan pemerintah melakukan kerja produksi bersama. Dalam hal ini, sudah sejak sebelum kemenangan Revolusi Demokrasi Baru Mao memberikan seruan-seruan tentang kerja ekonomi produksi. Tujuan dari hal tersebut adalah untuk melakukan kerja ekonomi produksi yang mandiri dan melibatkan massa yang luas. Sebagai contoh misalkan apa yang dituliskan Mao pada tahun 1945:

“Pasukan-pasukan di Daerah Perbatasan jasanya lebih besar lagi. Banyak pasukan sudah swasembada seluruhnya dalam hal bahan makanan, pakaian, selimut dan barang-barang lainnya, artinya sasembada 100% dan tidak menerima sesuatu apapun dari pemertintah.”²⁹⁰

Manifestasi dari perjuangan ekonomi di pedesaan adalah perihal *Land Reform* dan penurunan sewa tanah. Kedua hal ini adalah bentuk konkret dari

289. Mao Tse Tung, *Pilihan Karja Mao Tse Tung Djilid IV*, (Peking: Komisi Penerbitan Bahasa Asing Comite Central Partai Komunis Tiongkok, 1967), 501.

290. Mao Tse Tung, *Pilihan Karja Mao Tse Tung Djilid III*, (Peking: Komisi Penerbitan Bahasa Asing Comite Central Partai Komunis Tiongkok, 1967), 246.

revolusi agraria yang merupakan ‘roh’ dari Revolusi Demokrasi Baru. Gerakan penurunan sewa tanah terutama ditujukan untuk mendidik kaum tani membangun perjuangan massa yang lebih baik. Selain itu, perjuangan penurunan sewa tanah adalah upaya dari kaum tani di bawah pimpinan Partai Komunis Tiongkok untuk mencapai kemenangan tahap awal melawan tuan tanah.

Badan-badan Partai Komunis Tiongkok harus mampu mendorong terlaksananya program penurunan sewa tanah dan pendistribusian tanah. Partai harus mampu mendesak tuan tanah dan tani kaya untuk menurunkan sewa tanah, selain itu mendorong kaum tani untuk meningkatkan produktifitas pertanian. Mengenai ini, Mao lebih lanjut menekankan pada seluruh pimpinan dan anggotanya Partai Komunis Tiongkok dalam tulisannya:

“Dalam masalah keuangan dan ekonomi, personil Partai dan pemerintah di kabupaten dan kewedanaan harus mencurahkan 90% tenaganya untuk membantu kaum tani meningkatkan produksinya, dan selanjutnya menggunakan 10% tenaganya untuk memungut pajak dari kaum tani.”²⁹¹

Selanjutnya, Mao menekankan pentingnya untuk mendidik rakyat untuk selalu belajar menghidupi dirinya sendiri dan bekerjasama:

“... di semua tempat harus diadakan kursus-kursus yang berjangka untuk 7 sampai 10 hari, seperti kursus menanam sayur, kursus memiara babi dan kursus juru masak untuk menyempurnakan makanan. Penghematan harus diperhatikan, pemborosan harus ditentang dan korupsi harus dilarang di semua badan partai, jawatan pemerintah dan instansi militer.”²⁹²

Penekanan ini terutama ditujukan Mao untuk Partai Komunis Tiongkok dan badan pemerintahan yang berada dalam daerah kekuasaan Tiongkok..

291. *Ibid*, 171.

292. *Ibid*, 171.

Dalam rangka mendirikan sebuah negara yang demokratis, sebuah negara yang diktator demokrasi rakyat, maka penting untuk menghancurkan seluruh sistem feodal di pedesaan. Menurut pemikiran Mao, cara utama untuk menghancurkan feodalisme adalah memangkas sistem monopoli terhadap tanah. Konkretnya, Mao mengeluarkan gagasan untuk melaksanakan *Land Reform*. Petunjuk dan seruan mengenai perjuangan *Land Reform* telah dinyatakan jauh sebelum kemenangan Revolusi Demokrasi Baru. Pada periode pertama perang dalam negeri Tiongkok, kaum tani sebenarnya sudah melakukan berbagai perjuangan *Land Reform*. Dalam hal ini, perjuangan tersebut masih bersifat kecil dan tidak menyeluruh. Barulah pada tahun 1948, menjelang kemenangan Revolusi Demokrasi Baru Mao mengeluarkan seruan untuk dilaksanakan di seluruh negeri.

Dalam pemikirannya mengenai perjuangan *Land Reform*, Mao menekankan pentingnya menganalisis kondisi kelas di pedesaan untuk mampu menetapkan status kelas dengan tepat. Bagi Mao, setelah analisis tersebut selesai barulah Partai Komunis Tiongkok harus mampu membimbing kaum tani untuk membagikan tanah-tanah feodal dan harta milik feodal. Dalam pemikiran Mao, terdapat 4 (empat) tahapan inti untuk mewujudkan *Land Reform* dalam rangka membangun ekonomi demokrasi baru. *Pertama*, membagikan tanah dan harta milik feodal di pedesaan. *Kedua*, memberikan surat keterangan kepemilikan tanah. *Ketiga*, mengatur kembali atau mengubah tarif pajak pertanian. Penetapan tarif pajak pertanian harus disesuaikan dengan kepentingan dan kondisi umum kaum tani. Hal ini akan menentukan peningkatan semangat kaum tani dalam

melakukan produksi pertanian. *Keempat*, membentuk organisasi-organisasi dan badan koperasi yang sukarela. Metode ini ditopang dengan penyediaan benih, pupuk, dan bahan bakar, membuat perencanaan produksi, memberikan kredit pertanian dalam bentuk alat produksi, hingga pembangunan saluran irigasi.²⁹³

Dengan pembaharuan dalam aspek politik dan ekonomi yang berperspektif demokrasi baru, Tiongkok yang baru menunjukkan perbedaan-perbedaan signifikan baik dalam kenegaraan, partisipasi, hingga kesejahteraan rakyatnya. Khusus dalam aspek ekonomi, gaya pembangunan negara Mao adalah dengan memaksimalkan sektor pertanian di desa. Dalam hal ini, Wertheim dalam tulisannya mengenai Tiongkok mengungkapkan:

“Investasi negara dalam konservasi air mengambil suatu bagian besar dari anggaran ekonomi (8 hingga 10%) di tahun 1950 dan 1951; investasi-investasi itu bertahan pada tingkat yang cukup konstan (400-500 juta yuan) selama 1952-1955. Walaupun banjir-banjir besar tahun 1954 mengharuskan diversifikasi dana investasi reparasi-reparasi besar-besaran. Tahun-tahun 1956 dan 1957 menyaksikan suatu peningkatan mutlak dalam investasi konservasi air dan pada tahun 1958 suatu peningkatan tajam terjadi ke suatu tingkat yang dipertahankan hingga 1960.”²⁹⁴

Pemaparan Wertheim ini memperkuat argumentasi pemikiran Mao tentang kepedulian negara yang ekstra bagi kaum tani.

Dalam melaksanakan sistem ekonomi demokrasi baru, Mao tidak pernah terpaku dalam satu contoh konsep, sekalipun itu Uni Soviet. Mao memandang bahwa negeri Tiongkok tidak memiliki cukup syarat untuk

293. Mao Tse Tung, *Pilihan Karja Mao Tse Tung Djilid IV*, (Peking: Komisi Penerbitan Bahasa Asing Komite Central Partai Komunis Tiongkok, 1967), 303-304.

294. W.F. Wertheim, *Dunia Ketiga, dari dan Ke Mana: Negara Protektif Versus Pasar Agresif*, terj. Oey Hay Djoen. (Yogyakarta: Oey's Renaissance, 1997), 55.

melakukan pembangunan industri dan mekanisasi pertanian secara cepat seperti Uni Soviet. Mao memandang bahwa keterbelakangan ekonomi Tiongkok telah memaksa negara untuk sabar dan perlahan mengubah sistem ekonominya. Bagi Mao, kaum tani harus selalu diberikan contoh betapa baik dan bermanfaatnya ekonomi demokrasi baru bagi kehidupannya. Hal ini akan merangsang kaum tani untuk menerima program-program ekonomi demokrasi baru menuju sosialisme.

Pada tahun 1950 misalkan, pasca terjadinya *Land Reform* kaum tani mulai menguasai dan mengelola tanah-tanah milik tuan tanah. Pada tahun tersebut, perkebunan-perkebunan buah milik tuan tanah juga dikelola kembali oleh kaum tani. Hasilnya signifikan, pada 1955 buah-buahan hasil produksi mencapai jumlah 40 ton.²⁹⁵ Menyadari bahwa perbaikan nasib semakin menjadi kenyataan pasca *Land Reform*, kaum tani Tiongkok menjadi sadar akan keuntungan untuk mengikuti program negara dan Partai Komunis Tiongkok.

Politik dan ekonomi demokrasi baru tidaklah cukup untuk memperteguh berdirinya negara diktator demokrasi rakyat Republik Rakyat Tiongkok. Dalam pemikiran Mao, ada aspek lain yaitu aspek kebudayaan demokrasi baru. Negeri Tiongkok yang setengah jajahan setengah feodal membuat kebudayaan rakyat Tiongkok terbelakang. Dalam hal ini, Mao menyampaikan data hasil investigasinya bahwa dari 1.500.000 orang penduduk daerah perbatasan Shensi-Kansu-Ningsia masih terdapat 1.000.000 orang yang

295. *Ibid*, 57.

buta huruf.²⁹⁶ Massa yang luas masih dipengaruhi oleh tahayul-tahayul zaman feodal.

Republik Rakyat Tiongkok harus mampu merubah kebudayaan lama menjadi kebudayaan demokrasi baru. Dalam pemikiran Mao, kebudayaan Tiongkok haruslah berupa kebudayaan yang ilmiah, kebudayaan yang lahir dari kehidupan objektif rakyat Tiongkok. Dalam rangka mengaplikasikan perubahan kebudayaan Mao menuliskannya:

“... di bidang pendidikan, kita harus mempunyai tidak saja sekolah dasar dan sekolah menengah yang terpusat dan reguler, tetapi juga sekolah-sekolah desa yang terpencar dan tidak reguler, regu-regu pembaca surat kabar, dan kursus-kursus pemberantasan buta huruf. Kita tidak saja harus mempunyai sekolah modern, tetapi juga harus menggunakan dan merombak sekolah model kuno di desa.”²⁹⁷

Perubahan besar kebudayaan juga berlaku bagi kesenian dan kesusastraan Tiongkok. Dongeng-dongeng dan pertunjukan masa lalu yang melegitimasi kebudayaan feodal dan tertindas harus dihapuskan. Seni dan sastra Tiongkok harus mencerminkan semangat perjuangan revolusioner. Bagi Mao, hal yang terpenting dalam seni dan sastra selain unsur estetika adalah unsur realita untuk mendidik. Pesan yang disampaikan oleh seni dan sastra harus objektif dan mampu membangkitkan dan mendidik rakyat.

Melalui ketiga aspek, mulai dari politik, ekonomi, dan kebudayaan demokrasi baru-lah Republik Rakyat Tiongkok mampu berdiri tegak. Ketiga aspek tersebut bukan merupakan produk kebijakan baru pasca kemenangan Revolusi Demokrasi Baru. Seluruh aspek tersebut telah dilaksanakan dan

296. Mao Tse Tung, *Pilihan Karja Mao Tse Tung Djilid III*, (Peking: Komisi Penerbitan Bahasa Asing Komite Central Partai Komunis Tiongkok, 1967), 237.

297. *Ibid*, 238.

dipupuk secara bertahap oleh Partai Komunis Tiongkok di daerah-daerah basis kekuasaannya. Dengan demikian, lahirnya negara yang berwatak diktator demokrasi rakyat Tiongkok adalah perkembangan dari pembangunan sistem-sistem yang demikian di desa-desa Tiongkok sejak dulu.

Dalam pemikiran Mao, kemenangan gerakan revolusioner melawan musuh-musuh rakyat dengan ditandai berdirinya Republik Rakyat Tiongkok bukanlah akhir dari perjuangan. Ibarat *Long March*, Mao mengistilahkan bahwa apa yang telah dicapai dari Revolusi Demokrasi Baru adalah *Long March* tahap pertama dan masih menyisakan jalan terjal yang begitu jauh. Mao ingin menyatakan bahwa kemenangan Revolusi Demokrasi Baru akan dilanjutkan ketahap selanjutnya yaitu Revolusi Sosialis.

6.2.2 Pembangunan Sosialisme di Tiongkok: Dari Revolusi Agraria, Pembangunan Industri Nasional, hingga Revolusi Besar Kebudayaan Proletariat

Revolusi dua tahap adalah rangkaian dari Revolusi Demokrasi Baru dan Revolusi Sosialis. Dalam pemikiran Mao, Revolusi Demokrasi Baru adalah pintu gerbang menuju revolusi dan pembangunan sosialisme di Tiongkok. Kemenangan Revolusi Demokrasi Baru pada 1 Oktober 1949 menandakan suatu kemenangan besar perlawanan rakyat untuk menghancurkan imperialisme dan feodalisme. Revolusi Demokrasi Baru melahirkan syarat-syarat untuk menuju perubahannya ke sosialisme. Dalam pemikiran Mao, terdapat 3 aspek utama

untuk menuju pembangunan sosialisme, yaitu revolusi agraria, pembangunan industri Tiongkok dan revolusi besar kebudayaan proletariat.

Revolusi agraria adalah bentuk nyata dan substansial dari Revolusi Demokrasi Baru. Revolusi agraria merupakan revolusi untuk menghancurkan basis sosial feodalisme di pedesaan. Penghancuran ini sekaligus sebagai bentuk penghancuran dari struktur utama penopang keberadaan imperialisme di Tiongkok. Dalam hal ini, revolusi memiliki andil yang sangat penting bagi Revolusi Demokrasi Baru menuju sosialisme.

Revolusi agraria dimulai dengan rentetan pemberontakan besar di desa-desa antara tahun 1924 sampai 1927. Pada periode ini terjadi pula momentum besar “Ekspedisi ke Utara” yang bertujuan untuk menghimpun seluruh Tiongkok ke dalam republik. Momentum tersebut digunakan oleh Partai Komunis Tiongkok untuk mendidik dan mengagitasi kaum tani untuk melakukan perjuangan di desa melawan tuan-tuan tanah. Pemberontakan yang dilakukan oleh kaum tani diorganisasikan melalui serikat-serikat tani. Sasaran dari pemberontakan terutama adalah tuan-tuan tanah dan kebudayaan feodal di desa. Dari sinilah kemudain lahir semboyan “Semua Kekuasaan untuk Serikat Tani”.²⁹⁸ Hal ini terjadi karena kekuasaan dan hak-hak istimewa kaum feodal yang telah ribuan tahun ada telah dihancurkan.

Perkembangan perjuangan kaum tani khususnya terjadi di Provinsi Hunan, tempat pertama Mao mengorganisasikan dan memimpin perjuangan kaum tani. Pada periode revolusioner, perkembangan serikat-serikat tani maju dengan

298. Mao Tse Tung, *Pilihan Karja Mao Tse Tung Djilid I*, (Peking: Komisi Penerbitan Bahasa Asing Komite Central Partai Komunis Tiongkok, 1965), 30.

pesat. Dalam penelitiannya di desa, Mao menyampaikan bahwa pada tahun 1926 sampai pertengahan tahun 1927, anggota serikat tani hanya 300.000-400.000 orang. Satu tahun setelahnya, keanggotaanya berkembang menjadi 2 juta orang yang mampu memimpin 10 juta orang massa di bawahnya.²⁹⁹ Pertambahan yang sangat signifikan ini menjadikan perjuangan kaum tani dalam melancarkan revolusi agraria semakin membuahkan hasil. Mengenai hasil awal perjuangan revolusi agraria, Mao menyatakan dalam tulisannya:

“... di bawah kekuasaan serikat tani itu, larilah gembong lalim setempat dan ningrat jahat, yang kelas satu lari ke Shanghai, yang kelas dua lari ke Hankhou, yang kelas tiga lari ke Changsa, yang kelas empat ke kota-kota kabupaten, sedang yang kelas lima dan yang lebih rendah lagi, yaitu kelas kambing, menyerah kepada serikat tani di desa-desa.”³⁰⁰

Penjelasan Mao tersebut mengarah pada betapa dahsyatnya gelombang pasang revolusi agraria dalam menghancurkan struktur feodalisme. Kemajuan dalam perjuangan ini tidak terlepas dari peran Partai Komunis Tiongkok yang mendidik dan mengorganisasikan kaum tani.

Perjuangan revolusioner kaum tani masih terus berkembang dalam melancarkan revolusi agraria. Revolusi agraria melakukan penghancuran kekuasaan politik tuan-tuan tanah di pedesaan dengan berbagai kebijakan serikat. Serikat tani dengan giat melakukan hukuman bagi para tuan tanah yang kejam dan korup. Hukuman yang diberikan berbeda-beda sesuai dengan kadar kesalahan yang dinilai oleh serikat tani, mulai dari teguran ringan, denda, penjara, hingga hukuman tembak mati.

299. *Ibid*, 29.

300. *Ibid*, 30.

Penggulingan dan pengambialihan kekuasaan terus berkembang semakin luas. Serikat tani tidak hanya mampu menguasai pedesaan, namun menurut Mao serikat petani secara bertahap bergerak menggulingkan kekuasaan kewedanaan, kecamatan, hingga kabupaten.³⁰¹ Dalam hal ini, penggulingan kekuasaan feodalisme dan kaki tangannya juga ditentukan oleh keberhasilan serikat tani mengalahkan pasukan bersenjata milik tuan tanah. Kemenangan ini menimbulkan dampak besar pada sistem hukum dan demokratisasi di pedesaan.

Di segala tingkatan daerah, tidak lagi dikenal dengan pengadilan negara. Pengadilan negara digantikan oleh pengadilan bersama yang berkomposisikan kepala daerah dan perwakilan dari organisasi revolusioner setempat.³⁰² Segala perkara diputuskan melalui media tersebut, dengan sendirinya menggantikan peranan dari pengadilan dan hakim-hakim lama yang ada. Dalam hal ini, Mao memandang bahwa salah satu keberhasilan dari serikat tani adalah mendorongnya peningkatan demokrasi di pedesaan.

Menurut Mao, menggulingkan kekuasaan politik di desa merupakan langkah awal yang penting bagi revolusi. Mao memandang bahwa tanpa pengambilalihan kekuasaan di desa maka sulit untuk menjalankan ekonomi dan sistem kebudayaan demokrasi baru. Hasil dari perjuangan penghancuran struktur politik di pedesaan adalah terkucil dan terusirnya tuan-tuan tanah dari desa. Sebagai tindak lanjut pukulan politiknya, Mao menyampaikan harus dilanjutkan dengan pukulan ekonomi.

301. *Ibid*, 49-53

302. *Ibid*, 54.

Perjuangan revolusi agraria dalam rangka Revolusi Demokrasi Baru dalam bidang ekonomi adalah bagian penting untuk menggantikan ekonomi feodalisme di pedesaan. Serikat tani mengeluarkan kebijakan untuk mendesak kekuatan tuan tanah dan tani kaya. Kebijakan tersebut terdiri dari beberapa aspek, antara lain mengenai padi dan beras, uang sewa tanah dan tanggungan, larangan pencabutan tanah yang disewakan, dan penurunan biaya bunga pinjaman.³⁰³

Partai Komunis Tiongkok juga mendorong serikat tani untuk menjalankan gerakan koperasi. Dalam hal ini, Mao menilai bahwa penghisapan yang terjadi terhadap kaum tani salah satunya adalah tidak tersedianya penjaminan harga terhadap hasil produksinya dan penyediaan pasar untuk distribusi. Dalam kondisinya sebelum revolusi agraria dilancarkan, kaum tani kerap dibenturkan oleh lintah-lintah darat dan tengkulak yang mengatur harga-harga di desa. Dengan bersandar dari kondisi tersebut, maka revolusi agraria juga harus mampu membangun koperasi-koperasi untuk membantu penghidupan kaum tani. Mengenai ini, Mao menjelaskannya sebagai berikut:

“Kaum tani benar-benar membutuhkan koperasi, terutama koperasi konsumsi, koperasi penjualan, dan koperasi kredit. Ketika membeli barang-barang mereka dihisap oleh pedagang, ketika menjual hasil pertaniannya mereka ditipu oleh pedagang, ketika meminjam uang atau beras mereka diperas oleh lintah darat; karena itu mereka ingin sekali memecahkan ketiga masalah itu”³⁰⁴

Pada praktiknya, kaum tani menurut Mao kerap mengalami kesulitan dalam mendirikan koperasi. Di sinilah Mao menekankan peran penting dari pimpinan

303. *Ibid*, 48-50

304. *Ibdi*, 69.

maupun anggota Partai Komunis Tiongkok untuk mendampingi kaumtani dalam mendirikan koperasi.

Program-program ekonomi tersebut berhasil mendesak tuan tanah dan penguasa daerah. Semenjak kebijakan itu diterapkan, tuan tanah dan pemerintahan daerah tidak lagi berani melakukan tindak penghisapan dan penindasan. Bersamaan dengan itu, kesejahteraan kaum tani juga semakin meningkat karena dengan drastisnya telah berkurang beban yang selama ini disebabkan oleh sistem feodalisme. Prestasi besar ini yang menurut Mao adalah dampak dari perjuangan kaum tani yang dipimpin dan terorganisir.

Selain politik dan ekonomi feodalisme, kebudayaan feodalisme juga menjadi sasaran utama dalam revolusi agraria. Serikat-serikat tani di desa melakukan penghancuran kebudayaan feodal. Budaya dan sistem feodal-patriarkal adalah contoh yang dihancurkan.³⁰⁵ Penghancurnya menggunakan larangan untuk melakukan penindasan dan tindak sub ordinasi kepada perempuan dan melibatkan perempuan secara aktif dalam segala aspek. Serikat tani dan Partai Komunis Tiongkok juga mendidik kaum perempuan menjadi revolusioner.

Dalam aspek budaya, serikat tani juga mengeluarkan berbagai kebijakan larangan untuk beberapa aktivitas yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Peraturan larangan tersebut antara lain ialah, bermain kartu dan judi, menghisap madat/candu, melakukan prosesi pertunjukan vulgar, hingga pelarangan pembuatan arak dan minuman keras lainnya.³⁰⁶ Menurut Mao, larangan-larangan tersebut bertujuan khusus untuk melakukan perubahan

305. *Ibid*, 57.

306. *Ibid*, 61-64.

kebudayaan dan kebiasaan masyarakat. Rakyat Tiongkok menurut Mao telah tereduksi dengan kebudayaan terbelakang dari kekuasaan tuan tanah yang merugikan diri sendiri. Seiring dengan penghancuran kekuasaan tuan tanah dan sistem feodalisme, Mao menganggap pentingnya untuk mengubah kebudayaan yang diwarisi oleh sistem feodalisme.

Dalam melakukan revolusi agraria pada tahap yang pertama, Mao juga mengemukakan beberapa prestasi besar lain yang diraih oleh kaum tani. Prestasi lain dari serikat tani, antara lain adalah mampu menghilangkan perampok dan bandit serta memperbaiki infrastruktur di pedesaan. Kekuatan dan kekuasaan dari serikat tani menjadikannya suatu organisasi yang ditakutkan oleh kelompok yang kontra revolusioner. Salah satu yang menjadi sasaran gerakan kaum tani adalah perampok dan bandit. Menurut Mao, semenjak berkuasanya serikat tani tidak ada lagi perampok dan bandit yang berani melakukan aksinya.³⁰⁷ Selain itu, jumlah perampok dan bandit menjadi jauh berkurang karena harga-harga kebutuhan pokok menjadi murah dan dapat jangkauan, hal ini berbanding lurus dengan berkurangnya jumlah perampok dan bandit.

Serikat tani bagi Mao menjadi 'idola' baru bagi massa di desa-desa. Sebelum berdirinya serikat tani, jalan-jalan dan jembatan maupun infrastruktur lain di pedesaan hampir seluruhnya rusak. Dengan desakan dari program serikat tani, seluruh rakyat di daerah masing-masing saling mengerjakan dan memperbaiki infrastruktur yang rusak.³⁰⁸ Program ini lebih diprioritaskan untuk menyasar tuan tanah dan tani kaya. Serikat tani menekan tuan tanah dan tani kaya

307. *Ibid*, 66.

308. *Ibid*, 70.

untuk melakukan subsidi pada perbaikan infrastruktur di desa-desa. Seluruh prestasi besar ini adalah awal yang baik dari revolusi agraria.

Kemenangan Revolusi Demokrasi Baru berarti kemenangan awal bagi revolusi agraria. Berdirinya negara demokrasi rakyat, bukan berarti perjuangan revolusioner telah selesai. Menurut Mao, pasca kemenangan tahap pertama, dalam masyarakat Tiongkok masih terdapat kontradiksi kelas. Terdapatnya kontradiksi kelas terutama karena masih terdapat tuan-tuan tanah dan boorjuasi komprador di Tiongkok. Dengan demikian, di Tiongkok perjuangan kelas akan tetap berjalan. Dalam tahapan ini, perjuangan kelas akan meningkat statusnya menjadi perjuangan yang sosialis. Perjuangan yaang demikian juga menjadikan revolusi agraria berganti watak, menjadi sosialis.

Revolusi agraria terus berjalan seiring dengan pembangunan sosialisme di Tiongkok. Pasca kemenangan Revolusi Demokrasi Baru, revolusi agraria terus berjalan. Menurut Mao, keberlangsungan revolusi agraria akan tetap berjalan hingga terciptanya tatanan yang kolektif dan mandiri. Dalam pemikirannya, Mao menekankan bahwa revolusi agraria yang dipimpin oleh Partai Komunis Tiongkok melalui serikat-serikat tani merupakan upaya yang berat. Perubahan status tanah dari milik pribadi kaum tani menjadi milik kolektif adalah tantangan terbesarnya. Hal ini didasari pada asal kelas kaum tani yaitu borjuasi kecil yang tetap memiliki ciri individualisme. Dengan demikian, Mao memandang penting untuk mendidik kaum tani hidup berkoletif.

Melakukan pembangunan sosialisme melalui revolusi agraria termanifestasi dalam program pembentukan “grup kerja saling bantu” dan

“komune rakyat”. “grup kerja saling bantu” merupakan upaya nyata dari negara untuk mendorong rakyat melakukan kerja secara kolektif dalam kerja produksinya. Seluruh keluarga diwajibkan untuk saling membantu dalam mengerjakan kerja produksi, kerja ini dikhususkan pada sektor pertanian. Dalam hal ini, tanah-tanah berskala besar ditetapkan sebagai tanah bersama dan harus dikerjakan secara bersama melalui “grup saling bantu”.

Dalam proses pembangunan sosialisme di Tiongkok, Wertheim mengatakan bahwa pembangunan “grup saling bantu” merupakan upaya di Tiongkok untuk menuju kolektivisasi alat produksi secara lebih luas.³⁰⁹ Pandangan Wertheim tersebut berdasar pada kondisi yang terjadi di Tiongkok pada tahun 1957. Lebih lanjut, untuk mengakomodir seluruh hasil kerja dari “grup saling bantu” diperlukan koperasi-koperasi besar. Koperasi tersebut ditujukan untuk menjadi badan pengelolaan dan pendistribusian hasil produksi. Dengan demikian, jelas bahwa Tiongkok sedang menuju negeri yang sosialis.

Mao sebagai seorang pemimpin revolusi sekaligus pemimpin Partai Komunis Tiongkok terus mendorong terjadinya perubahan-perubahan besar dalam sektor agraria. Kolektivisasi alat produksi merupakan jalan keluar untuk mengubah sistem kepemilikan alat produksi secara pribadi menjadi kepemilikan secara kolektif. Mengenai ini, Wertheim lebih lanjut memaparkan:

“Kolektivisasi juga akan menjamin tingkat persamaan yang lebih tinggi. Ini tidak berarti bahwa para pemimpin Tiongkok adalah ‘pemerata-pemerata’ yang mengarah pada suatu distribusi kekayaan secara merata. Untuk suatu jangka waktu yang panjang, azas ‘sosialis’ masih akan berlaku, yaitu bahwa setiap orang akan mendapatkan sesuai pekerjaannya. Namun begitu, kepemilikan kolektif atas tanah, ternak dan

309. W.F. Wertheim, *Dunia Ketiga, dari dan Ke Mana: Negara Protektif Versus Pasar Agresif*, terj. Oey Hay Djoen. (Yogyakarta: Oey's Renaissance, 1997), 52.

alat-alat kerja sudah pasti menyumbang pada suatu pengurangan praktis dari ketidakadilan-ketidakadilan.”³¹⁰

Perkembangan dari program *Land Reform* menjadi kolektivisasi alat produksi bertujuan untuk mendorong kesejahteraan rakyat menjadi lebih baik.

Arti penting kolektivisasi dalam program revolusi agraria juga berkaitan dengan partisipasi dalam kerja. Dalam program kolektivisasi, negara mendorong keterlibatan secara aktif bagi seluruh rakyat di setiap wilayahnya. Dengan bentuk yang kolektif, akan melahirkan keterbukaan secara besar lapangan kerja. Berbagai aspek dari sektor-sektor publik akan mendorong rakyat untuk terlibat. Selain itu, partisipasi kerja juga menjadi penting mengingat azas “setiap orang mendapatkan sesuai yang dikerjakannya”. Azas sosialis ini berarti juga menutup ‘pintu’ bagi kelas borjuasi yang semula tidak terlibat dalam partisipasi kerja produksi.

Partisipasi kerja yang baik dalam mendukung berjalannya kolektivisasi alat produksi telah membangun efisiensi kerja dan pembagian kerja secara lebih baik. Dalam pemikiran Mao, kehidupan yang kolektif akan menjadikan rakyat Tiongkok terdidik dalam membangun masyarakat sosialis menuju komunis. Pandangan Mao tersebut diperkuat dengan pernyataan Wertheim melalui penelitiannya di Provinsi Guangdong berikut:

“Pada bulan Mei 1954, telah bertumbuh kesadaran bahwa koperasi, di bawah kepemilikan pemerintah, akan menciptakan keuntungan-keuntungan. Sementara orang hendak membentuk sebuah koperasi tingkat lebih rendah, di mana para pemilik tanah akan mempertahankan tanah mereka, dan sebagian atas landasan itu akan berbagi dalam keseluruhan panennya.”³¹¹

310. *Ibid*, 53.

311. *Ibid*, 56.

Hal yang dipaparkan oleh Wertheim di atas adalah bentuk kolaborasi antara bentuk sempurna dari kolektivisasi dan koperasi besar dengan kolektivisasi hasil produksi dan koperasi skala kecil. Hasil dari program kolektivisasi di Provinsi Guangdong adalah keuntungan sebesar 600 Yuan.³¹²

Pesatnya perkembangan sektor pertanian Tiongkok terbukti dengan rata-rata pertumbuhan 3,4% selama 10 tahun.³¹³ Sektor pertanian menjadi fokus pertama dalam upaya pembangunan sosialisme di Tiongkok. Hal ini berkaitan dengan karakteristik negeri Tiongkok yang agraris. Program *Land Reform* dan kolektivisasi menampilkan efek positifnya kepada pembangunan sektor agraria. Mao dalam hal ini, menekankan bahwa sektor agraria secara perlahan akan ditingkatkan dari yang tradisional menjadi modern. Dalam hal ini, Partai Komunis Tiongkok melalui Republik Rakyat Tiongkok menyusun program bertahap agar dapat disesuaikan dengan perkembangan dan kemampuan rakyatnya. Mengenai ini, Tatiana Lukman memaparkan data-data mengenai perkembangan lebih lanjut dari upaya pembangunan sosialisme di Tiongkok dalam tulisannya:

“... luas tanah yang dikerjakan dengan mesin meningkat dari 2,4% pada tahun 1957 menjadi 42,4% pada tahun 1979; luas lahan yang diirigasi meningkat dari 24,4% dari seluruh luas lahan pada tahun 1957 menjadi 45,2% pada tahun 1979; pada periode yang sama, lahan yang diirigasi dan dikerjakan dengan mesin meningkat dari 4,4% menjadi 56,3%. Pada tahun 1957 terdapat 544 stasiun listrik- pada tahun 1979 jumlah tersebut telah meningkat menjadi 83.244. Selama periode yang sama, jumlah traktor ukuran besar dan menengah meningkat 45 kali, mesin panen meningkat 12 kali, sedangkan traktor kecil meningkat jumlahnya dari tidak ada menjadi 1.67 Juta.”³¹⁴

312. *Ibid*, 57.

313. Tatiana Lukman, *Alternatif*, (Jakarta: Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat, 2013), 107.

314. *Ibid*, 108.

Dalam pemikiran Mao, perkembangan pesat sektor agraria dalam upaya pembangunan sosialisme di Tiongkok harus diimbangi dengan pembangunan industri. Hal ini karena bagi Mao perpaduan antara sektor agraria dan industri akan memperkuat perekonomian Tiongkok yang berarti memperkuat basis struktur dalam masyarakat. Dalam memaknai mengenai pembangunan industri, Mao bertolak pada latar belakang Tiongkok yang setengah jajahan setengah feodal. Dalam hal ini, Mao memandang bahwa dalam Revolusi Demokrasi Baru menuju pembangunan sosialisme di Tiongkok, pembangunan industri harus dilakukan secara bertahap.

Tahap pertama pembangunan industri harus disesuaikan dengan program Revolusi Demokrasi Baru. Kontradiksi pokok masyarakat Tiongkok yaitu dengan imperialisme dan feodalisme. Dengan demikian, pembangunan industri Tiongkok tetap melibatkan kelas borjuasi nasional. Dalam menjalankan revolusi demokrasin baru, borjuasi nasional yang menguasai sebagian sektor industri ini masih dilindungi oleh revolusi. Mengenai ini, Mao menguraikan dalam tulisannya:

“... harus diadakan perbedaan yang tegas antara penghapusan penghisapan feodal dari tuan tanah dan tani kaya dengan perlindungan atas industri dan perdagangan yang diusahakan tuan tanah dan tani kaya; harus diadakan perbedaan yang tegas antara pedoman yang tepat yaitu mengembangkan produksi, memakmurkan ekonomi, memperhatikan kepentingan umum maupun kepentingan perseorangan serta menguntungkan buruh maupun majikan.”³¹⁵

Mao menekankan betapa pentingnya memadukan antara kepentingan buruh dengan berusaha menjamin secara relatif kelangsungan bisnis borjuasi nasional.

315. Mao Tse Tung, *Pilihan Karja Mao Tse Tung Djilid IV*, (Peking: Komisi Penerbitan Bahasa Asing Komite Central Partai Komunis Tiongkok, 1967), 241.

Dalam hal ini, Mao memandang hal tersebut harus ditempuh karena industri Tiongkok selama penindasan dari imperialisme dan feodalisme mengalami stagnasi. Dengan demikian, borjuasi nasional diperlukan dalam sektor-sektor tertentu untuk menjaga perkembangan dan pertumbuhan industri Tiongkok pasca kemenangan demokrasi baru. Dalam hal ini, Tatiana Lukman mengutip tulisan Mao yang dikeluarkan pada tahun 1950 mengenai kedudukan borjuasi nasional:

“Pada akhirnya kaum borjuasi nasional tidak akan ada lagi, tetapi pada tahap saat ini kita harus mengumpulkan mereka di sekitar kita dan tidak mendorong mereka keluar. Di satu pihak kita harus berjuang menentang mereka, di lain pihak kita harus bersatu dengan mereka.”³¹⁶

Pandangan Mao tersebut adalah bentuk kompromi politik taktis terhadap kelompok borjuasi nasional. Pandangan politik tersebut akan diarahkan berubah secepat mungkin. Hal ini terbukti pada tahun 1952, Mao menyatakan bahwa kontradiksi antara kelas pekerja dan kelas borjuasi adalah kontradiksi pokok di Tiongkok.³¹⁷ Syarat untuk penghancuran kekuatan borjuasi terutama dinilai dari perkembangan pembangunan sosialisme. Dalam hal ini, ukuran utamanya adalah sistem produksi agraria dan industri Tiongkok.

Dalam praktik pembangunan industri di Tiongkok sesungguhnya sudah mulai dilakukan sebelum kemenangan Revolusi Demokrasi Baru. Sejalan dengan revolusi agraria dan pembangunan sektor pertanian, sektor industri juga menjadi perhatian saat Mao dan Partai Komunis Tiongkok melancarkan revolusi. Hal ini terlihat jelas pada artikel tentang perekonomian Tiongkok yang ditulis Mao pada tahun 1945:

316. Tatiana Lukman, *Alternatif*, (Jakarta: Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat, 2013), 107.

317. *Ibid*, 113.

“Kita harus berusaha supaya dalam dua tiga tahun Daerah Perbatasan Shensi-Kansu-Ningsia dan semua Daerah Bebas di belakang garis pertahanan musuh bisa swasembada seluruhnya atau sebagian besar dalam hal bahan makanan dan barang-barang industri, dan bahkan ada kelebihannya. Kita harus berusaha supaya pertanian, industri dan perdagangan kita mencapai hasil yang lebih besar daripada sekarang ini.”³¹⁸

Pembangunan industri yang demikian berjalan hingga kemenangan Revolusi Demokrasi Baru.

PascaRevolusi Demokrasi Baru, orientasi pembangunan industri menjadi berubah sesuai dengan perkembangan kontradiksinya. Kemenangan melawan imperialisme dan feodalisme menjadikan revolusi Tiongkok melangkah pada tahap selanjutnya, yaitu sosialisme. Pada tahap ini, kontradiksi pokoknya adalah antara politik kelas proletariat melawan kelas borjuasi. Dengan demikian, pembangunan industri akan semakin membatasi keterlibatan dari kelas borjuasi. Pembangunan industri dalam negeri Tiongkok pasca kemenangan Revolusi Demokrasi Baru menurut Mao harus selaras dengan pembangunan sektor agraria di pedesaan.

Perkembangan sektor industri melalui program keselarasan dengan sektor agraria terbukti mampu menjawab permasalahan ekonomi Tiongkok. Pada tahun 1952 sektor industri baru mencapai angka 36% dari nilai bruto produksi nasional, angka tersebut meningkat pesat menjadi 72% pada tahun 1975.³¹⁹ Lebih lanjut, capaian besar dari pembangunan industri Tiongkok adalah dengan adanya pembangunan pada periode tahun 1966-1976 yang meliputi peletusan bom atom,

318. Mao Tse Tung, *Pilihan Karja Mao Tse Tung Djilid III*, (Peking: Komisi Penerbitan Bahasa Asing Komite Central Partai Komunis Tiongkok, 1967), 242.

319. Tatiana Lukman, *Alternatif*, (Jakarta: Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat, 2013), 107.

pembuatan insulin kristal sintetis untuk sapi, komputer transistor, komputer sirkuit terpadu, kamera tiga dimensi otomatis, antibiotik Qingda, peluncuran satelit, rel kereta api elektron, tanker 100.000 ton, perkembangan sumur minyak.³²⁰ Hasil tersebut merupakan gambaran konkret dari hasil buah pikir Mao dalam membangun sosialisme di Tiongkok.

Dalam pemikirannya, Mao menempatkan pembangunan sektor agraria dan industri Tiongkok melalui bentuk koperasi-koperasi yang dikelola oleh Komune Rakyat. Komune Rakyat adalah bentuk terkecil dari otoritas masyarakat di Tiongkok. Komune Rakyat terdiri dari beberapa unit keluarga dan “grup saling bantu”. Tugas utama dari Komune Rakyat adalah mengelola unit produksi yang terdapat di daerah masing-masing. Dalam hal ini, pengelolaan harus sesuai dengan arahan program pembangunan sosialisme yang dikeluarkan oleh negara. Dalam hal ini, pembentukan Komune Rakyat inilah yang secara nyata melibatkan rakyat dalam segala urusan negara. Komune Rakyat inilah yang pada akhirnya mendorong kemajuan pesat sektor agraria maupun industri Tiongkok.

320. *Ibid*, 110.

Secara ringkas dan rinci, data mengenai perkembangan Komune Rakyat dapat dilihat melalui tabel 3 (tiga) berikut:

TABEL 5. Peningkatan Produksi Agrikultur di Tiongkok Sejak 1957

Wilayah Komune	Tanaman Utama	Hasil: Kg/Hektar		
		1957	1963	1964
Beijing	Gandum	1.900	-	2.000
	Jagung	-	3.000	-
	Beras	-	4.500	-
	Sayuran Segar	60.000	80.000	-
Shanghai	Sayuran Segar	45.000	76.000	-
	Gandum	1.200	-	2.700
	Beras	4.000	6.000	-
	Kapas (Murni)	310	660	-
	Kolza	750	-	1.575
Hangzhou	Beras	4.500	6.800	-
Guangzhou	Beras	4.700	8.600	-
Guangdong Utara	Beras	3.400	7.300	-
	Kacang	720	1.500	2.000
Guangdong Selatan	Beras	-	7.200	-
Hubei-Utara	Beras	3.900	7.650	-
Hubei-Utara	Beras	-	7.500	-
	Kapas (murni)	-	750	-

Sumber: W.F. Wertheim, *Dunia Ketiga, dari dan Ke Mana: Negara Protektif Versus Pasar Agresif*, terj. Oey Hay Djoen. (Yogyakarta: Oey's Renaissance, 1997), 72-73.

Tabel tersebut merupakan hasil penelitian dari Wertheim saat mengunjungi Tiongkok beberapa kali. Angka-angka di atas adalah bukti bahwa pembangunan Komune Rakyat telah mencapai hasil yang signifikan dalam rangka mendirikan negara sosialis Tiongkok.

Dalam melakukan upaya pendistribusian hasil produksinya, Komune Rakyat juga memiliki sistemnya sendiri. Dalam hal ini, diperlukan untuk mengutip panjang dari pemaparan Dongping-Han seorang tani yang tercantum dalam buku Tatiana Lukman:

“Di desa saya terdapat delapan tim produksi. Tiap tim produksi ada 40 keluarga. Tiap tahun kami memilih lima pimpinan tim produksi. Semua orang keluar dan bekerja bersama. Setelah selesai pekerjaan, kasir akan mencatat berapa orang yang bekerja hari itu. Pada akhir tahun, ketika panen datang, akuntan desa bersama dengan akuntan tim produksi, akan merancang *Plan* distribusi. 70% dari gandum/padi dibagi menurut jumlah orang yang ada di keluarga kamu. 30% dibagi menurut berapa banyak kamu bekerja dalam kolektif. Jadi, seandainya kamu tidak bekerja di sawah/ladang, kamu tetap mendapat hak atas 70% dari gandum kolektif. Itu adalah ditribusi pada tingkat tim produksi. Ada juga distribusi pada tingkat brigade produksi. Desa memiliki banyak perusahaan. Setelah menyisihkan uang untuk dana kesejahteraan, uang untuk membeli alat-alat baru dan sebagainya, desa akan membagi pemasukannya menurut berapa banyak kamu telah bekerja dalam kolektif.”³²¹

Sistem pembagian hasil produksi yang demikian adalah ciri dari masyarakat sosialisme di Tiongkok. Dalam aspek kebutuhan hidup lainnya, seperti sayur, buah, ikan, rokok, pakaian, dan lainnya juga diterapkan sistem kolektif yang sama seperti pada contoh gandum/padi.³²² Dalam menentukan pendapatan dari kerja produksinya, ditetapkan melalui seberapa besar kerja dalam suatu unit produksi. Hal ini menandakan Tiongkok tidak menghentikan revolusinya, namun terus maju menuju pembangunan negeri sosialis.

Keberhasilan Komune Rakyat dalam memajukan perekonomian Tiongkok menjadi kunci sukses pembangunan sosialisme. Pembangunan sosialisme juga secara langsung menampilkan hasilnya bagi masyarakat. Menurut

321. Tatiana Lukman, *Alternatif*, (Jakarta: Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat, 2013), 118.

322. *Ibid*, 119.

Raymond Lotta, antara tahun 1949 dan 1975, harapan hidup di Tiongkok meningkat dari 32 tahun menjadi 65 tahun.³²³ Dalam aspek pembaharuan sistem kerja dalam industri juga terdapat perubahan. Sebelum kemenangan Revolusi Demokrasi Baru, buruh Tiongkok rata-rata harus bekerja 18 jam sehari, sementara pasca kemenangannya Partai Komunis Tiongkok menetapkan 8 jam sehari menjadi peraturan yang baru.

Dalam strategi pembangunannya, Mao menekankan pentingnya kesinambungan antara sektor pertanian dan industri. Dalam pemikirannya, Mao memandang bahwa dana untuk mengembangkan industri hanya dapat diberikan dari *surplus* sektor pertanian. *Surplus* sektor pertanian digunakan untuk mengembangkan industri, satu sisi sektor industri harus mampu mengembangkan sektor pertanian, terutama perihal alat-alat kerja modern. Mengenai ini, Tatiana Lukman menjabarkan skema pembangunan sosialisme melalui kolaborasi sektor pertanian dan industri sebagai berikut:

“Negara mengambil kebijakan menurunkan pajak pertanian dan kebijakan lainnya yang menguntungkan sektor pertanian, dan investasi disalurkan ke dalam proyek-proyek infrastruktur pertanian yang besar, seperti Kanal Bendera Merah dan Proyek Sungai Kuning. Industri kecil dan menengah dibangun di brigade-brigade dan komune rakyat untuk memproduksi alat-alat dan mesin-mesin yang diperlukan untuk mekanisasi dan modernisasi pertanian. industri yang dibangun di pedesaan menciptakan lapangan kerja baru bagi kaum tani.”³²⁴

Model pembangunan tersebutlah yang dinamakan oleh Mao dengan kesinambungan sektor dalam rangka pembangunan sosialisme di Tiongkok. Dengan demikian, pembangunan politik dan ekonomi baru dapat dilakukan dengan baik.

323. *Ibid*, 108.

324. *Ibid*, 241.

Pembangunan sosialisme dalam aspek politik dan ekonomi yang dilakukan oleh negara di bawah pimpinan Mao telah berdampak besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Maju dan berkembangnya politik dan ekonomi pasca Revolusi Demokrasi Baru menandakan sebuah tahapan baru dalam sistem sosial Tiongkok. Tiongkok secara bertahap beralih menjadi negeri sosialis. Dalam perjalanannya, Mao juga menggalas program besar untuk menopang pembangunan sosialisme. Program tersebut adalah Revolusi Besar Kebudayaan Proletariat (RBKP).

RBKP merupakan tindak lanjut dari revolusi demokrasi baru di sektor kebudayaan. Dalam peralihan dari sistem demokrasi baru menuju sosialisme, sektor kebudayaan juga memiliki peran penting. Dalam pemikiran Mao, kontradiksi pokok antara borjuasi dengan proletariat Tiongkok juga terdapat dalam aspek kebudayaan. Revolusi Sosialis Tiongkok harus mampu melikuidasi kebudayaan borjuasi dalam masyarakat Tiongkok. Dengan demikian, Mao menandakan bahwa diperlukan suatu perubahan dan perjuangan besar dalam sektor kebudayaan.

Mao menyadari bahwa pasca kemenangan Revolusi Demokrasi Baru tetap terdapat pertentangan kelas di dalam masyarakat. Kelas borjuasi dalam negeri tetap berupaya keras untuk melakukan restorasi kapitalisme di Tiongkok. Dalam hal ini, Mao membagi 2 (dua) macam kelas borjuasi yang ingin menghancurkan pembangunan sosialisme di Tiongkok. *Pertama*, kelompok borjuasi yang sejak awal memang menentang pembangunan sosialisme dengan dukungan langsung dari imperialisme. *Kedua*, kelompok borjuasi yang berada

dalam kekuatan revolusioner maupun Partai Komunis Tiongkok, kelompok ini dinamakan oleh Mao sebagai kaum revisionis.³²⁵

Berdasar dengan analisis kelas yang berkembang pascaRevolusi Demokrasi Baru inilah Mao menegaskan pentingnya RBKP dalam menopang pembangunan sosialisme. Mengenai RBKP, Mao menjelaskannya secara detail:

“Revolusi Besar Kebudayaan Proletariat, pada dasarnya, adalah sebuah revolusi politik besar yang dipimpin oleh kelas proletariat melawan kelas borjuasi dan semua kelas penghisap lainnya di bawah kondisi sosialisme, kelanjutan dari perjuangan panjang yang dilancarkan oleh Partai Komunis Tiongkok dan massa rakyat revolusioner besar yang diorganisasinya, melawan Kuomintang, kelanjutan dari perjuangan kelas antara proletariat dan borjuasi.”³²⁶

Dalam hal ini, Mao menegaskan bahwa RBKP adalah suatu agenda untuk menghancurkan kebudayaan borjuasi di Tiongkok. Kebudayaan borjuasi yang dimaksud Mao tidak hanya yang berada luas di masyarakat, namun yang berada dan menjangkit dalam tubuh Partai Komunis Tiongkok dan pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok.

Mao dalam pemikirannya ini sekali lagi secara konsisten menggunakan teorinya tentang kontradiksi. Bagi Mao, suatu revolusi benar adanya akan menghancurkan suatu kontradiksi pokok, namun bukan berarti sudah menyelesaikan seluruh kontradiksi. Pergeseran kontradiksi pasca kemenangan Revolusi Demokrasi Baru menjadi sebuah keniscayaan bagi Mao. Kontradiksi yang awalnya pokok menjadi lenyap, sementara kontradiksi non-pokok menjadi

325. Kaum revisionis adalah kaum yang beralih ingin meninjau kembali Marxisme yang justru menghilangkan seluruh unsur revolusionernya. Kepentingannya adalah mengalihkan perjuangan revolusioner menjadi reformis. Tujuan utamanya adalah untuk mempertahankan atau mengembalikan kepentingan dari imperialisme baik seara terbuka ataupun sembunyi-sembunyi. L.Harry Gould, *Kamus Kecil Istilah Marxis*, terj. Rollah Syarifah (Jakarta: Kelompok Kerja Untuk Demokrasi Rakyat, 2006), 66.

326. Tatiana Lukman, *Alternatif*, (Jakarta: Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat, 2013), 129.

kontradiksi pokok. Inilah yang terjadi pada kontradiksi antara borjuasi dan proletariat Tiongkok.

Kontradiksi antara borjuasi dan proletariat Tiongkok merupakan hal yang harus segera diselesaikan. Pemikiran Mao tentang perjuangan kebudayaan kemudian termanifestasi dalam program Partai Komunis Tiongkok. Dalam dokumen keputusan Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok tentang RBKP yang diterbitkan pada tahun 1966, tertulis jelas arah dari perjuangan kebudayaan Tiongkok. Dokumen tersebut menjelaskan:

“... tujuan kita adalah berjuang melawan dan menggulingkan orang-orang berkuasa yang mengambil jalan kapitalis, mengkritik dan menolak ‘otoritas’ kaum akademis borjuis reaksioner dan ideologi dari kelas borjuasi dan semua kelas penghisap lainnya, dan mengubah pendidikan, sastra dan seni dan semua bagian lain dari bangunan atas yang tidak sesuai dengan dasar ekonomi sosialis, sehingga memudahkan konsolidasi dan perkembangan dari sistem sosialis.”³²⁷

Perjuangan kebudayaan melalui RBKP merupakan kunci untuk melikuidasi pandangan-pandangan maupun sikap-sikap elit borjuasi di Tiongkok. Dalam hal ini, beberapa rangkaian perjuangan kebudayaan sudah dilakukan sebelumnya.

Pada tahun 1951, terdapat gerakan “Kampanye Tiga Anti”. “Kampanye Tiga Anti” merupakan program untuk melawan segala bentuk penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan, yang terdiri dari anti-korupsi, anti-pemborosan dan anti-birokratisme. Dalam hal ini, Mao menekankan keterlibatan massa rakyat Tiongkok secara luas untuk melakukan kampanye ini. Rakyat Tiongkok berhak mengadakan segala bentuk tindakan yang dilarang dalam program tersebut. Hal

327. *Ibid*, 133.

ini bertujuan agar Partai Komunis Tiongkok dan pemerintahan yang ada bersih dari seluruh tindakan tersebut. Program kampanye ini berlanjut pada tahun 1952.

Tahun 1952 terjadi gerakan kebudayaan kembali, yaitu “kampanye Lima Anti”. Aspek-aspek yang terdapat dalam kampanye ini mengenai, penyogokan, tidak membayar pajak, pemalsuan, pencurian kekayaan negara dan pembocoran rahasia negara. Gerakan kampanye tiga dan lima anti ini menunjukkan suatu keseriusan dari Mao dan Partai Komunis Tiongkok untuk memperbaiki kebudayaan masyarakatnya. Hal ini terus dilakukan, bahkan tidak jarang yang menjadi sasaran dari gerakan tersebut adalah pimpinan-pimpinan Partai.

Selain gerakan tersebut, Mao juga pernah memimpin suatu gerakan yang dimulai pada 1960 yaitu “Gerakan Pendidikan Sosialis”. Gerakan ini ditujukan untuk mendidik dan menanamkan kembali nilai-nilai sosialisme, khususnya teori-teori Marxisme-Leninisme. Selain itu, gerakan tersebut juga mengambil langkah praksis, yaitu gerakan *Su Qing* (empat pembersihan). Keempat aspek yang harus dibersihkan atau diperbaiki antara lain adalah, disiplin politik, penyimpangan ideologi, penyimpangan organisasi, dan kesalahan manajemen ekonomi.³²⁸

Keseluruhan gerakan kebudayaan tersebut menjadi penting bagi pembangunan sosialisme di Tiongkok. Pendidikan-pendidikan di Tiongkok sepenuhnya dipergunakan untuk mendidik seluruh rakyatnya. Di dalam Universitas dilarang adanya perbedaan dan pembatasan peserta didik. Manteri

328. W.F. Wertheim, *Dunia Ketiga, dari dan Ke Mana: Negara Protektif Versus Pasar Agresif*, terj. Oey Hay Djoen. (Yogyakarta: Oey's Renaissance, 1997), 170.

yang diberikan bertujuan untuk menggabungkan antara kemampuan kerja mental dengan kerja praktik.³²⁹ Mahasiswa juga diarahkan untuk menghilangkan unsur borjuasi kecilnya. Berikut adalah kutipan sumpah mahasiswa yang terdapat di Universitas Beijing yang mencerminkan pengaruh dari RBKP:

“Kami, mahasiswa, kaum buruh, kaum tani dan prajurit, tidak mengaitkan arti penting khusus pada kartu nama ‘insinyur. Kami tidak akan pernah membiarkan diri kami dikorupsi, baik itu oleh kepentingan diri sendiri atau oleh suatu hasrat untuk memperoleh kemasyhuran pribadi. Keputusan telah kami ambil: sekalipun kita menduduki suatu pos baru, kesadaran revolusioner kami tetap seperti sediakala. Sekalipun lingkungan kami berbeda, posisi kami sebagai kaum buruh yang lahir dari rakyat tetap tidak akan berubah. Terpanggil untuk menunaikan tugas baru, kami akan terus melakukan perjuangan kami dengan cara yang sama.”³³⁰

Pada dasarnya, orientasi pendidikan menurut Mao adalah untuk memenuhi kebutuhan kolektif dan memecahkan masalah yang ada di dalamnya. Dengan demikian, ilmu pengetahuan yang didapat harus mampu diabdikan untuk kehidupan dan kemajuan kolektif. Dalam hal ini, maksud Mao adalah untuk mengikis watak individual masyarakatnya.

Kemajuan lain yang dicapai dari RBKP adalah keterlibatan dan persamaan jenis kelamin. Revolusi Demokrasi Baru dan RBKP menjadi sarana bagi kaum perempuan Tiongkok untuk lebih aktif bekerja dan berkegiatan. Mengenai ini, Wertheim memaparkan penemuannya saat melakukan kunjungan ke Tiongkok:

“Menurut keterangan yang diberikan kepada saya, di antara 80 dan 90% dari mereka yang mampu bekerja terlibat dalam kerja agrikultur. Rata-rata mereka bekerja 100 hari dalam setahun, tetapi ada pula yang bekerja lebih dari 200 hari. Dalam kunjungan-kunjungan saya ke

329. *Ibid*, 180.

330. *Ibid*, 181.

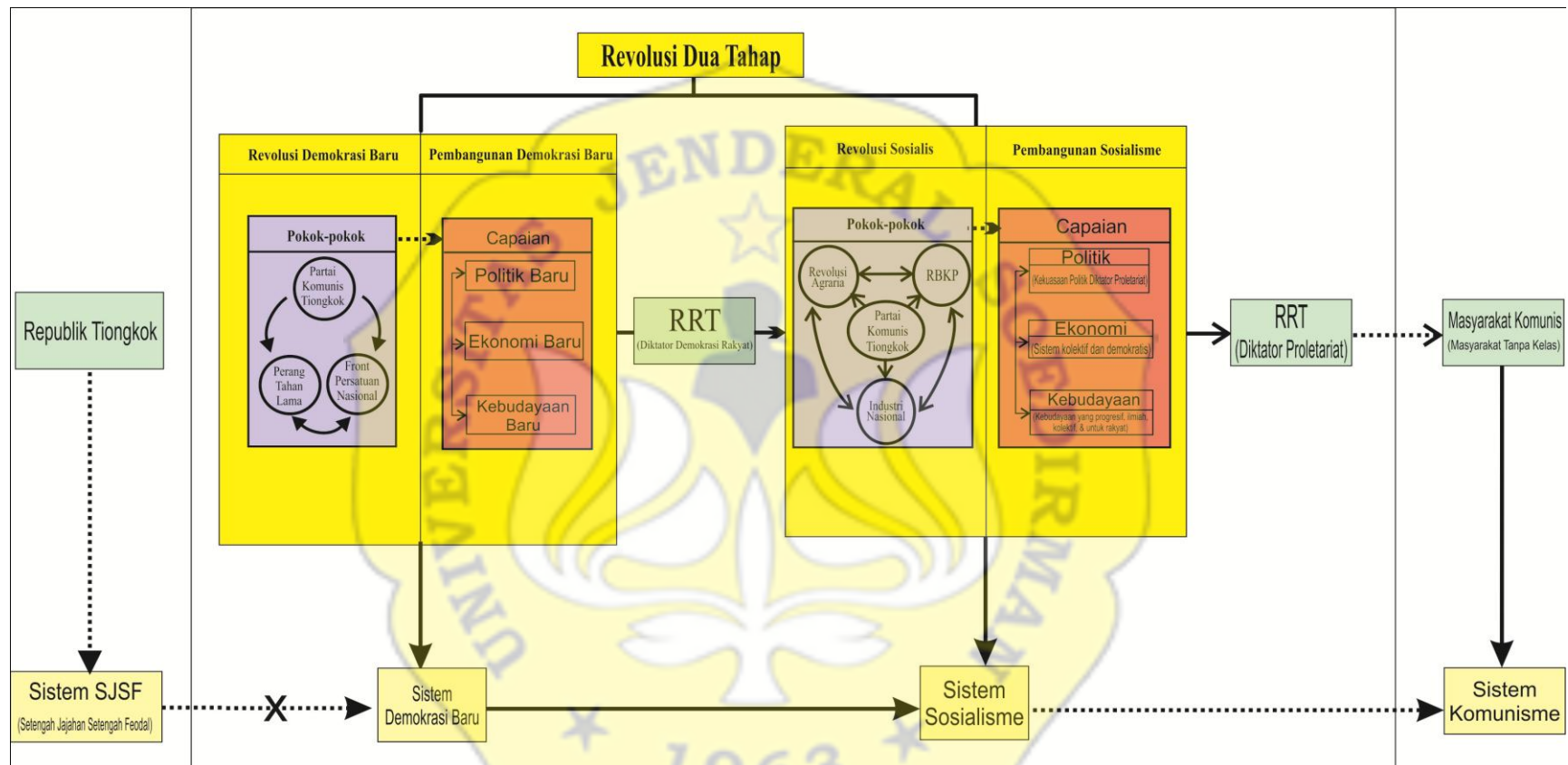
komune-komune rakyat, saya juga memperhatikan bahwa banyak gadis belajar di sekolah-sekolah menengah.”³³¹

Bagi Wertheim, fenomena tersebut tidak terlepas dari pemikiran Mao tentang perjuangan kebudayaan dalam RBKP.

RBKP merupakan sebuah lompatan besar yang beriringan dengan perubahan politik dan ekonomi untuk pembangunan sosialisme. Pemikiran Mao tentang pembangunan sosialisme mendapatkan artinya yang luas dengan berjalannya RBKP. Mao berhasil memadukan secara dialektis antara perubahan ekonomi sebagai basis sosial masyarakat dengan aspek penting yang mendukungnya seperti politik dan kebudayaan. Tak pelak, pemikiran Mao merupakan pemikiran yang mengantarkan Tiongkok dalam upayanya membangun suatu negeri yang sosialis.

Seperti yang tercermin dalam Gambar 17 (Tujuhbelas), dalam pemikiran Mao, revolusi dua tahap ditentukan oleh tiga aspek penting dalam setiap tahapnya. Dalam Revolusi Demokrasi Baru, memiliki aspek pokok berupa, peran kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok, Perang Tahan Lama melawan imperialisme dan kekuatan negara, serta pembentukan Front Persatuan anti imperialisme dan feodalisme. Sementara itu, dalam tahap Revolusi Sosialis untuk membangun sosialisme di Tiongkok, diperlukan tiga aspek pokok juga, yaitu revolusi agraria, pembangunan industri nasional, dan revolusi besar kebudayaan proletariat. Keseluruhan aspek-aspek tersebut berjalan beriringan dan berkesinambungan tanpa jeda.

331. *Ibid*, 182.



GAMBAR 17. Pemikiran Politik Mao Tse Tung tentang Revolusi Dua Tahap untuk Pembangunan Sosialisme di Tiongkok

Pemikiran Mao tentang revolusi dua tahap dapat dinyatakan bertujuan untuk membangun sistem demokrasi baru menuju pembangunan sosialisme hingga berdirinya masyarakat komunis di Tiongkok. Mao dalam hal ini, menyuguhkan revolusi yang sistematis sesuai dengan kondisi konkret masyarakat Tiongkok. Revolusi di Tiongkok menurut Mao terlebih dahulu harus melewati tahap demokrasi baru. Dalam tahap ini, revolusi harus dipimpin oleh Partai Komunis Tiongkok untuk meluncurkan program-program revolusi seperti perang tahan lama dan pembangunan front persatuan. Dalam hal ini, tujuan dari revolusi adalah menghancurkan sistem setengah jajahan setengah feodal dan menggantinya dengan sistem demokrasi baru. Dengan demikian, Revolusi Demokrasi Baru menjadi tahap pertama revolusi di Tiongkok. Dalam tahap ini, negara menjelm menjadi diktator demokrasi rakyat. Artinya, negara dikuasai oleh kelas-kelas revolusioner Tiongkok. Revolusi tahap pertama ini yang akan menjadi jembatan untuk menuju revolusi selanjutnya, yaitu Revolusi Sosialis.

Revolusi Sosialis menjadi langkah selanjutnya pasca kemenangan Revolusi Demokrasi Baru. Revolusi Sosialis mengambil peranan untuk melakukan transformasi dalam masyarakat baik dalam aspek politik, ekonomi, maupun kebudayaan. Revolusi Sosialis akan tetap dipimpin oleh Partai Komunis Tiongkok untuk meluncurkan revolusi agraria, pembangunan industri nasional, dan revolusi besar kebudayaan proletariat. Hal ini menjadikan Revolusi Sosialis sebagai senjata untuk membangun sistem sosialisme di Tiongkok. Peralihan juga terjadi pada tahapan ini, negara tidak lagi dikuasai atau berkarakter diktator demokrasi rakyat, namun berubah menjadi diktator proletariat.

Pemikiran Mao tentang revolusi dua tahap pada akhirnya bertujuan untuk menghancurkan sistem setengah jajahan setengah feodal dan menggantikannya dengan masyarakat tanpa kelas, masyarakat komunis. Masyarakat komunis inilah yang akan dicapai melalui dua tahap revolusi, Revolusi Demokrasi Baru dan Revolusi Sosialis.

